

# PEKAN KEHUMASAN MPR: PELUNCURAN BUKU DIGITAL MPR DAN NOVEL MERAIH MIMPI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.12/TH.XV/DESEMBER 2021

## EKONOMI INDONESIA 2022 OPTIMISTIS MESKI DIBAYANGI PANDEMI COVID-19



ISSN 0854-6371



9 770854 637158

**06** Refleksi  
Cegah Money Laundering  
Pada Jasa Layanan Pinjol

**28** Nasional  
Bamsoet Terima Duta Besar  
Afrika Selatan untuk Indonesia

**39** Selingan  
Sejarah Kementerian  
Agama Indonesia

**52** Sosialisasi  
ToT Empat Pilar MPR: Pancasila  
Pondasi Membangun Bangsa





**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

WISATA BUDAYA DAN KEHARUKAN KINERJAS  
**MAJELIS**

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

# Daftar Isi

EDISI NO.12/TH.XV/DESEMBER 2021



**08 BERITA UTAMA**

## Ekonomi Indonesia 2022

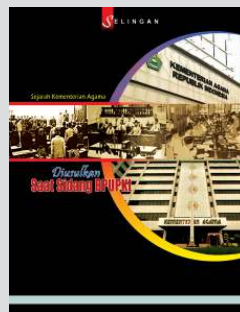
Bukan hanya lembaga dalam negeri, lembaga dari luar negeri pun optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada tahun 2022, yaitu di kisaran 5%. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya masih dibayangi varian baru Covid-19.



**16 Nasional**  
Pekan Kehumasan MPR: Peluncuran Buku Digital MPR



**50 Sosialisasi**  
Sosialisasi Empat Pilar di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan

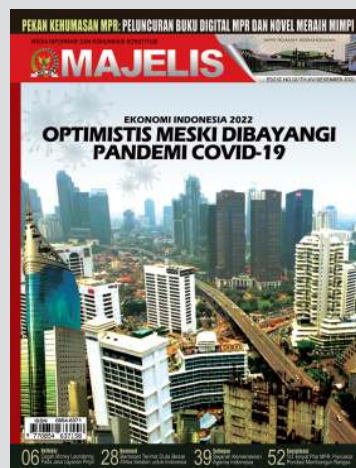


**39 SELINGAN**  
Sejarah Kementerian Agama



**76 Profil**  
Fahira Idris

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Diskusi Majelis .....	36
Aspirasi Masyarakat .....	47
Gema Pancasila .....	48
Varia MPR .....	64
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Rehal .....	81
Dari Rumah Kebangsaan .....	82



**COVER**

Edisi No.12/TH.XV/Desember 2021  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa





**Budi Muliawan**  
Redaktur Pelaksana

## Pengantar Redaksi

### Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022

**S**EJUMLAH lembaga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, cukup optimistis memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Bank Indonesia misalnya, memprediksi ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh sekitar 4,7% - 5,5%. Menurut BI, pertumbuhan ini didorong adanya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, selain adanya kenaikan konsumsi dan investasi dalam negeri.

Tidak jauh berbeda, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada di kisaran 5,1% - 5,4%. Agak lebih rendah, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,3%.

Sementara Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh mencapai 5,9% pada tahun 2022. Meski relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah Vietnam yang diproyeksikan mencapai 6,3%, Malaysia berkisar 6%, atau Filipina berada pada kisaran 6,3%. Proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2022 hanya lebih baik dari Thailand yang diperkirakan berkisar 4,5%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang mulai terkendali. Selama beberapa bulan terakhir, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai. Kini, pada akhir November 2021, jumlah kasus positif Covid-19 berada di bawah 500 kasus setiap hari. Masyarakat pun sudah percaya diri untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga mendorong kembali geliat ekonomi nasional.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% tahun 2022 harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti dukungan program vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Kuncinya adalah pemulihan kesehatan yang akan

berimbas pada pemulihan dan kebangkitan ekonomi. Program vaksinasi yang meluas akan menciptakan *herd immunity* sehingga mobilitas masyarakat kembali pulih untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Sayangnya, tantangan ekonomi ke depan adalah kita tidak bisa memprediksi bagaimana pandemi Covid-19 tahun depan. Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir dan masih menjadi ancaman. Apalagi WHO mengumumkan temuan adanya varian baru Covid-19 yang muncul di Afrika Selatan yang diberi nama Omicron. Kasus Covid-19 di Afrika Selatan melonjak bersamaan dengan ditemukannya varian Omicron. Varian baru Covid-19 ini dideteksi sudah menjangar ke beberapa negara, bahkan ke negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebenarnya masih dibayangi varian baru Covid-19 yang perlu diwaspadai. Kita mengkhawatirkan terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia karena varian baru ini. Untuk mengantisipasi varian baru ini, pemerintah Indonesia—seperti juga beberapa negara lainnya—memang harus menutup akses masuk dari luar negeri, khususnya dari Afrika Selatan dan negara-negara yang dideteksi sudah terdapat varian Omicron ini. Sebab, setiap ada varian baru selalu akan meningkatkan risiko kenaikan jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Masyarakat pun harus selalu ingat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, melakukan suntik vaksin bagi mereka yang belum divaksin, dan mengikuti gaya hidup sehat. Bila pandemi terkendali dan masyarakat yang sehat secara otomatis perekonomian rakyat pun akan menggeliat. □



#### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

#### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Budi Muliawan

#### **KOORDINATOR REPORTASE**

Ario Setiawan

#### **REDAKTUR FOTO**

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

#### **REPORTER**

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Try Syilvani, Ikhwani Bimo F,

Amelia Rubinta

#### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

#### **PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayat

#### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

#### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

#### **TIM AHLI**

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

#### **ALAMAT REDAKSI**

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id





**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO



## Cegah *Money Laundering* pada Jasa Layanan Pinjol

INSTITUSI penegak hukum harus mampu mencegah praktik pencucian uang dalam penyelenggaraan jasa layanan pinjaman online (Pinjol) yang mulai marak di dalam negeri. Tidak boleh ada lagi ruang gerak bagi Pinjol ilegal. Sumber dana penyelenggara Pinjol legal pun harus dipastikan bersih dari kemungkinan tindak pidana.

Selasa (9/11), Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara Tiongkok berinsial WJS di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). WJS terindikasi sebagai bos besar yang menyelenggarakan jasa layanan Pinjol ilegal. Di Wonogiri, Jawa Tengah, manajemen Pinjol ilegal yang dikendalikan WJS meneror nasabah ketika menagih pinjaman. Tak tahan dengan teror yang tak berkesudahan itu, seorang ibu rumah tangga yang menjadi nasabah Pinjol ilegal kelompok WJS memilih mengakhiri hidupnya.

Memang, tak terbantahkan bahwa masyarakat butuh model layanan Pinjol yang prosesnya sederhana dan cepat. Namun, kebutuhan masyarakat akan layanan Pinjol harus tetap dilindungi oleh negara. Jangan sampai pasar yang terbentuk dari kebutuhan layanan Pinjol itu disusupi oleh pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crima*) yang mempraktikkan perilaku brutal ala mafia.

Ketika manajemen penyelenggara Pinjol berperilaku brutal dengan meneror nasabah saat menagih, latarbelakang mereka patut diselidiki, termasuk sumber atau asal muasal dana yang mereka tawarkan kepada calon nasabahnya. Dan, mengacu pada peristiwa tragis yang menimpa ibu rumah tangga di Wonogiri itu, sensitivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan semua institusi penegak hukum harus ditingkatkan.

OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berupaya memperketat aturan guna mencegah fraud di lingkungan perbankan. Kejahatan yang dilakukan orang dalam (*fraud*) mendapat porsi perhatian yang cukup dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum. *Fraud*, menurut OJK, adalah penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan

secara sengaja untuk mengelabui, menipu, dan memanipulasi pihak bank, nasabah, atau pun pihak lain.

Langkah pencegahan dan deteksi dini *fraud* yang merugikan keuangan negara dan masyarakat perlu menjadi perhatian ekstra. Dibutuhkan penguatan pada aspek pencegahan, serta aspek kepastian bagi perlindungan nasabah. Dalam konteks ini, kerja sama OJK dengan semua institusi penegak menjadi sangat penting dan urgen.

Nasabah harus terlindungi dari kejahatan *fraud*, dan bank serta penyelenggara Pinjol tidak dijadikan tempat pencucian uang. OJK dan penegak hukum harus peduli pada sumber dana penyelenggara Pinjol. Kejelasan sumber dana Pinjol sangat penting untuk memastikan dana-dana itu bukan berasal dari tindak pidana. Kebutuhan dan pasar layanan Pinjol di dalam negeri tidak boleh dijadikan atau dimanfaatkan sebagai ladang pencucian uang.

Pinjol atau *Fintech peer to peer (P2P) lending* bukan ancaman bagi industri perbankan. Sebaliknya, kehadiran Pinjol relevan untuk mengisi ceruk yang tidak terlayani bank, yakni layanan kredit mikro. Dengan keunggulan penyelenggara P2P *lending* di bidang teknologi dan penetrasi pasar yang berani, perbankan dan Pinjol idealnya bisa bersinergi. Dari sinergi itu, keuntungan tidak saja dinikmati kedua belah pihak, melainkan kelompok nasabah yang butuh kredit mikro juga diuntungkan.

Bank memiliki modal besar dengan tata kelola risiko yang lebih baik. Maka, untuk memenuhi dan memperkuat permodalan, penyelenggara Pinjol bisa menjalin kerja sama dengan bank. Bisa dengan pendekatan akuisisi atau suntikan modal.

Namun, ketika sinergi bank-Pinjol tidak terwujud, muncul pertanyaan dari mana Pinjol mendapatkan modal? Pertanyaan ini, atau lebih tepatnya kecurigaan tersebut, lambat laun mulai terbuka ketika polisi menindak sejumlah Pinjol ilegal dan menangkap sejumlah orang asing sebagai pemilik modal. OJK mencium adanya motif lain di luar meraup keuntungan dari praktik ilegal P2P *lending*. Motif lain



**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
Ketua MPR RI



itu mengarah pada kemungkinan pencucian uang dari luar negeri.

Dalam perang melawan Pinjol ilegal, pemerintah dan OJK menerapkan pasal berlapis, perdata maupun pidana. Para pelaku Pinjol ilegal dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

Dari aspek perdata, Pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian sesuai Pasal 13 KUP (Kitab Undang-Undang) Perdata. KUP Perdata menegaskan, pinjaman uang dilakukan dengan syarat adanya perjanjian para pihak, dalam hal ini Pinjol sebagai pihak pertama dan peminjam (debitur) sebagai pihak kedua. Ketika penyelenggara Pinjol ilegal tidak terdaftar dalam administrasi pemerintah maupun OJK, ketentuan para pihak dalam hukum perdata otomatis tidak sah.

Aspek perdata lain yang dilanggar Pinjol ilegal adalah objek hukum. Sama halnya dengan perjanjian para pihak, status ilegal juga membuat Pinjol ilegal tidak diakui sebagai objek hukum perdata. Status tidak resmi ini membuat perjanjian utang antara nasabah dan Pinjol ilegal tidak sah di mata hukum. Dan, ketika melakukan pemerasan serta meneror, Pinjol ilegal melanggar Pasal 368 KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pada Pasal 335.

Kebijakan OJK memperketat aturan bagi Pinjol patut diapresiasi. Pengetatan sangat diperlukan, karena Pinjol berpotensi jadi tempat pencucian uang dan pendanaan tindak kejahatan terorisme. Pengetatan itu tampak pada Surat Edaran OJK No.6/

SEOJK/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggaraan P2P lending yang mulai berlaku 29 Januari 2021.

Selain mewaspadaai upaya pencucian uang melalui Pinjol ilegal, ada juga kejahatan di dalam manajemen perbankan yang patut menjadi keprihatinan semua pihak. Sejumlah kasus yang mengemuka akhir-akhir ini menjadi bukti bank pun rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik dilakukan orang dalam (fraud) maupun pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat menyembunyikan uang hasil kejahatan.

OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berupaya memperketat aturan guna mencegah fraud di lingkungan perbankan. Kejahatan yang dilakukan orang dalam (fraud) mendapat porsi perhatian yang cukup dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum. Fraud, menurut OJK, adalah penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui, menipu, dan memanipulasi pihak bank, nasabah, atau pun pihak lain.

Langkah pencegahan dan deteksi dini fraud yang merugikan keuangan negara dan masyarakat perlu menjadi perhatian ekstra. Dibutuhkan penguatan pada aspek pencegahan, serta aspek kepastian bagi perlindungan nasabah. Dalam konteks ini, kerja sama OJK dengan semua institusi penegak menjadi sangat penting dan urgen.

Nasabah harus terlindungi dari kejahatan fraud, dan bank serta penyelenggara Pinjol tidak dijadikan tempat pencucian uang. □



## Ekonomi Indonesia 2022

# Optimistis **Meski Masih** Dibayangi Pandemi Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bukan hanya lembaga dalam negeri, lembaga dari luar negeri pun optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada tahun 2022, yaitu di kisaran 5%. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya masih dibayangi varian baru Covid-19.

**T**ANDA-TANDA pemulihan ekonomi sudah terlihat di depan mata. Sejak kasus Covid-19 di Indonesia melandai, masyarakat mulai berani melakukan berbagai aktivitas, termasuk ekonomi. Roda ekonomi pun mulai menggeliat. Mobilitas masyarakat, terutama di perkotaan, mulai meningkat. Jalan-jalan mulai terlihat macet kembali sebagai pertanda masyarakat banyak mulai menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pun bergulir.

Memang, kasus positif Covid-19 di Indonesia memperlihatkan penurunan sejak Agustus 2021. Padahal, pada Juli 2021, kasus positif Covid-19 mencapai puncaknya. Saat itu, pertengahan Juli 2020, kasus positif Covid-19 mencatat rekor lebih dari 50 ribu kasus per hari. Tapi, beberapa bulan terakhir jumlah kasus positif Covid-19 sudah turun. Bahkan pada akhir November 2021, jumlah kasus positif Covid-19 sudah berada di bawah 500 kasus. Masyarakat semakin percaya diri untuk melakukan berbagai aktivitas.

Ekonomi Indonesia berangsur pulih ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021. Pada kuartal II tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% year on year. Artinya, pertumbuhan ini bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

kuartal II tahun 2020 yang minus 5,32% (saat Indonesia mulai terkena dampak pandemi Covid-19). Pada saat itu Indonesia baru saja mengumumkan kasus pertama Covid-19, dan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang membatasi interaksi sosial seperti *stay at home* sehingga kegiatan ekonomi benar-benar lumpuh.

Kuartal II – 2020 menjadi awal ekonomi Indonesia memasuki tren positif. Sebelumnya pada kuartal I – 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74%. Pada kuartal III – 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di zona positif, yaitu 3,51%. Tren ini akan terus berlanjut memasuki tahun 2022. Bagaimana prediksi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022?

Bukan hanya lembaga dalam negeri, lembaga dari luar negeri pun optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada tahun 2022. Sebut saja, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7 – 5,5%. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan 3,2 – 4,0%. Pertumbuhan ekonomi itu didorong adanya perbaikan ekonomi global. Hal ini





**Perry Warjiyo**

berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tetap kuat. Selain itu, permintaan domestik juga naik karena adanya kenaikan konsumsi dan investasi.

“Semua itu didukung program vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan adanya

stimulus kebijakan,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2021 yang digelar secara hibrida (daring dan luring), pada 24 November 2021. Perry Warjiyo meyakini perbaikan ekonomi Indonesia pada 2021 menjadi modal pemulihan ekonomi yang lebih baik pada 2022.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2% - 5,8%. Selain prediksi ekonomi Indonesia 2022, Menkeu Sri Mulyani juga memaparkan usulan inflasi sebesar 2,0% - 4%, nilai tukar berada di posisi Rp 13.900 - Rp 15.000 per dolar AS, kemudian pendapatan negara dinilai akan semakin kuat ke kisaran 10,18% - 10,44% dari PDB.

Agak lebih rendah dibanding BI, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi



**Sri Mulyani**

Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,3%. Pertumbuhan ekonomi ini tak terlepas dari pandemi Covid-19 yang mulai terkendali sehingga mendorong kembali geliat ekonomi nasional. Selain itu, dari sisi perekonomian global, diprediksi akan terjadi *commodity*





Fadel Muhammad

*supercycle* atau periode kenaikan harga komoditas dalam waktu yang panjang.

"Indef mengkalkulasi dan memproyeksi, khususnya di kondisi pandemi, tahun depan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,3%," kata Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, dalam webinar Indef, Rabu, 24 November 2021.

Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 bisa tumbuh di kisaran 5,1% - 5,4%. Perkiraan ini lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi dari lembaga tersebut pada tahun 2021 sebesar 3,7 - 3,9%.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh pada tahun 2022. Indikatornya adalah terjadinya pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun 2021 yang mencatat pertumbuhan positif di beberapa sektor andalan. "Pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Tapi, ekonomi bisa terakselerasi seandainya kita berhasil menjadikan pandemi berubah endemi. Jadi, tetap, kuncinya adalah pemulihan kesehatan yang akan berimbas pada pemulihan dan kebangkitan ekonomi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, di Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan eko-

nomi Indonesia bisa tumbuh menjadi 3,2% pada tahun 2021. Ekonomi Indonesia pun diprediksi naik menjadi 5,9% pada tahun 2022.

Dibandingkan dengan lima negara Asia Tenggara, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia paling rendah kedua setelah Thailand. IMF memperkirakan Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Pada 2021, ekonomi Vietnam diperkirakan tumbuh 3,8%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 6,6% pada 2022. Filipina berada di posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2% pada 2021 dan 6,3% pada 2022. Ekonomi Malaysia diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% pada 2021 dan 6% pada 2022. Posisi terakhir ditempati Thailand dengan pertumbuhan



Arsjad Rasjid

ekonomi sebesar 1% pada 2021 dan hanya meningkat menjadi 4,5% pada 2022.

### Dibayangi Varian Baru Covid-19

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya masih dibayangi varian baru Covid-19. WHO belum lama ini mengumumkan temuan adanya mutasi virus Covid-19 di wilayah Afrika Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasi varian B11529 yang muncul di Afrika Selatan sebagai SARS-Cov-2, varian yang perlu diwaspadai. Kasus Covid-19 di Afrika Selatan melonjak drastis bersamaan dengan temuan varian yang diberi nama Omicron. Menurut WHO, tes PCR saat ini masih dapat mendeteksi varian tersebut.

Varian baru Covid-19 membuat pemerintah harus melakukan pengetatan mobilitas. Untuk mengantisipasi varian baru Covid-19 ini, pemerintah memang seharusnya mengambil langkah menutup akses masuk dari luar negeri, khususnya Afrika Selatan. Beberapa negara sudah melakukan larangan masuk bagi pendatang dari Afsel. Sebab, setiap ada varian baru tentu akan meningkatkan risiko kenaikan kasus harian Covid-19 di Indonesia.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada tahun 2022. "Jika situasi tetap terkendali seperti sekarang maka ekonomi Indonesia diharapkan bisa pulih. Jika pandemi Covid-19 tetap melandai dan terus turun, saya optimistis perekonomian Indonesia akan bangkit seperti sediakala," katanya kepada *Majelis*.

Fadel menjelaskan, hampir dua bulan terakhir ini kasus terinfeksi dan penyebaran virus melandai di semua daerah. Hal itu menyebabkan kebijakan PPKM diperlonggar sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. "Tapi masyarakat masih harus ingat dan disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, melakukan suntik vaksin bagi yang belum divaksin dan menerapkan gaya hidup sehat. Perekonomian rakyat secara otomatis akan menggeliat," kata Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Meski demikian, Fadel menyebutkan,



kendala yang dihadapi adalah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir dan masih menjadi ancaman. Kendala berikutnya adalah banyak usaha bangkrut selama pandemi Covid-19 dan pelaku usaha belum berminat lagi untuk membuka usahanya. “Menghadapi situasi itu ada dua skenario. Pertama, ekonomi tetap berjalan sambil menunggu pandemi usai. Kedua, masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19. Kegiatan ekonomi menyesuaikan dengan situasi pandemi,” kata mantan Ketua Komisi XI DPR ini.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof Hendrawan Supratikno, juga menyebutkan ekonomi Indonesia pada 2022 akan lebih baik dibanding 2021. Namun, ada faktor yang belum pasti, yaitu kondisi pandemi Covid-19. “Pada akhir 2021, sesuai Putusan MK, Presiden harus mengumumkan status pandemi, apakah tetap sebagai bencana nasional atau sudah masuk ke tahapan endemi,” katanya kepada *Majelis*.

Jika diasumsikan pandemi terkendali dan kegiatan kembali normal, kata Hendrawan, maka ekonomi diperkirakan bisa tumbuh antara 5% - 5,5%. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah konsumsi, ekspor, dan investasi. Hendrawan mencontohkan harga-harga ekspor komoditas tahun ini naik 65% dan tahun depan diperkirakan masih naik lagi sekitar 10%. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga cukup signifikan. Harga batu bara saat ini sekitar US\$ 300/ton merupakan tertinggi sepanjang sejarah.

Namun, Hendrawan mencatat kendala yang masih dihadapi dalam mengerek pertumbuhan ekonomi adalah kualitas layanan birokrasi yang belum berstandar dunia, masih rumit, dan berbelit-belit. “Dalam investasi listrik, ada yang sudah mengajukan izin dua tahun lalu, tapi masih terkatung-katung,” katanya memberi contoh.

Selain itu, lanjut Hendrawan, juga ada masalah dalam kucuran kredit perbankan. Soalnya, perbankan lebih suka membeli SBN karena lebih aman dibanding menggelontorkan kredit ke sektor riil. “Sekarang ada ketakutan,



**Hendrawan Supratikno**

sektor riil akan banyak yang tumbang bila relaksasi yang dilakukan pemerintah, BI, OJK berakhir,” katanya.

Sedangkan persoalan defisit APBN, Hendrawan mengatakan, secara bertahap defisit APBN akan diupayakan kembali normal. Usaha untuk menormalkan defisit APBN sudah dilakukan mulai APBN 2021. Hendrawan mengakui, upaya mengurangi defisit APBN memang cukup berat. Dalam kondisi pandemi Covid-19, manajemen APBN memang terasa lebih sulit.

“Kita lihat nanti pernyataan presiden (apakah pandemi ini menjadi endemi). Bila status pandemi belum berubah, maka defisit APBN bisa lebih besar dari 3% terhadap PDB akan tetap terjadi. Kita masih tetap menutup



**M. Sarmuji**

kebutuhan anggaran dengan utang. Manajemen APBN akan lebih sulit. Mudah-mudahan kita bisa memitigasi risiko fiskal yang potensial muncul,” harapnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada tahun 2020. Pasalnya, menurut Sarmuji, fundamental ekonomi Indonesia cukup baik, seperti ekspor yang meningkat cukup tinggi karena didorong oleh harga komoditas yang beranjak naik. Demikian juga ekonomi global memperlihatkan perbaikan. Ekonomi global bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih tinggi. “Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% Insya Allah bisa tercapai,” ujarnya kepada *Majelis*.

Namun, Sarmuji menambahkan, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% itu dengan kondisi dan syarat program vaksinasi yang dilakukan pemerintah telah meluas sehingga bisa menciptakan herd immunity. Selain itu, mobilitas masyarakat sudah pulih sehingga bisa melakukan kegiatan ekonomi. Apalagi tahun depan diharapkan semakin banyak sektor usaha yang buka.

“Cuma tantangannya adalah kita tidak bisa memprediksi bagaimana pandemi Covid-19 tahun depan, karena ditemukannya varian baru virus Corona yang bernama Omicron,” ujar anggota Komisi X DPR yang membidangi masalah keuangan ini.

Tantangan lainnya, lanjut Sarmuji, adalah defisit APBN yang sudah mencapai sekitar Rp 800 triliun. Pemerintah harus bisa mengupayakan defisit APBN kembali ke 3% pada tahun 2023. Sarmuji optimistis defisit APBN akan berkurang karena pemerintah bisa memperoleh penerimaan negara yang cukup besar dari kenaikan harga komoditas. Penerimaan ekspor komoditas ini bisa dipakai untuk menambal defisit APBN.

Selain itu, kata Sarmuji, penerimaan negara pada tahun depan juga bisa bertambah karena pada tahun 2022 pemerintah memberlakukan aturan PPN yang baru, kenaikan PPN menjadi 11%. Pajak ini berpotensi menambah penerimaan negara yang bisa menjadi kompensasi penurunan defisit. □

**DER/BSC**

# Dari Zona Negatif ke Pertumbuhan Positif

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 berada di zona negatif. Seiring pandemi Covid-19 yang melanda, pertengahan 2021 perekonomian Indonesia mulai bangkit.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**ERTUMBUHAN ekonomi suatu negara bisa dilihat dari kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian, seperti dalam wujud kenaikan pendapatan nasional, *gross national product* (GNP), atau produk domestik bruto (PDB). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi itu ditunjukkan melalui kenaikan PDB. Bila pertumbuhan ekonomi baik maka dapat dikatakan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo?

Setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode (2004 – 2009 dan 2009 – 2014) selesai, Joko Widodo yang sebelumnya Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden untuk periode 2014 – 2019. Pada Pemilu Presiden tahun 2019, Joko Widodo terpilih kembali menjadi presiden berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk periode 2019 – 2024. Kini, masa pemerintahan Joko Widodo sudah berjalan dua tahun.

Masa pemerintahan SBY melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi sebelumnya. SBY

cukup baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5 hingga 6%.

Pencapaian terendah terjadi pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,63%. Kondisi pada 2009 tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah. Tetapi seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global sepanjang 2008 – 2009, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5% - 6% pada 2010 dan meningkat menjadi 6% - 6,5% pada 2011.

Salah satu sebab utama ekonomi Indonesia sukses pada masa pemerintahan SBY adalah adanya kebijakan pemerintah yang efektif dan fokus pada disiplin fiskal dan pengurangan utang negara. Namun, pertumbuhan makro ekonomi Indonesia yang pesat pada masa itu belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ketika kampanye pemilihan presiden 2014, Joko Widodo menjanjikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7%. Pada 15 Juni 2014,

calon presiden itu menebar janji bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 7% asal pembangunan ekonomi memperhatikan tiga hal, yaitu iklim investasi, regulasi, dan peningkatan ekspor berbasis industri.

"Ke depan, saya meyakini bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7%, dengan catatan iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan untuk investor lokal bergerak menciptakan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi saat itu, seperti dikutip *Kompas.com*.

Jokowi lantas mengungkapkan cara untuk meraih pertumbuhan 7% itu. Caranya adalah memangkas birokrasi perizinan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. "Investor diberikan kesempatan membuka lapangan pekerjaan dan investasi di daerah-daerah. Saya yakin 7% bukan sesuatu yang sulit," ujarnya.

Menarik investor itu, lanjut Jokowi, harus dibarengi dengan membangun industri berbasis ekspor. Bukan cuma perusahaan besar tetapi juga industri kecil. "Industri kecil di desa-desa diberikan insentif agar bisa berkompetisi di tingkat dunia dengan memberikan ruang untuk memasarkan produknya," umbar Jokowi.

Janji manis itu bukan hanya diucapkan di bibir. Janji kampanye itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019. Tapi sepanjang periode pertama pemerintahannya (2014 – 2019), Jokowi tidak pernah merealisasikan pertumbuhan ekonomi 7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi boro-boro mendekati 7%, melampaui 6% saja tidak pernah.

Inilah catatan "prestasi" pertumbuhan ekonomi selama periode pertama kepemimpinan Jokowi (2014 – 2019). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 tercatat 4,88%. Lalu pada tahun 2016, pertumbuhan



ekonomi Indonesia naik sedikit menjadi 5,03%. Pada tahun berikutnya (2017), sedikit naik lagi sebesar 5,07%. Lumayan, pada tahun 2018 kembali naik menjadi sebesar 5,17%. Namun, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sedikit menjadi sebesar 5,02%. Jadi, selama lima tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkatut di angka 5% saja.

Pada tahun 2019, Jokowi pernah ditagih soal janji pertumbuhan ekonomi 7% itu. Dia berucap, "Ini bukan janji lho ya, ini target. Menurut saya kita harus mempunyai target pertumbuhan ekonomi 6-7%," kilahnya. Dia mengakui ekonomi Indonesia dipengaruhi pertumbuhan ekonomi global yang terus turun. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu direvisi.

dan wakil presiden untuk masa jabatan 2019 – 2024. Tiga hari setelah dilantik, Jokowi mengumumkan susunan kabinet. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini memberi sedikit optimisme.

### Dihajar Pandemi

Di awal tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi. Sejak itu terjadi perubahan drastis dalam setiap aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kehidupan manusia, tak terkecuali ekonomi. Perekonomian dunia langsung anjlok akibat pandemi ini.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19

nesia masih terkena dampak pandemi Covid-19. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 minus 3,49%. Secara teoritis jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal II dan kuartal III minus maka Indonesia bisa dibilang memasuki masa resesi. Indonesia mengalami resesi karena pertumbuhan ekonominya minus dua kali berturut-turut.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 minus 2,07%. Memang, sepanjang tahun 2020, perekonomian Indonesia berada di zona negatif. Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan ekonomi terburuk sejak krisis 1998. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh minus 13,16%. Tetapi, Indonesia tidak sendiri. Beberapa negara lain juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus sepanjang 2020. Sebut saja, Amerika Serikat minus



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Toh, Jokowi tetap maju menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Jokowi berpasangan dengan K.H. Ma'ruf Amin berhadapan dengan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam kampanye Pilpres 2019, Jokowi tidak lagi mengumbar janji pertumbuhan ekonomi 7%. Tetapi dia kembali menjanjikan akan menurunkan kemiskinan, menyediakan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, dan lainnya.

Dalam Pilpres 2019, Jokowi – K.H. Ma'ruf berhasil menang dengan meraih 55,5% suara mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang meraih 44,5% suara. Pada 20 Oktober 2019, Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden

mendorong pemerintah untuk membatasi banyak kegiatan mulai dari pendidikan, industri, transportasi, hingga pariwisata. Kebijakan pembatasan ini (*lockdown*) berdampak signifikan terhadap perekonomian. Apalagi pandemi ini berdampak besar terhadap permintaan dan penawaran serta jasa di seluruh dunia.

Di Indonesia, kasus positif pertama Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020. Seperti di negara-negara lain, pandemi Covid-19 langsung memukul perekonomian Indonesia karena terganggunya sektor produksi, distribusi, dan konsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 adalah minus 5,32%. Pada kuartal III, ekonomi Indo-

nesia minus 2,5%, Singapura minus 3,8%, Korea Selatan minus 1,4%, Hong Kong minus 3%, dan Uni Eropa minus 4,8%.

Pada kuartal I – 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 0,74%. Tetapi pada kuartal II – 2021, Indonesia berhasil keluar dari zona negatif. Pertumbuhan ekonomi kuartal II – 2021 mencatat rekor, yaitu 7,07% (year on year) bila dibandingkan dengan kuartal II – 2020 yang minus 5,32%. Pada kuartal III – 2021, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di zona positif, yaitu 3,51%. Realisasi ini lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II – 2021 yang mencapai 7,07% (year on year). □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI

## Kita Optimistis Ekonomi Bangkit Seperti Sediakala

**S**EJAK Agustus 2021, pemerintah relatif bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus beranjak turun hingga kurang dari 500 kasus positif per hari seperti pada awal Desember ini. Pandemi Covid-19 memukul perekonomian Indonesia selama 1,5 tahun, kini ekonomi nasional berangsur bangkit. Ini sejalan dengan pandemi Covid-19 yang mulai terkendali dan pelanggaran aktivitas masyarakat, terutama dunia usaha akhir-akhir ini.

Meski demikian, ekonomi nasional masih dibayang-bayangi ketidakpastian, baik global maupun domestik. Ketidakpastian itu adalah berbagai tantangan global seperti ancaman Covid-19 dan varian barunya, krisis energi, isu perubahan iklim. Namun, mobilitas masyarakat terus bergerak sehingga mendorong geliat aktivitas ekonomi. Pemerintah pun optimistis ekonomi Indonesia tahun 2022 akan tetap di jalur positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan menyentuh level 5%.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad juga optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada tahun 2022. "Jika situasi tetap terkendali seperti

sekarang maka ekonomi Indonesia diharapkan bisa pulih. Jika pandemi Covid-19 tetap melandai dan terus turun, saya optimistis perekonomian Indonesia akan bangkit seperti sediakala," katanya kepada Majelis.

Berikut perbincangan Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD itu seputar ekonomi Indonesia tahun 2022. Petikannya.

**Melihat kasus Covid-19 di Indonesia yang melandai beberapa bulan terakhir, bagaimana Bapak melihat ekonomi Indonesia pada 2022 (proyeksi ekonomi 2022)? Apakah ada optimisme dalam pertumbuhan ekonomi 2022?**

Memang tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 yang melanda bangsa kita ini sangat merepotkan semua. Dampaknya sangat luas. Bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan nyawa masyarakat. Dampak yang paling fatal dari pandemi ini adalah pergerakan ekonomi. Saat pandemi, kegiatan perekonomian rakyat hampir di seluruh Indonesia menjadi terhenti dan terganggu.

Bahkan, banyak kegiatan ekonomi rakyat bukan hanya UMKM tapi perusahaan me-

nengah sampai besar pun tidak dapat bertahan dengan dampak ikutan pandemi ini. Tidak sedikit usaha yang gulung tikar. Jika keadaan terus begitu maka perekonomian Indonesia akan memasuki masa kelam.

Tapi, saya rasa lambat laun pandemi akan mereda bahkan bisa hilang sama sekali. Tentu ini bisa terjadi bila kita semua serius dalam penanganan pandemi ini. Pertanyaan selanjutnya atau masalah berikutnya adalah apa yang mesti kita lakukan jika pandemi ini berakhir?

Pertama adalah masalah kesehatan dulu. Ini yang mesti kita amati. Apakah penanganan kepada mereka yang terkena pandemi sudah baik, apakah obat-obatan atau vaksin sudah memadai. Kedua, soal perekonomian atau bagaimana membangkitkan kembali ekonomi rakyat begitu pandemi usai.

Untuk itu, menurut saya, mulai dari sekarang bangsa Indonesia perlu melakukan berbagai persiapan yang tepat dan strategis agar perekonomian kembali seperti dulu sebelum ada pandemi.

Pemerintah mesti membantu usaha rakyat yang terkena dampak berat pandemi. Di antaranya dengan membantu dari sisi perpajakan, misal dengan pemotongan pajak atau kebijakan yang intinya meringankan



penderitaan rakyat. Selanjutnya, rakyat mesti diibantu dengan permodalan. Kucurkanlah pinjaman modal lunak kepada mereka sehingga mereka bisa bangkit berdiri menjalankan usahanya lagi.

Yang saya harapkan dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi ini adalah bangsa ini harus kembali kepada 'basic economy' Indonesia, yakni pertanian dan perikanan. Sebab, jika dua hal ini tumbuh maka daya beli masyarakat akan semakin meningkat dan roda perekonomian kembali berjalan.

**Apakah ekonomi Indonesia tahun depan masih dipengaruhi Covid-19? Bagaimana jika terjadi gelombang ketiga Covid-19? Jika Indonesia mengalami gelombang ketiga Covid-19 apakah akan membuat ekonomi Indonesia kembali anjlok?**

**Sesuai dengan asumsi di RAPBN 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 ditargetkan mencapai angka 5%. Apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai? Apa yang menjadi faktor pendorongnya?**

Apapun jika kita mau bekerja keras atas izin Allah SWT kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi itu. Faktor pendorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah semangat dan kerja keras. Semua elemen bangsa mesti menyadari bahwa kita semua hidup di negara Indonesia dan mempunyai keinginan yang sama, yakni sejahtera bersama.

Itulah faktor pendorongnya. Untuk itu kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan lagi ada yang mempermasalahkan perbedaan yang ada, karena hal itu sangat kuat sekali berpengaruh dalam

tahun 2022, ekonomi Indonesia sudah 50% pulih. Jika sampai pertengahan tahun 2022 kasus Covid-19 masih tetap landai dan terus menurun maka saya optimistis perekonomian akan bangkit kembali seperti sediakala.

**Apakah sektor riil sudah mulai bergerak atau menggeliat?**

Saya lihat sektor riil sudah mulai menggeliat bangkit. Ini penting sebab penggerak sektor riil adalah masyarakat kebanyakan dan pengguna atau konsumen, yaitu masyarakat umum. Saya harap sektor riil ini mendapat dukungan pemerintah.

**Apa yang masih menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022?**

Yang masih menjadi kendala adalah pandemi masih belum menunjukkan tanda-tanda usai atau berakhir. Intinya, pandemi



Saya dan kita semua berharap, pandemi sudah cukup saja, tapi kita juga melihat kondisi dunia. Jika saja pandemi masih berkangsur di negara-negara lain maka potensi untuk menyerang Indonesia lagi sangat besar.

Menghadapi hal ini perlu kerja keras kita semua, terutama pemerintah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Jika pandemi usai atau stabil dan melandai, saya harap pemerintah menjaga kondisi seperti ini. Pemerintah juga harus mengikuti perkembangan kondisi global. Jika ada pergerakan virus lagi, pemerintah mesti melakukan tindakan preventif, misalnya dengan melarang kedatangan orang-orang dari negara-negara yang sedang menghadapi lonjakan kasus atau berkembang varian virus baru, seperti Omicron.

membuat bangsa kita terpecah.

**Apakah saat ini sudah terlihat tanda-tanda ekonomi Indonesia mulai pulih setelah hampir dua tahun dilanda pandemi Covid-19?**

Hampir dua bulan terakhir ini kasus terinfeksi dan penyebaran virus melandai di semua daerah secara bertahap. Hal itu menyebabkan kebijakan PPKM diperlonggar sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Tapi masyarakat masih harus ingat dan disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, melakukan suntik vaksin bagi yang belum divaksin, dan menerapkan gaya hidup sehat. Perekonomian rakyat secara otomatis akan menggeliat

Jika situasi seperti ini bisa terus dipertahankan maka diharapkan pada awal tahun 2022 sampai pertengahan semester kedua

masih tetap ada dan masih menjadi ancaman kita semua. Kendala berikutnya adalah masih banyak usaha yang bangkrut. Banyak rakyat yang sudah tidak berminat lagi membuka usahanya.

Ada dua skenario yang mesti dijalankan menghadapi situasi ini. Pertama, pergerakan ekonomi berjalan seraya menunggu pandemi usai. Kedua, bangsa ini hidup beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Untuk itu seluruh pergerakan ekonomi menyesuaikan dengan situasi pandemi.

**Bagaimana dengan defisit APBN yang angkanya terus membengkak?**

Defisit APBN yang angkanya terus naik tentu sangat disayangkan. Untuk itu, pemerintah mesti memerhatikan persoalan ini dengan lebih serius mengupayakan agar defisit APBN berkurang dan kembali stabil. □

**Pekan Kehumasan MPR**

Ma'ruf Cahyono

**Berharap Tak Hanya Memberi Informasi Tapi Juga Edukasi**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selama sepekan berbagai kegiatan di gelar di Lobi Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Semua dilakukan dalam rangka Pekan Kehumasan MPR. Di acara itu, diluncurkan Aplikasi Buku Digital MPR dan novel Meraih Mimpi.

**D**I LOBI Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 10 November 2021, terlihat ratusan hadir ada di sana. Mereka terdiri dari pecinta buku, wartawan, dan masyarakat lainnya mengikuti acara puncak 'Pekan Kehumasan MPR'. Dalam puncak acara, selain pengumuman pemenang Lomba Karya Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik, juga diluncurkan Buku Digital MPR dan novel yang berjudul 'Meraih Mimpi'. Aplikasi Buku Digital MPR RI, selain menyajikan Majalah *Majelis* dalam bentuk *e-paper*, di sana juga ada berbagai macam dokumen dan prosiding MPR yang semuanya bisa diunduh. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi Buku Digital MPR RI di *Play Store*.

Hadir dalam puncak acara Pekan Kehumasan MPR, Sesjen MPR Dr. Ma'ruf Cahyono SH., MH., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah

SE., MM., Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR Heri Herawan SH, dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Budi Muliawan SH., MH.

Pekan Kehumasan MPR sejatinya digelar



Siti Fauziah

tanggal 8 hingga 11 November 2021. Dalam Pekan Kehumasan MPR itu, selain memamerkan foto-foto kegiatan pimpinan dan anggota MPR, juga memamerkan unit Perpustakaan MPR dan PPID.

Dalam sambutan, Siti Fauziah mengatakan, bersyukur Biro Humas dan Sistem Informasi bisa menyelenggarakan kegiatan di tengah masa pandemi. Meski demikian protokol kesehatan dikedepankan dalam kegiatan itu. "Allhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat," tuturnya.

Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu menjelaskan bahwa pada hari ini merupakan puncak acara. "Pada hari kita umumkan pemenang lomba," ujarnya. "Juga launching Buku Digital MPR dan novel Meraih Mimpi," tambahnya.

Biro Humas dan Sistem Informasi, menurut Siti Fauziah, dalam melaksanakan tugas-





tugasnya selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang canggih dan modern telah diadopsi. Semua dilakukan untuk mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi antara MPR dengan masyarakat. Dia menyebutkan, biro ini juga mengelola berbagai media sosial dan web. “Dan hari ini kita luncurkan Buku Digital MPR,” paparnya. “Buku digital ini bisa diunduh di play store,” tambahnya.

Siti Fauziah menyampaikan pesan bahwa saat ini MPR mempunyai tagline baru. Tagline itu adalah ‘Menyapa Sahabat Kebangsaan’. Dengan ungkapan yang demikian maka MPR menjadikan seluruh insan menjadi sahabat kebangsaan. Sebagai sahabat kebangsaan tentu apa yang disampaikan dan didiskusikan adalah nilai-nilai yang bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. “Sekarang kita semua adalah sahabat kebangsaan,” ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada dewan juri lomba. Di tangan para pakar di bidangnya itulah karya tulis dan karya foto



yang masuk ke panitia lomba diseleksi mana-mana saja yang layak menjadi pemenang. Dia berharap, lomba yang digelar pertama kalinya di MPR ini di tahun-tahun selanjutnya bisa digelar secara rutin. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pekan Kehumasan sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar

dan sukses,” tuturnya.

Dalam pengumuman pemenang lomba, katagori lomba foto, juara 1 Hendra Eka dari *Jawa Pos*, juara 2 Rizki Syahputra dari *Rakyat Merdeka*, dan juara 3 Yulianto dari *Sindonews*. Untuk lomba karya tulis, juara 1 Prasetyo dari *Realitarakyat.com*, juara 2 John Andi Oktaveri dari *Bisnis Indonesia*,





dan juara 3 Sugandi dari *Realitarakyat.com*.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Cahyono mengatakan, Pekan Kehumasan MPR merupakan satu momentum yang memiliki arti tersendiri. Lebih lanjut, Ma'ruf Cahyono mengatakan, Pekan Kehumasan merupakan ruang untuk menstimulasi dan melihat kembali tugas-tugas kehumasan. "Dalam bidang kehumasan banyak *stake holder* yang terlibat," ujarnya. Salah satu di antaranya adalah jurnalistik atau wartawan. Untuk itulah kegiatan ini diakui dekat dengan bidang jurnalistik.

Bicara tentang kehumasan, menurut Ma'ruf Cahyono, secara langsung atau tidak langsung, akan terkait dengan penyebaran informasi. Dia berharap, kehumasan dalam menyebarkan informasi tak hanya tentang kabar dan berita, namun juga mampu mengedukasi. "Pekan Kehumasan diharap tak hanya memberi informasi, namun juga mampu memberi edukasi," ujarnya.

Untuk itulah lomba-lomba yang ada

menyisipkan pesan dan ajakan untuk meningkatkan literasi. "Harapan saya literasi menjadi stimulan dan edukasi bagi dunia kehumasan," paparnya. Semua itu penting dilakukan agar kelak bermuara membangun kepercayaan kepada masyarakat. "Ini orientasi paling penting," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Cahyono mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah datang ke acara Pekan Kehumasan. Kedatangan masyarakat di rumah wakil rakyat diharap dimaksimalkan. Dengan kehadiran mereka ke kompleks parlemen ini diharap memberi kesadaran baru bahwa kerja MPR tidak hanya pada masalah ketatanegaraan, namun juga pada masalah yang lain. "Datang ke gedung ini merupakan tempat pembelajaran tentang MPR," ujarnya.

Dia menyebutkan, salah satu tugas MPR adalah merawat nilai-nilai kebangsaan lewat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ma'ruf

Cahyono mengajak kepada semua untuk menjaga pondasi bangsa Indonesia agar tetap kokoh berdiri. "Pondasi bangsa kita adalah Pancasila," tuturnya. Nilai-nilai tersebut perlu diinternalisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, dengan berbagai cara," tegasnya.

Ma'ruf Cahyono saat meluncurkan aplikasi Buku Digital MPR sangat mendukung gagasan dan inovasi serta terobosan yang dilakukan oleh Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR sebagai upaya untuk merespon kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan sistem kegiatan pemerintahan yang berbasis elektronik. "Saya apresiasi," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu.

Setjen MPR, kata Ma'ruf, akan terus melakukan langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu terobosan yang dilakukan sangat strategis dalam upaya mendukung upaya Setjen yang terus melakukan digitalisasi dan merespon kemajuan teknologi informasi dan industry 4.0.

Dia berharap, penyebaran informasi terkait MPR dan Setjen dapat semakin mudah diakses dan pada gilirannya akan tercipta akuntabilitas dari MPR dan Setjen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. "Saya dukung terobosan ini melalui peningkatan penyebaran informasi melalui aplikasi Buku Digital MPR RI," tuturnya.

Ma'ruf Cahyono berharap, sistem aplikasi yang dibangun perlu diperluas dalam upaya merespon sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Langkah ini perlu terus dikembangkan sehingga dapat memberi manfaat bagi MPR dan Setjen serta masyarakat. □



Ma'ruf Cahyono

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AWG



## Peluncuran Buku Digital MPR dan Novel Meraih Mimpi

**P**EKAN Kehumasan yang digelar oleh Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, 8 hingga 11 November 2021, di Lobi Gedung Nusantara IV dan V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, disambut antusias oleh masyarakat. Setiap hari, puluhan pengunjung datang menyaksikan pameran foto dan perpustakaan tersebut.

Berbagai foto yang menceritakan berbagai aktivitas pimpinan dan anggota MPR dipajangkan di arena pameran tersebut, seperti aktivitas sidang-sidang, Sosialisasi Empat Pilar MPR, serta kegiatan saat menyerap aspirasi dan bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di arena Pekan Kehumasan itu juga terdapat stan Perpustakaan MPR. Di stan ini pengunjung bisa mendapatkan informasi tentang

Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu menyambut baik antusiasme dan semangat para peserta lomba foto dan karya jurnalistik. Sebagai wujud menghargai semangat mereka, hadiah yang diberikan kepada pemenang sangat besar. Pemenang Lomba Karya Jurnalistik, juara 1 uang Rp10.000.000,00 plus tropi dan sertifikat. Juara 2, uang Rp 7.500.000,00 plus tropi dan sertifikat, juara 3 Rp 5.000.000,00., plus tropi dan sertifikat. "Ada juga juara Harapan 1-7 masing-masing pemenang mendapat uang Rp 1.000.000, 00., plus tropi dan sertifikat. "Hal demikian juga untuk pemenang lomba foto", ujarnya.

Para pemenang lomba karya dan foto jurnalistik, menurut Siti Fauziah, diumumkan saat acara puncak Pekan Kehumasan, pada 10 November 2021.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

koleksi-koleksi yang dimiliki Perpustakaan MPR. Kepada para pengunjung stan juga diberi brosur tentang Perpustakaan MPR.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Siti Fauziah SE., MM., menyatakan, di acara ini diperlihatkan berbagai aktivitas di antaranya tugas-tugas yang diemban Biro Kehumasan dan Sistem Informasi.

Sebelum pameran dimulai, Siti Fauziah mengatakan, biro yang dipimpinnya menggelar Lomba Foto Jurnalistik dan Lomba Karya Jurnalistik beberapa pilihan tema, yaitu: 'Semangat Bergotong Royong untuk Indonesia Bebas Pandemi Covid-19', 'Peran Pemuda dalam Merajut dan Merekatkan Keragaman Nasional', dan 'Memaknai Nilai-Nilai Kepahlawanan Saat Ini'. Peserta bebas memilih tema-tema tersebut, dan tema yang sama juga berlaku untuk Lomba Foto Jurnalistik.

Selama satu bulan, dari 1 hingga 31 Oktober, menurut Siti Fauziah, panitia telah menerima banyak karya foto dan karya tulis. "Wah, karya tulis dan foto yang dikirim semuanya bagus", tuturnya. Hal demikianlah yang membuat panitia harus bekerja keras untuk menilai mana-mana saja yang layak menjadi pemenang.

Dalam puncak acara, Siti Fauziah mengatakan, tidak hanya pengumuman para pemenang lomba karya dan foto jurnalistik, namun juga digelar acara lain seperti peluncuran 'Buku Digital MPR' dan 'Novel Meraih Mimpi'. 'Buku Digital MPR' selanjutnya bisa diunduh atau diinstal di 'Google' atau 'Play Store'. Di Buku Digital MPR bisa dilihat Majalah *Majelis* dalam bentuk e-paper, juga dokumen dan proiding MPR lainnya.

Dalam kesempatan itu, kata Siti Fauziah, juga diluncurkan dan dibedah novel berjudul 'Meraih Mimpi'. Sebuah novel bersandar pada implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR. Buku ini bedah oleh anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA., dan pegiat literasi Ade E. Sumengkar, S.Pd., MM., AAIIJ.

Rangkaian acara Pekan Humas MPR ini, menurut Siti Fauziah, dibuat semeriah dan semenarik mungkin tidak hanya mengundang masyarakat untuk datang, tetapi juga dimeriahkan dengan memasang twibbonize <https://twb.nz/kehumasan21>. □

AWG

Pelantikan Anggota PAW MPR

# Upaya Penanaman Pancasila Tidak Boleh Berhenti

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, metoda sosialisasi Empat Pilar MPR ke depan harus mampu membangun karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar pada nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yang bersifat khas, unik, modern, dan unggul.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo mengatakan, setelah lebih dari 7 dekade Pancasila ditasbihkan sebagai dasar dan ideologi negara masih terdapat jurang yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Karenanya, sosialisasi empat konsepsi dasar yang dikenal dengan sosialisasi Empat Pilar MPR harus mampu mengajak seluruh elemen bangsa, terutama penyelenggara negara untuk menyinkronkan idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

“Kita harus mampu mewujudkan Pancasila menjadi ‘ideologi kerja’ dalam seluruh ranah peradaban,” kata Bambang Soesatyo ketika melantik dengan mengambil sumpah lima orang anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) MPR di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pelantikan anggota PAW ini juga dihadiri Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Kelima anggota PAW MPR yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol, (dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Barat II), Paulus Ubrunge (Fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Papua), Hj. Aida Muslimah, SE (Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II), Ir.

Harris Turino, M.Si., M.M., (Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX), dan Novri Ompusungu, S.H., (Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II).

Bamsuet mengakui, upaya menyinkronkan Pancasila dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan memang tidak mudah dan tidak boleh berhenti berusaha. “Pancasila adalah soal perjuangan. Pancasila tidak kita warisi dari nenek moyang kita menurut hukum Mendel. Pancasila adalah soal keyakinan dan pendirian asasi. Pancasila tidak akan

tertanam dalam jiwa kita jika kita sendiri masing-masing tidak berjuang,” katanya.

Dia menambahkan, usaha penanaman Pancasila harus berjalan terus-menerus, baik untuk masyarakat dan negara maupun untuk setiap individu. “Tak seorang pun akan menjadi Pancasila-lais kalau dia tidak membuat dirinya Pancasila-lais. Negara kita tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita tidak membuatnya terus-menerus,” ujar Bamsuet.

“Bung Karno pernah berpesan: kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita,







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar,” sambung Bamsuet mengutip kata-kata Bung Karno.

Masih mengutip Bung Karno, Bamsuet mengatakan, hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat yaitu rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, maka dengan rakyat seperti itulah yang dapat bernegara kekal abadi. “Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan nafas dan berani terjun menyelami samudera yang

sedalam-dalamnya,” tuturnya.

Bamsuet menegaskan, setiap anggota MPR wajib untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). “Nilai-nilai itu merupakan buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Para pendiri bangsa menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat atau bangsa lain. Ini merupakan suatu kenyataan

objektif yang merupakan jati diri bangsa Indonesia,” jelasnya.

Menurut Bamsuet, setelah lebih dari 17 tahun, sejak 2004 MPR melaksanakan sosialisasi segala putusan MPR, termasuk Pancasila di dalamnya, sudah saatnya MPR masa jabatan 2019 – 2024 melakukan evaluasi menyeluruh atas metoda sosialisasi empat konsepsi dasar tersebut. “Pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah upaya membumikan Pancasila dan tiga konsepsi dasar lainnya telah berhasil membangun peradaban bangsa yang unggul?” katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang masih banyak anak bangsa yang bermental “inlander” dan bersikap “inferior” ketika berhadapan dengan bangsa lain, dan pernyataan Presiden Soekarno tentang jangan menjadi “bangsa kuli” dan menjadi “kuli bangsa-bangsa lain”, lanjut Bamsuet, harus dijadikan sebagai bagian introspeksi dalam melaksanakan sosialisasi empat konsepsi dasar berbangsa dan bernegara.

“Metoda sosialisasi Empat Pilar MPR ke depan harus mampu membangun karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar pada nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yang bersifat khas, unik, modern, dan unggul. Ini adalah pekerjaan rumah kita semua,” pungkasnya. □



FGD Pendidikan dan Kesehatan

# Negara Harus Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

MPR menggelar FGD terkait pendidikan dan kesehatan. Menurut Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, ini dua hal sangat penting. Negara harus meratakan penyebaran dokter di seluruh Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengakui, masih banyak masalah terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. Masalah tersebut di antaranya tidak meratanya penyebaran dokter yang ada. Dokter di pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak berimbang. “Harus kita akui memang jumlah dokter tidak memadai”, ujarnya.

Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie ini menyampaikan hal itu, saat menjadi keynote speech dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh MPR bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kegiatan yang digelar di Ruang Delegasi, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 17 November 2021, itu membahas masalah mengenai Perubahan UU. No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. FGD itu digelar secara luring dan daring sehingga peserta yang hadir lebih dari 114 peserta.

Untuk menghadapi masalah yang demikian, Rerie mengajak semua pihak, terutama para dokter, untuk melakukan gerakan persiapan dan pembenahan agar jumlah dokter bisa tercukupi. Menurut Rerie, gerakan yang kita lakukan adalah bagaimana dokter yang ada tidak hanya memadai dari segi jumlah, namun kualitas

mereka juga bisa diandalkan.

Politisi Partai Nasdem itu mengakui, pendidikan kedokteran di Indonesia memang rumit. Tidak semua lembaga pendidikan, perguruan tinggi, mampu menyelenggarakan pendidikan kedokteran. Untuk bisa menyelenggarakan pendidikan kedokteran, jelas Rerie, perlu kualifikasi-kualifikasi tertentu.

Masalah pendidikan dan kesehatan, menurut Rerie, merupakan hak asasi manusia. Dua hal ini merupakan tugas negara untuk memenuhinya. “Negara harus

bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan dan kesehatan”, ujarnya. Memenuhi masalah pendidikan dan kesehatan merupakan amanah bangsa, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. “Negara harus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia”, ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lestari Moerdijat memuji bagaimana langkah-langkah pemerintah yang bisa mengendalikan pandemi Covid-19. “Kita apresiasi kerja keras pemerintah yang mampu mengendalikan wabah,







seperti yang kita rasakan saat ini”, pujiannya. Meski demikian, dia menyebut pada masa pandemi bangsa ini banyak kehilangan tenaga kesehatan.

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Rerie mendukung Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok), di mana undang-undang itu nantinya akan merevisi UU. No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.

“Kita harap bagaimana undang-undang ini bisa menjadi solusi”, ujarnya. Soalnya,

kekurangan dokter umum dan dokter spesialis akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. “Ini menjadi tugas kita semua”, paparnya.

Ketua Panja RUU Dikdok Willy Aditya mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi kita untuk melakukan perubahan undang-undang yang ada. Dia menyebutkan, dalam masa pandemi, bangsa ini kehilangan banyak tenaga kesehatan. “Kita jadikan sebagai momentum untuk membangun sumber daya manusia dalam

bidang pendidikan dan kesehatan”, ujar politisi Partai Nasedem itu. Menurut alumni UGM itu, bila kita ingin menciptakan manusia berkualitas maka pendidikan dan kesehatan merupakan tulang punggung untuk bisa menciptakan itu.

Dia mengakui, ketika ada keterbukaan dengan luar, maka bisa saja dokter-dokter dan rumah sakit asing akan masuk ke Indonesia. Agar hal demikian tidak menambah beban bagi dunia kedokteran di Indonesia maka harus undang-undang yang terkait harus dibuat. “RUU Dikdok harus bisa menjawab tantangan itu”, tuturnya.

Menurut Rerie, di luar negeri rumah sakit berlomba-lomba membikin rumah sakit pendidikan. Nah, hal inilah yang perlu menjadi masukan bagi pemerintah. Dia mengakui, pendidikan kedokteran di Indonesia mahal, lama, dan banyak beban lainnya. Untuk itulah dia menginginkan agar rumah sakit yang ada dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan. “Birokrasi yang ada harus kita terabas”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rerie juga mengakui bahwa jumlah dokter banyak berada di Jawa. Untuk mengatasi kesenjangan itu harus dipercepat distribusi dokter. □

AWG



Peringatan Hari Pahlawan

# Inspirasi, Reaktualisasi, dan Revitalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan

Peringatan Hari Pahlawan diharap tak sekadar acara seremonial, upacara. Implementasi nilai-nilai yang diwariskan pendahulu bangsa perlu diterapkan dalam keseharian.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA., mengajak seluruh komponen masyarakat dalam peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2021 ini dengan mengenang jasa-jasa para mereka. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengenang para pahlawan merupakan suatu penghargaan atas jasa-jasa mereka yang telah mendarmabaktikan segala aktivitas hidupnya pada bangsa dan negara. “Tanpa mereka bangsa ini tidak akan merdeka dan menjadi bangsa sebesar ini,” ujarnya, Jakarta, 9 November 2021.

Mengenang jasa para pahlawan, khususnya dalam setiap peringatan 10 November, menurut pria kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu jangan hanya sekadar mengikuti acara seremonial, upacara bendera, namun bagaimana nilai-nilai keseharian mereka lebih mendahulukan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dijadikan teladan dalam keseharian. “Nilai-nilai inilah yang perlu diimplementasikan dalam hidup kita,” paparnya.

Pahlawan, menurut alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), itu merupakan manusia luar biasa. Sikap yang demikian tidak bisa dimiliki oleh semua orang. “Mereka sudah bangun sebelum kita terbangun dan belum tidur saat kita sudah tertidur,” ucapnya. “Mereka setiap hari memikirkan bagaimana bangsa ini merdeka dan jaya,” tambahnya.

Sikap-sikap yang demikian, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil itu perlu dijadikan inspirasi untuk berbuat yang lebih untuk menjaga dan memajukan Indonesia. “Sikap mereka dijadikan inspirasi bagaimana seharusnya kita bertindak,” tegasnya.

Menjadikan pahlawan sebagai inspirasi, menurutnya, sangat tepat sebab nilai-nilai yang dikandung para pahlawan adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Nilai-nilai yang demikian, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji, itu perlu diaktualisasikan. “Dihidupkan kembali,” ucapnya. Mengingat di tengah masyarakat ada nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu bangsa mulai memudar. Bila ini dibiarkan membuat Gus Jazil khawatir akan masa depan bangsa.

“Ada sikap yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat,” ungkap Gus Jazil. Sikap-sikap demikian hanya akan memunculkan sikap mencari keuntungan sendiri sebanyak-banyaknya meski masyarakat dalam kondisi menderita. “Bila para pahlawan peka terhadap kondisi sosial masyarakat, mereka tidak,” paparnya. Bila perilaku ini tidak terkendali maka yang terjadi adalah hukum rimba, siapa yang kuat akan memakan yang lemah. “Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, menjadi luntur bahkan hilang,” tuturnya.

Untuk mencegah memudarnya nilai-nilai gotong royong maka nilai-nilai kepahlawanan, menurut Gus Jazil, perlu direvitalisasi, dikuatkan. Direvitalisasi yang dimaksud adalah bagaimana nilai-nilai itu dijadikan prioritas atau didahulukan.

“Bagi politisi, bila hendak membuat kebijakan maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan,” paparnya. Langkah demikian disebut sangat penting dan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan. □

AWG



Terima Gubernur Sumatera Barat

# Bamsoet Dorong Inpres Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara

Kehadiran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) merupakan penegasan kepada dunia Internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih tegak berdiri. Sekaligus menjadi dorongan semangat juang dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung agar draf Instruksi Presiden tentang Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bisa segera diterbitkan. Sehingga menjadi payung hukum terpadu agar pembangunan monumen yang sudah dimulai sejak tahun 2012 bisa segera diselesaikan sebelum perayaan Hari Puncak Peringatan Bela Negara ke-15 pada 19 Desember 2021.

Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara dilakukan di lahan seluas 50 hektar yang dihibahkan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok selatan dan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan daerah basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

“Jangan sampai pengabdian masyarakat tersebut menjadi sia-sia lantaran pembangunan monumen dan kawasan di sekitarnya tidak bisa diselesaikan,” ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Sumatera Barat

Mahyeldi, di Jakarta, Selasa (16/11/21).

Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat Jefrinal Arifin. Hadir pula pengurus Generasi Lintas Budaya, antara lain Romo Benny Susetyo, Olivia Zalianty, dan Raja Asdi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,

perayaan Hari Bela Negara dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 28/2006 yang menetapkan setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai sebagai Hari Bela Negara. Pemilihan tanggal tersebut menyesuaikan tanggal terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pada 19 Desember 1948.

Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara tidak lepas untuk mengenang peristiwa PDRI di Sumatera Barat yang diketuai Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kehadiran PDRI tidak lain untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Indonesia, karena pada saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditahan oleh Belanda.

“Kehadiran PDRI merupakan penegasan kepada Belanda dan juga dunia Internasional bahwa pemerintahan Indonesia

masih tegak berdiri. Sekaligus menjadi dorongan semangat juang dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Karena PDRI jugalah akhirnya Belanda mau menghentikan agresinya dan bersedia kembali ke meja perundingan,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, terbentuknya PDRI juga menunjukkan solidaritas yang tinggi dari para pemimpin bangsa. Walaupun berasal dari kalangan sipil, pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat, seperti Mr.

Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif, bisa tetap menjaga keberlangsungan kemerdekaan Indonesia melalui deklarasi PDRI.

“Sehingga, stigma bahwa pemimpin sipil lemah dan tidak mau bergerilya menjadi tidak tepat. Bahkan saat itu, Panglima Besar Soedirman mengakui kepemimpinan politik PDRI,” pungkas Bamsuet. □

## Terima Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera

# Bamsuet Dorong Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM merupakan keharusan, agar UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah gempuran sistem ekonomi liberal, namun juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera yang digagas alumni Universitas Jayabaya membuat marketplace UMKMSejahtera.id. Kehadiran UMKMSejahtera.id akan membantu target pemerintahan Presiden Joko Widodo agar pada 2024 nanti setidaknya sudah ada 30 juta UMKM yang terhubung dengan ekonomi digital

“Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021 mencatat, jumlah UMKM sudah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja Indonesia, serta menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia. Namun jumlah UMKM yang sudah terdigitalisasi, per November 2021, baru berjumlah 16,4 juta,” ujar Bamsuet usai menerima pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera, di Jakarta, Selasa (16/11/21).

Pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera yang hadir, antara lain: Ketua

Imlahyudin, Sekretaris Taryana, dan pengurus lainnya M. Gofur, Suzie Alancy Firman, dan Diaz.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, digitalisasi merupakan keharusan. Menjadikan UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah gempuran sistem ekonomi liberal, namun juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia.

“Berdasarkan proyeksi Google, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 bisa

mencapai US\$146 miliar. Besarnya jumlah tersebut harus dinikmati oleh UMKM. Pada tahun ini saja, nilai ekonomi digital Indonesia sudah mencapai US\$70 miliar, tumbuh hingga 49% (year-on-year/YoY) dari capaian 2020 senilai US\$47 miliar,” jelas Bamsuet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya menguasai pasar domestik, UMKM Indonesia melalui marketplace UMKMSejahtera.id juga harus bisa menembus pasar luar negeri. Mengingat kontribusi UMKM terhadap total ekspor masih kecil, yakni 14%. Kalah dibandingkan Singapura sebesar 41%, Thailand 29%, dan China 60%.

“Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024, kontribusi UMKM dalam total ekspor bisa mencapai 21,6%. Sebagai langkah konkret mewujudkan target tersebut, pemerintah menaikkan plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar, dan KUR tanpa agunan dari Rp 50 juta ke Rp 100 juta. Serta mendorong agar pinjaman UMKM segera mencapai 20 persen dari total pinjaman perbankan,” pungkas Bamsuet. □



Terima Dubes Afrika Selatan untuk Indonesia

# Bamsoet Dorong Kerjasama Pelestarian Satwa

Nelson Mandela pernah menyebutkan Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makasari Al-Bantani yang dimakamkan di Afrika Selatan sebagai salah seorang putera Afrika terbaik. “Ini menandakan betapa kuatnya hubungan emosional kedua negara,” jelas Bamsoet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI, Bambang Soesatyo yang juga Dewan Pembina Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI), bersama Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia Mr. Hilton Fisher membahas peluang kerjasama pelestarian satwa antara Indonesia dengan Afrika Selatan. Mengingat kedua negara dikenal sebagai negara yang memiliki koleksi satwa beraneka ragam dan endemik. Afrika Selatan, misalnya, menjadi rumah bagi mamalia darat tercepat dunia Cheetah, burung terbesar dunia Burung Unta.

Selain juga menjadi rumah bagi mamalia darat terbesar dunia Gajah Afrika, reptil terbesar dunia penyu belimbing, hingga antelop terbesar dunia Eland. Afrika juga dikenal sebagai rumah bagi The Big Five alias lima binatang paling sulit diburu di dunia, antara lain Singa, Leopard (macan tutul), Gajah Afrika, Kerbau Cape, dan Badak.

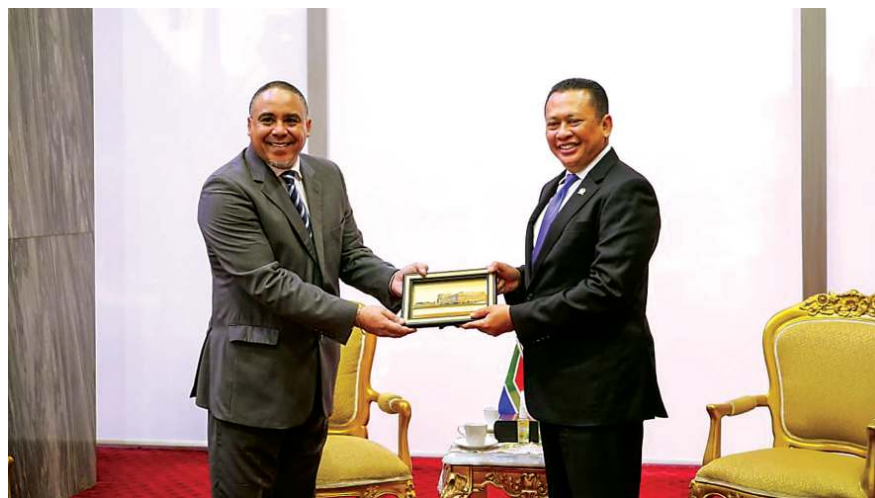
“Begitupun dengan Indonesia, yang juga menjadi rumah bagi berbagai hewan eksotik dan endemik. Seperti Orang Utan, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Jalak Bali, Burung Maleo, Burung Merak, hingga Burung Cenderawasih. Tidak menutup kemungkinan di masa depan, selain membangun kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan, kedua negara juga bisa membangun kerjasama dalam hal

pelestarian satwa,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia Mr. Hilton Fisher, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (18/11/21).

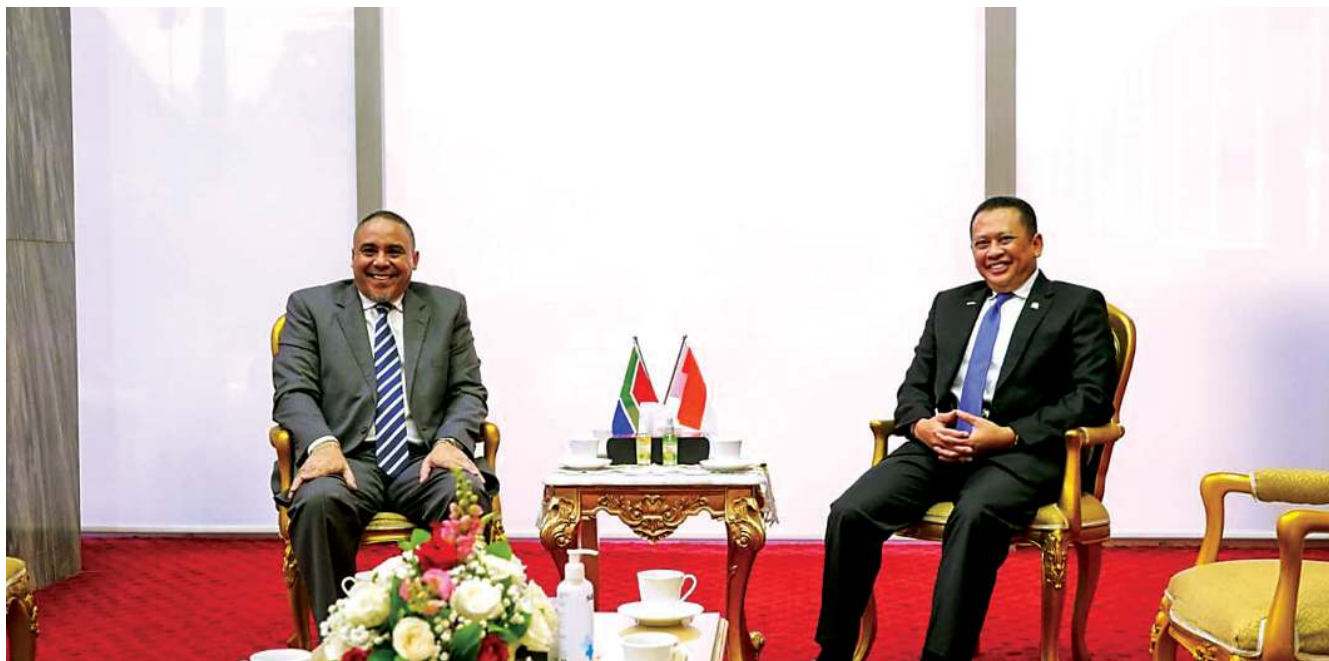
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, hubungan baik kedua negara sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Nelson Mandela sebagai tokoh African National Congress (ANC) dan Presiden pertama Afrika Selatan pasca-Apartheid (1994-1999) mempunyai special attachment pada Indonesia. Mandela telah berkunjung ke Indonesia sebanyak empat kali pada 1990, 1994, 1997 dan 2002. Mandela juga menjadi tokoh

dunia yang memperkenalkan batik dengan sebutan Madiba Shirt di Afrika Selatan. Saat menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), di saat pemimpin dunia lainnya termasuk Indonesia menggunakan pakaian formal berupa Jas, Mandela justru berani mengenakan batik.

“Salah satu pahlawan nasional Indonesia, Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makasari Al-Bantani, dimakamkan di Afrika Selatan. Bahkan, Nelson Mandela sampai menyebutnya sebagai ‘Salah Seorang Putra Afrika Terbaik. Menandakan betapa kuatnya hubungan emosional ikatan batin kedua







negara,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, dari sisi Indonesia, Afrika Selatan merupakan satu-satunya negara Afrika yang memiliki kesepakatan Kemitraan Strategis dengan Indonesia. Melalui Joint Declaration on a Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa yang ditandatangani pada 17 Maret 2008, saat kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Afrika Selatan.

“Dari sisi Afrika Selatan, Indonesia dipandang sebagai bangsa yang memiliki ikatan sejarah erat dengan bangsa Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan sangat menghargai peranan Pemerintah Indonesia di masa lalu yang konsisten mendukung perjuangan Afrika Selatan menentang pemerintahan Apartheid. Ditandai kehadiran wakil dari African National Congress (ANC), Mosen Kotane, sebagai observer pada KTT Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan

Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menekankan, seiring kepemimpinan sebagai Ketua G20, Indonesia memandang perlunya menempatkan Afrika sebagai bagian dari solusi, Africa as part of the solution. Sebagai penyambung aspirasi negara-negara berkembang, Indonesia menginginkan kerja sama yang lebih erat dengan Afrika Selatan, untuk memberikan keuntungan dan mempersempit jurang kesenjangan pembangunan antara negara maju, berkembang dan negara kurang berkembang.

“Sebagai sesama produsen besar produk pertanian, kedua negara perlu untuk memperkuat kerjasama. Saat ini, Afrika Selatan merupakan mitra dagang utama Indonesia dari kawasan Afrika, dengan nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US\$ 1.2 miliar di tahun 2020. Nilai tersebut masih sangat bisa ditingkatkan. Bagi Indonesia, Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor CPO dan turunannya. Sementara bagi Afrika Selatan, Indonesia menjadi tujuan ekspor bagi berbagai produk besi dan baja, bubur kertas, dan berbagai produk pertanian seperti buah *tropis hingga wine*,” pungkas Bamsoet. □



Milad ke-109 Muhammadiyah

# Ahmad Basarah Puji Gerakan Sosial dan Peran Moderasi Islam Muhammadiyah

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, gerakan sosial Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan sangat luar biasa. Muhammadiyah adalah organisasi non-pemerintah terbesar di dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, memuji peran besar yang dilakukan Muhammadiyah di usianya yang mencapai 109 tahun. Dia berharap, sebagai salah satu organisasi tertua dan sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah tetap menyemai gagasan moderasi Islam di Indonesia seperti yang selama ini dilakukan.

"Sejak berdirinya, Muhammadiyah memperjuangkan gagasan Islam moderat dengan mengembangkan berbagai aktivitas yang dikenal sebagai amal usaha dalam bidang pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan belakangan pemberdayaan kaum mustadhafin," kata Ahmad Basarah, Kamis (18/11/2021).

Muhammadiyah hari ini berusia 109 tahun sejak didirikan KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini kini memiliki 104 rumah sakit dan lebih dari 300 klinik dan unit pelayanan kesehatan di banyak daerah terpencil. Organisasi ini juga memiliki 3.334 sekolah dan 167 perguruan tinggi, terdiri atas 65 universitas, 17 institut, 71 sekolah tinggi, tiga politeknik, tiga akademi, serta delapan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah. Muhammadiyah memiliki 10 fakultas kedokteran dengan 700 lulusan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di daerah.

"Gerakan sosial Muhammadiyah di bidang

pendidikan dan kesehatan sangat luar biasa. Muhammadiyah adalah organisasi non-pemerintah terbesar di dunia. Jika semua sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah terus menyebarkan moderasi Islam, saya optimistis kebhinnekaan di Indonesia akan terawat baik dan NKRI akan terjaga," kata Ahmad Basarah.

Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah juga berharap, dengan spirit dan jiwa "Islam Berkemajuan", Muhammadiyah terus istiqomah menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

Dia mengatakan, Muhammadiyah dan PDI Perjuangan memiliki ikatan sejarah yang kuat dan panjang, karena para tokohnya sama-sama menjadi pendiri bangsa sekaligus benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muhammadiyah juga tak putus mengembangkan nilai-nilai utama dengan semangat taawun dan kebhinnekaan.

"Muhammadiyah berdiri tahun 1912, diikuti NU tahun 1926, lalu PNI tahun 1927. Periode perjuangan itu merupakan satu tarikan napas. Bung Karno sebagai Presiden Pertama RI sekaligus Ketua PNI merupakan santri KH. Ahmad Dahlan, dan pernah menjadi ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah Bengkulu. Saat meninggal keranda Bung Karno juga diselimuti panji-panji Muhammadiyah," tutur Ahmad Basarah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, Muhammadiyah selalu hadir setiap negara memanggil. Di masa awal ketika masih dibutuhkan perang fisik, Muhammadiyah di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo mendirikan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MU-APS) pada 1948 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda.

"Ki Bagus Hadikusumo bersama tokoh Islam lainnya, seperti Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hassan juga memperlihatkan sikap kenegarawan saat bersedia menerima usul menghilangkan tujuh kata di Piagam Jakarta demi menyelamatkan Indonesia yang baru seumur jagung dari ancaman disintegrasi bangsa," ucap Ahmad Basarah yang juga menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Komitmen Muhammadiyah menjaga Pancasila dan NKRI, tambah Ahmad Basarah, dikuatkan dengan Putusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah Tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menyebutkan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Di forum itu disepakati Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan rida Allah SWT.

Pada masa pandemi, Muhammadiyah turut bergerak dengan amal usaha yang dimiliki bersama pemerintah melakukan perang terhadap siluman Covid-19. Dengan kekuatan amal usaha yang dimiliki, mulai rumah sakit, perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM), sekolah sampai panti asuhan, Muhammadiyah terus berpartisipasi mengatasi pandemi.

Saat pemerintah menggalakkan vaksinasi, Muhammadiyah tak ketinggalan membantu pemerintah mempercepat vaksin tidak saja kepada anggotanya tapi juga masyarakat umum, termasuk program vaksinasi lintas iman.



“Saya kira tepat jika Milad ke-109 tahun ini, Muhammadiyah mengusung tema Optimis Hadapi Pandemi COVID-19: Menebar Nilai Utama. Tanpa optimisme bangsa ini tidak akan pernah bisa keluar dari situasi sulit. Sebagai umat Islam yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah, meski saya salah

satu pengurus NU, ikut bangga dengan apa yang dilakukan Muhammadiyah untuk bangsa dan negara,” pungkas Ahmad Basarah.

Dalam rangka Milad ke-109 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Resepsi Milad ke-109 yang digelar secara

luring dan daring pada Kamis 18 November 2021. Secara luring resepsi digelar di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan peserta terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara daring dalam milad kali ini. □

## Milad ke-109 Muhammadiyah

# Muhammadiyah Berkontribusi Nyata bagi Kemajuan Republik Indonesia

Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan, berharap, dengan bertambah usia, Muhammadiyah akan tetap melanjutkan peran sosial dan keagamaan demi majunya bangsa dan negara.

**D**IUSIA yang telah melebihi satu abad, Muhammadiyah telah berperan dan mewarnai perjalanan hidup bangsa dan negara. Muhammadiyah yang berdiri pada 18 November 1912 adalah organisasi keagamaan dan sosial yang memberikan sumbangsih yang nyata terhadap peradaban bangsa, ikut memajukan kualitas pendidikan, dan memberikan kontribusi sosial yang nyata. Ini adalah bukti Muhammadiyah adalah bagian melekat dan menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan republik.

“Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dan sosial yang berkontribusi nyata bagi kemajuan republik. Peran kesejarahan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saya mengucapkan selamat atas Milad Muhammadiyah ke-109. Semoga dengan bertambahnya usia, Muhammadiyah akan tetap melanjutkan peran sosial dan keagamaan demi majunya bangsa dan negara,” tutur Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa gerakan pendidikan berupa pembangunan banyak sekolah, serta komitmen sosial dalam membantu mengentaskan berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat telah menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mampu berjuang secara mandiri. Telah banyak lulusan pendidikan dari banyak lembaga pendidikan yang dirintis dan dikelola Muhammadiyah, sama halnya dengan berbagai kegiatan sosial yang telah berhasil membantu negara mengentaskan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kemiskinan.

“Komitmen kebangsaan Muhammadiyah dalam membela NKRI, mempromosikan nilai-nilai toleransi, serta kritis-konstruktif pada berbagai persoalan kebangsaan adalah wujud nyata dari pengejawantahan Pancasila. Muhammadiyah sedari awal adalah salah satu penopang utama republik, terus mewarnai, dan berperan dalam rangkaian panjang sejarah republik. Ruang-ruang pengabdian ini yang perlu terus disemai, sehingga pembangunan kebangsaan bukan saja menjadi tugas pemerintah, namun tugas kita bersama,” kata Syarif Hasan.

Apalagi, mengingatkan bahwa tantangan bangsa di era pandemi dan pasca pandemi meniscayakan peran lebih masyarakat sipil. Negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bersinergi dengan berbagai organisasi

kemasyarakatan yang ada. Peran pembinaan, sosialisasi, maupun konsolidasi komunitas akan sangat efektif jika ditopang oleh beragam komunitas dan kelompok sosial yang ada.

“Kita hidup di era kolaborasi yang meniscayakan kerjasama dan saling mengisi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Ketiganya memiliki peran yang saling terkait dan harus saling menopang. Dalam konteks ini pulalah negara harus memberikan ruang yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya inisiatif-inisiatif masyarakat sipil dalam membantu mengentaskan berbagai persoalan kebangsaan. Muhammadiyah telah melakukan peran kesejarahannya yang nyata, sesuatu yang harus mendapatkan apresiasi dan atensi yg tinggi “ tutup Syarif Hasan. □

Silaturahmi Masyarakat Lampung

# Komunikasi Pusat dan Daerah Menentukan Keberhasilan Pembangunan di Daerah

Wakil Ketua MPR Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE., MM., menyatakan, komunikasi penting untuk meningkatkan kesepahaman agar kita bisa meningkatkan kinerja yang sudah ada.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, SE., MM., mengatakan, dalam era kompetisi demokrasi ini semua daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya masing-masing. Membangun setiap daerah itu dalam rangka memajukan pembangunan nasional. Karena itu, informasi dan kecepatan komunikasi antara pusat dan daerah akan menentukan keberhasilan dalam membangun daerah.

Berbicara di dalam acara silaturahmi Masyarakat Lampung Perantauan Bersama Gubernur dan Tokoh-Tokoh serta Atlet-Atlet PON Lampung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ahad (21/11/2021), Zulkifli Hasan menyatakan, silaturahmi ini menjadi penting untuk mengetahui apa yang sedang diperjuangkan dan diharapkan masyarakat di perantauan, serta apa yang sudah dikerjakan dan diinginkan

pemerintah daerah dan masyarakat Lampung. "Komunikasi ini untuk meningkatkan kesepahaman agar kita bisa meningkatkan kinerja yang sudah ada," ujar Zulkifli Hasan.

Silaturahmi ini dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Lampung Arinal Djuanidi, 14 kepala daerah (bupati dan walikota) se Provinsi Lampung, tokoh dan sesepuh







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masyarakat Lampung, anggota DPR dan DPD dari Provinsi Lampung, M. Qodari, dan Henry Yosodiningrat.

Bang Zul, begitu Zulkifli Hasan disapa, memberi contoh komunikasi yang lancar antara daerah dan pusat pada saat pembangunan Institut Teknologi Sumatera (Itera). Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memutuskan akan membangun Itera di Sumatera Selatan. “Saya beberapa kali menghadap dan meminta agar Itera dibangun di Lampung. Saya katakan penduduk Lampung lebih banyak dibanding Sumsel, dan Lampung mempunyai lebih banyak SDA, karena itu layak jika ada Itera di Lampung. Komunikasi

dengan Gubernur Sjachrudin pada waktu itu cepat sekali, akhirnya Presiden SBY pun sepakat Itera didirikan di Lampung,” papar Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FKPLP).

Begitu juga komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. “Saya sudah dekat dengan Pak Jokowi ketika masih sebagai Walikota Solo. Setelah Pak Jokowi menjadi presiden, saya menyampaikan sudah puluhan tahun di Sumatera tidak ada pembangunan jalan tol. Saya mendampingi Pak Jokowi ketika meresmikan beberapa jalan tol di Sumatera,” ujarnya.

Zulkifli memberi contoh komunikasi

dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi selama ini berjalan dengan mudah dan lancar. “Gubernur ini seorang insinyur, yang jelas dan tegas dan tidak main-main. Kalau main-main, bangunan bisa runtuh. Karena itu kita mudah berkomunikasi. Saya merasakan komunikasi dengan gubernur mudah sekali,” ujar Bang Zul.

Menurut Bang Zul, banyak proyek pembangunan yang sudah dikerjakan gubernur, bupati, dan walikota di Lampung. “Kemajuan Lampung tidak lepas dari peran bupati dan walikota. Bupati dan walikota telah bekerja keras untuk memajukan Provinsi Lampung secara bersama-sama dan kompak di bawah kepemimpinan gubernur. Karena itu, kami di pusat merasakan komunikasi yang baik sekali dan lancar,” katanya lagi.

Bang Zul mengungkapkan, Menteri BUMN Erick Thohir merencanakan akan mengembangkan Bakauheni menjadi pusat Pariwisata. Pelabuhan Bakauheni saat ini sudah tidak mampu menampung penumpang, karena kapasitas pelabuhan sudah melebihi batas. Karena itu sedang direncanakan untuk menambah pelabuhan penyeberangan baru.

“Ada juga usulan untuk menjadi tuan rumah PON, membangun rumah sakit di Bandar Lampung. Banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita bersama-sama. Kami di pusat akan mendukung gubernur, bupati, walikota di Lampung yang telah bekerja keras membangun daerah. Kami sekuat tenaga akan membantu,” katanya. □



Rakernas DPP Apdesi 2021-2026

# Membangun Indonesia dari Desa

Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., optimistis ke depan desa akan tumbuh menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan teknologi. "Tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia," katanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**ESJEN MPR, Ma'ruf Cahyono, mengatakan, desa akan menjadi kawasan terbuka bagi masuknya berbagai pengaruh dunia luar, termasuk di dalamnya globalisasi dan kemajuan teknologi. Untuk itu, nilai-nilai kearifan lokal harus tetap dijaga dan dilindungi agar tidak tergeser dan tersisihkan oleh laju roda zaman.

"Kita tentu tidak menginginkan pengembangan potensi desa menjadi pintu masuk atas lunturnya kearifan lokal, tergerusnya semangat kegotong-royongan, dan terkikisnya wawasan kebangsaan, karakter dan jati diri ke-Indonesiaan kita. Selaras dengan itu, upaya pengembangan potensi dan sumber-sumber daya desa harus dibarengi dengan pembangunan wawasan kebangsaan," kata Ma'ruf Cahyono dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) periode 2021 – 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Pelantikan dan Rakernas DPP Apdesi periode 2021 – 2026 bertema: "Membangun Indonesia dari Desa," dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Dr. Ir. Wahyu Utomo, Ketua Umum Apdesi 2021 – 2026 H. Surta Wijaya, dan ratusan peserta Rakernas.

Ma'ruf Cahyono menjelaskan, MPR RI

senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui pemasaryatan Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Empat pilar MPR RI itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, etika moral, dan alat pemersatu bangsa, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus kebangsaan yang harus kita junjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dan kemajemukan bangsa.

"Apdesi bisa bekerjasama dengan MPR

RI. Apdesi bisa berkontribusi dalam rangka mendukung visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, serta tugas MPR dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR, pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi masyarakat," katanya.

Berbicara tentang desa, Ma'ruf mengatakan, pembangunan nasional bisa dikatakan berhasil apabila desa dalam lingkup terkecil suatu negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi kemajuan dan kemandiriannya di berbagai bidang. Desa memiliki peranan







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Bahkan desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.

“Begitu pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, setidaknya membuat desa memiliki dua fungsi strategis. Pertama, dari aspek ekonomis, desa memegang peranan penting terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Kedua, dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh

dihiraukan,” paparnya.

Program dana desa yang dialokasikan ke desa-desa di berbagai wilayah, lanjut Ma’ruf Cahyono, bisa bermanfaat untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari sinilah desa mempunyai kewenangan mengelola dan menggunakan dana desa untuk pembangunan desanya.

Namun, tambah Ma’ruf Cahyono, dalam perjalanannya penggunaan dan pengelolaannya masih minim terkait dengan

keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan karena kurangnya pengawasan dari masyarakat, sehingga penggunaan dan pengelolaannya kurang tepat sasaran.

“Oleh karena itu penting bagi aparatur desa untuk mendapatkan pemahaman tentang penggunaan dan pengelolaannya. Termasuk juga warganya bahwa mereka punya hak untuk terlibat dalam pelaksanaannya agar menjadi suatu keberhasilan desa yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional,” katanya.

“Hakikatnya pembangunan desa merupakan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kini desa tidak bisa dianggap lagi sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.

Ma’ruf menambahkan, kini program pengembangan potensi desa mengarah pada mewujudkan desa wisata agro, desa industri, dan desa digital. “Ke depan, saya optimistis desa tumbuh menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia. Ini akan menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada,” ujarnya. □



## Syarat dan **Ketentuan** Saat Melakukan Perjalanan

Pemberlakuan syarat perjalanan dengan menggunakan test PCR menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Adanya bisnis di balik itu membuat suara penolakan semakin kuat, apalagi yang menyuarakan adalah para wakil rakyat. Bagaimana sebaiknya dalam pemberlakuan syarat perjalanan? Berikut pendapat anggota MPR yang membindangi masalah kesehatan.

**SY Anas Thahir** Anggota MPR Fraksi PPP

### **Kalau Cukup Antigen, Kenapa Harus PCR?**

UNTUK perjalanan ke luar negeri test PCR tetap diperlukan karena semua negara di dunia juga memberlakukan kewajiban test PCR bagi pejalan dari dan keluar negara lain. Di samping itu perjalanan antarnegara memang memiliki tingkat resiko lebih besar daripada perjalanan domestik yang dalam beberapa hal lebih mudah dikontrol. Namun demikian untuk perjalanan dalam negeri pemerintah perlu mempertimbangkan bagi yang sudah menjalani vaksin lengkap dan taat prokes sebaiknya cukup pake test antigen, tidak harus PCR.

Kewajiban PCR sebagai syarat perjalanan tidak ada hubungannya dengan soal harga murah atau mahal biaya test PCR. Tetapi lebih pada kepentingan pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19, namun demikian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hendaknya dilakukan dengan cermat, tegas, dan tidak maju-mundur agar masyarakat tidak menjadi tambah bingung. Aturan yang ditetapkan juga tidak perlu berlebih-lebihan agar tidak menambah beban baru yang memberatkan masyarakat. Jadi, logikanya, kalau cukup dengan antigen bagi yang sudah dua kali vaksin kenapa harus PCR? Dari sisi harga kalau bisa lebih murah kenapa harus bayar lebih



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

malah? Bahkan kalau bisa gratis apa masih harus bayar?

Jika pemerintah ingin agar roda ekonomi lebih cepat berputar dan kehidupan masyarakat segera normal kembali maka mobilisasi masyarakat harus dilonggarkan dengan tetap mensyaratkan prokes yang ketat dan menggenjot percepatan vaksinasi hingga mencapai angka 70%. Tidak perlu

bikin aturan yang kesannya saling menegasikan.

PCR cukup diganti dengan antigen, tetapi tetap dengan prokes yang ketat dan menunjukkan sertifikat vaksin. Lalu secara bertahap kita menuju pelonggaran syarat perjalanan yang bebas PCR, kemudian bebas antigen. □

AWG



**Kurniasih Mufidayati** Anggota MPR Fraksi PKS

## Kebijakan Haruslah Tidak Membebani Masyarakat

**S**ERING berubah-ubahnya kebijakan testing antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan memperlihatkan kurang luasnya perhitungan sebelum sebuah kebijakan diambil. Manajemen dampak tidak terlihat dari sini. Koordinasi antarinstansi juga jadi persoalan. Peraturan yang dibuat berlaku hitungan hari dan saling tidak sinkron. Baru kemudian ada revisi-revisi. Pengendalian pandemi ini coba dibuat terpusat dengan adanya KPC PEN, tapi aturan teknisnya muncul masing-masing. Yang awal terlihat bagaimana aturan Kemendagri dan Kemenhub saling berbeda.

Kepentingan perjalanan lebih condong *tracing*. WHO dan Kemenkes sudah mengatur jika keperluan *testing* dan *tracing* cukup menggunakan antigen. Jika antigen positif baru masuk proses diagnosa dengan PCR. Jadi, jika menjadi syarat perjalanan dalam negeri, tes antigen sudah lebih dari memadai untuk mempertahankan angka *tracing* kita.

Sekali lagi untuk perjalanan adalah *testing* dan *tracing*. WHO sempat melaporkan angka *testing* kita mengendur. Sehingga jika dipersyaratkan sebagai bagian dari *testing* dan *tracing*, cukup menggunakan antigen dan tidak memberatkan masyarakat.

Kebijakan haruslah tidak membebani masyarakat. Sebelum ramai-ramai soal harga tes PCR, dulu harga tes PCR dan antigen bisa lebih murah jika dibanding dengan tiket perjalanan. Dan, akhirnya memang secara komponen bisa lebih ditekan lagi. Jika untuk kebutuhan mempertahankan angka *testing* dan *tracing*, baik harga PCR dan antigen bisa jauh lebih ditekan lagi untuk perjalanan.

Harusnya tidak saling menegasikan ketika harga tes dibuat murah, pemberlakuan cukup dengan tes antigen, dan aplikasi



*Peduli Lindungi* terus diperbaiki dan disosialisasikan ke masyarakat sebagai filter bagi pemulihan aktivitas perekonomian. Pada saat yang sama, vaksinasi terus ditingkatkan, terutama pada pelaku-pelaku di sektor perekonomian yang sedang dalam pemulihan.

Kalau harga PCR tidak ramai diprotes karena diwajibkan, itu jelas kebijakan yang amat memberatkan. Harga tes PCR bisa lebih mahal dibandingkan harga tiket. Hasilnya juga belum tentu didapat dengan cepat. Di daerah masih hitungan hari. Silahkan ditafsirkan jika ada beban biaya berlebih di titik ini, apa dampaknya bagi ekonomi masyarakat.

Dalam kondisi melandai seperti sekarang, persoalan kita memang melemahnya 5M di publik dan 3T untuk pemerintah. Bukan tidak mungkin ke depan antigen dan PCR tidak relevan lagi menjadi syarat perjalanan. Hanya digunakan bagi mereka yang memiliki gejala. Syaratnya angka vaksinasi kita sudah progresif untuk disebut *herd immunity*. Jadi,

sangat mungkin tidak ada lagi syarat PCR dan antigen dalam perjalanan. Syaratnya itu tadi, genjot dua dosis 70% secepatnya. Dalam beberapa kesempatan target herd immunity kita mundur terus. Selain vaksin cakupannya luas saya kita memakai masker dan mencuci tangan bisa jadi gaya hidup baru yang tetap bisa dipertahankan.

Dalam kondisi saat ini di mana angka cakupan vaksinasi kita belum mencapai 70% dan ada potensi ledakan gelombang ke-3, syarat perjalanan dengan menggunakan tes masih relevan, namun cukup dengan tes antigen dengan harga yang murah.

Sekali lagi, tes ini dalam rangka testing dan tracing agar kita tidak lengah terhadap potensi peningkatan kembali kasus dengan melakukan 3T yang tinggi. Hal ini tentu harus dibarengi dengan terus mengkampanyekan 5M agar tidak kendor selama pandemi belum selesai, apalagi ketika angka kasus menunjukkan peningkatan. □

AWG

Seminar Nasional di UMJ

# Kerukunan Antarumat Beragama Sudah Ada Sejak Lama

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA., menegaskan, kerukunan antarumat beragama sudah menjadi komitmen bersama di antara Bapak dan Ibu Pendiri Bangsa. Mereka bukan hanya merencanakan dan membahas tapi sudah mempraktikkan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan politik.

Salah satu bukti adanya kerukunan antarumat beragama di antara para Pendiri Bangsa terjadi pada proses penyusunan Pancasila, baik di BPUPKI, Panitia Sembilan, maupun PPKI. Puncaknya di antara kelompok religius dan nasionalis bersepakat dalam menentukan sila-sila Pancasila.

Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah bukti bahwa kelompok Islam mau mendengar dan berempati terhadap tuntutan kelompok Indonesia bagian timur. Keikhlasan menghilangkan tujuh kata tersebut juga bermakna bahwa kerukunan antarumat beragama sudah tercipta dan dipraktikkan dengan baik.

“Kalau bukan karena ingin mempertahankan kerukunan, masing-masing kelompok pasti lebih mengutamakan egoisme serta kepentingannya sendiri-sendiri,” ungkap HNW saat menjadi pembicara kunci secara daring pada Seminar Nasional dalam rangka Sosialisasi Kerukunan Antara Umat Beragama Dalam Bingkai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (6/11/2021).

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta menghadirkan tiga narasumber, yaitu: Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., (Rektor UMJ), Dr. KH. Yusnar Yusuf (Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama), serta Pdt. Gomar Gultom M. Th (Ketua Umum Per-



sekutuan Gereja-Gereja Indonesia).

Lebih lanjut HNW memaparkan, selain dalam penyusunan teks Pancasila, kerukunan antarumat beragama juga mendasari penyusunan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena di dalam Pembukaan, selain ada teks Pancasila juga terdapat cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harga mati dan tidak bisa diubah lagi. Sebab, di sana terdapat teks Pancasila dan cita-cita Indonesia merdeka. Mengubah cita-cita kemerdekaan berarti mengubah NKRI,” katanya.

Sependapat dengan Hidayat, Pdt. Gomar Gultom M. Th mengatakan bahwa kerukunan antarumat beragama terbentuk dengan sendirinya. Bukan dipaksakan ataupun direayasa. Dan, itu terjadi secara alamiah.

“Proses dialektika dan keputusan menetapkan Pancasila adalah bukti bahwa kerukunan antarumat beragama sudah ada sejak dahulu, dan itu tumbuh di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Gomar Gultom.

Di masa kini, lanjut Gomar Gultom,

kerukunan antarumat beragama makin mudah ditemukan. Misalnya, saat umat Nasrani merayakan hari rayanya, banyak ibu-ibu membantu kesibukan di gereja. Banyak di antara mereka yang mengenakan hijab dan itu pasti bukan umat Nasrani.

Sementara itu, Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., mengingatkan, praktik politik di Indonesia berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama. Seperti pada saat Pilkada DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan pilpres.

Ma'mun Murod menunjuk contoh Pilpres yang lalu, di mana Prabowo dan Joko Widodo mampu merepresentasikan dirinya sebagai wakil dari dua kelompok umat beragama yang saling berhadapan. Ini terjadi karena presidential threshol yang mencapai 20% sehingga kandidat yang muncul hanya ada dua pasang, dan itu menyebabkan politik belah bambu.

“Karena itu, patut dikaji kembali agar presidential threshol diturunkan supaya kandidat yang muncul lebih dari dua pasang, untuk menghindari terjadinya politik belah bambu,” ungkap Ma'mun Murod. □

MBO



## Sejarah Kementerian Agama



## Diusulkan Saat Sidang BPUPKI

Untuk mewujudkan Kementerian Agama perlu perjuangan keras dari para tokoh umat Islam. Mereka menganggap harus ada kementerian khusus untuk mengurus masalah agama. Keinginan membentuk Kementerian Agama sudah diusulkan sejak Sidang BPUPKI, berlanjut Sidang PPKI hingga KNIP. Ada peran besar tokoh umat Islam Banyumas. Setelah ditolak, akhirnya para tokoh bangsa pada masa itu menyetujui adanya Kementerian Agama. Dikatakan oleh Rasjidi, tugas Menteri Agama pertama adalah mengurus agama dalam pengertian seluas-luasnya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**T**ANDA-TANDA kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mulai terlihat di tahun 1944. Pada waktu itu, Jepang sudah menduduki wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Merasa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan maka negara yang dijuluki Negeri Matahari Terbit itu mencari dukungan kepada wilayah yang didudukinya, terutama Jawa dan Sumatera.

Untuk mencari dukungan bangsa Indonesia, Komando Angkatan Darat Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Agar janji itu tidak disebut omong kosong maka dibentuklah *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai* atau dalam bahasa Indonesia-nya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Jepang lewat perwakilannya, Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945 mengumumkan adanya badan yang dinamakan BPUPKI. Waktu itu Harada sebatas menyiarkan adanya badan itu. Bertepatan dengan Haul (Hari Ulang Tahun) Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, BPUPKI baru diresmikan, 29 April 1945. Sebagai badan yang resmi maka kehadiran dan aktivitasnya tidak dilarang atau dicurigai oleh polisi-polisi rahasia Jepang.

Dalam catatan sejarah yang ada, BPUPKI menggelar sidang dua kali atau yang disebut dengan sidang resmi. Sidang I digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang yang digelar di bekas Gedung Volksraad, Pejambon, Gambir, Jakarta, itu dibahas rumusan dasar, bentuk, dan filsafat negara.

Dari sinilah lahir Piagam Jakarta.

Untuk melengkapi struktur ketatanegaraan bangsa yang hendak dibentuk, BPUPKI menggelar kembali Sidang II pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Materi yang dibahas dalam sidang itu adalah tentang wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan, dan pengajaran.

Di hari kedua Sidang II atau tepatnya pada 11 Juli 1945, anggota BPUPKI, Prof. Mohammad Yamin, mengusulkan adanya suatu kementerian yang istimewa mengurus atau berhubungan dengan agama, yakni Departemen (Kementerian) Agama. Dalam sidang itu, Yamin mengatakan, tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan

harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri.

“Pendek kata menurut kehendak rakyat bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid, dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yang kita namai Kementerian Agama,” kata Yamin.

Sumber lain menyebutkan, apa yang dikatakan Yamin adalah perlu diadakannya kementerian yang istimewa yang berhubungan dengan agama, yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan ke-sungguhan hati.

Usulan pria dari Sumatera Barat itu yang



Pembentukan BPUPKI





**Johannes Latuharhary**

disampaikan saat Sidang II tidak ada respon dari peserta sidang. Usulan tidak ditolak, tidak juga diterima.

BPUPKI yang telah menjalankan tugasnya pada saat itu dikatakan telah berhasil menyusun berbagai perangkat hukumnya untuk mendirikan atau membentuk negara. Kesuksesan inilah yang akhirnya membuat badan ini dibubarkan pada 7 Agustus 1945.

Untuk lebih mengerucutkan persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah badan baru yang dinamakan, *Dokuritsu Junbi Inkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas badan ini adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh UUD Tahun 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah



**Mohammad Yamin**

ketatanegaraan bagi Indonesia.

Sidang-sidang yang pernah digelar oleh PPKI adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, dan sidang pada 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua inilah, usulan Yamin tentang perlunya dibentuk Kementerian Agama mencuat kembali. Mungkin setelah bisik-bisik atau lobi-lobi usulan tersebut ditolak. Dari 27 anggota PPKI, hanya enam yang mendukung usulan tersebut. Di antara mereka yang menolak itu adalah Johannes Latuharhary, Abdul Abbas, Iwa Kusumasumatri, dan Ki Hadjar Dewantara.

Latuharhary malah mengusulkan agar masalah agama diserahkan atau diurus oleh Kementerian Pendidikan. Apa yang diusulkan itu didukung oleh Abdul Abbas. Sedang Iwa Kusumasumatri menolak dengan alasan, pemerintah itu sifatnya nasional sehingga agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Lain lagi usulan Ki Hadjar Dewantara.

Tokoh Taman Siswa ini mengusulkan agar masalah agama diserahkan atau diurus oleh Kementerian Dalam Negeri.

Karena adanya penolakan maka selepas Indonesia merdeka, pemerintahan Indonesia tidak memiliki Kementerian Agama. Tak adanya Kementerian Agama dirasa kurang oleh anggota BPUPKI sekaligus tokoh NU, KH Wahid Hasjim. Dalam *kemenag-go.id*, dikatakan, setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam praktiknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan, terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu dalam satu tangan (departemen), dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya.

Meski Indonesia sudah merdeka, namun struktur pemerintahan yang ada belum lengkap seperti saat ini. Lembaga MPR dan DPR belum terbentuk. Untuk melengkapi lembaga semacam itu maka pada 29 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini disebut sebagai badan pembantu Presiden dan merupakan cikal lembaga legislatif.

Dalam catatan sejarah, KNIP pernah melakukan Sidang Pleno II di Jakarta pada tanggal 16–17 Oktober 1945, Sidang Pleno III di Jakarta pada 25–27 November 1945, Sidang Pleno IV di Surakarta pada 28 Februari–8 Maret 1946, Sidang Pleno V di Kota Malang pada 25 Februari–6 Maret 1947, dan Sidang Pleno VI di Yogyakarta pada 6–15 Desember 1949.

Oleh para tokoh umat Islam, KNIP diakui



**Sidang PPKI**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Sidang BPUKI

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai lembaga yang tepat untuk menyuarkan aspirasi rakyat kepada Presiden. Untuk itu, anggota KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Banyumas, yakni KH. Abudardiri, KH. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, pada 11 November 1946 mengusulkan kembali perlu dibentuknya Kementerian Agama kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Usulan tiga orang tersebut semakin membesar ketika mendapat dukungan dari anggota KNIP, yakni Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo. Ada yang menyebut para pendukung anggota KNIP itu dari 'Fraksi Partai Masyumi'.

Usulan dari anggota KNID Banyumas itu selanjutnya dibawa dalam Sidang Pleno III

yang pada waktu rapatnya diigelar di Gedung STOVIA, Salemba, Jakarta. Mereka dalam pidatonya mengatakan, "supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri".

Berkat dukungan yang makin meluas maka dalam Sidang Pleono II seluruh peserta sidang menerima dan menyetujui dibentuknya Kementerian Agama. Sebab badan ini pada masa itu disebut sebagai badan pembantu Presiden maka selanjutnya Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk

merealisasikan keputusan sidang pleno KNIP itu. Saat itu Wakil Presiden mengatakan, "adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah."

Meski sudah disepakati adanya kementerian itu, namun selanjutnya ada dinamika lagi, yakni apakah kementerian ini dinamakan Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama. Dari berbagai pandangan akhirnya diputuskan dan disepakati nama Kementerian Agama.

Dalam *Wikipedia* diceritakan, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan No.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Dan, HM Rasjidi diangkat sebagai menterinya. Rasjidi merupakan tokoh Muhammadiyah. Ketetapan itu dikumandangkan lewat siaran RRI.

Setelah diangkat jadi Menteri Agama, Jumat malam, 4 Januari 1946, Rasjidi memberikan sambutan kepada seluruh rakyat Indonesia lewat RRI. Dalam sambutannya, ia menegaskan berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Selanjutnya saat mengadakan rapat dengan Jawatan (Kanwil) Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta, Jawa Tengah, 17-18 Maret 1946, Rasjidi memaparkan kembali alasan dan pentingnya mengapa pemerintah mendirikan Kementerian Agama. Dikatakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Lebih lanjut dalam web [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id) dikatakan, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya. □

AWG/dari berbagai sumber







## Dari Malioboro Hingga Lapangan Banteng

Saat ini Kementerian Agama sudah memiliki kantor yang ‘mapan’ di Lapangan Banteng. Sebelum di sana, pegawai dan menteri agama harus berpindah-pindah tempat, mulai dari Jl. Malioboro, Yogyakarta hingga Jl. Thamrin, Jakarta. Banyak cerita dan filosofi dari gedung yang dibangun.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**M**ENDENGAR nama Lapangan Banteng, Jakarta, orang akan menyebut banyak hal di sana. Selain ada ruang terbuka hijau dengan Monumen Pembebasan Irian Jaya (Papua), juga ada Masjid Istiqlal, Katedral, Hotel Borobudur, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama. Dari tempatnya yang strategis, tak jauh dari Lapangan Monas, membuat Lapangan Banteng menjadi tempat yang penting.

Sejak masa kolonialisme Belanda, kawasan tersebut memang dipandang sebagai daerah yang penting sehingga Belanda pada masa itu menamakan lapangan yang ada dengan sebutan Waterlooplein (Lapangan Waterloo). Bila pada masa Belanda disebut dengan Waterlooplein, maka pada masa Jepang dikatakan sebagai Lapangan Singa sebab di sana bercokol patung besar berwujud Singa. Setelah Indonesia merdeka,

lapangan itu dinamakan Lapangan Banteng.

Pada masa dahulu kala, ketika Belanda hendak mengembangkan Kota Batavia, kawasan tersebut merupakan hutan belantara dan rawa-rawa. Tak heran di sana pada masa itu banyak hidup hewan liar, seperti macan, banteng, rusa, kijang, dan babi. Namun, mulai pada masa Orde Baru Lapangan Banteng menggeliat menjadi pusat perkantoran dan hotel.

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Presiden Soeharto merancang dan membangun kantor Kementerian Agama di sisi barat Lapangan Banteng. Desain bangunan konon sudah ada sejak tahun 1978. Diungkapkan dalam *setiapgedung.web.id*, rancangan awal bangunan terdiri dari dua blok, masing-masing berlantai 14 dan 12 dengan luas total 36 ribu meter persegi dan bangsal rapat seluas 1800 meter persegi, namun rencana berubah setelah ada keputusan pemerintah membatasi

tinggi bangunan pemerintah menjadi 8 lantai sehingga mengubah konfigurasi bangunan menjadi 3 blok + auditorium (4 blok) dengan luas total 27 ribu meter persegi, 30% lebih kecil dari rencana awal

Lebih lanjut dalam *web* itu dikatakan, pembangunan gedung mulai 10 Juni 1981 dan rampung Desember 1985. Gedung diresmikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat (Menkokesra) H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, 19 Agustus 1985. Pembangunan gedung bergaya internasional ini menghabiskan biaya Rp 10,6 miliar, nilai uang pada masa itu. Pembangunan gedung ini diharap mampu untuk menampung pegawai kementerian yang pada saat itu semakin bertambah.

Sebelum di Lapangan Banteng, Kementerian Agama sebenarnya memiliki gedung yang letaknya juga sangat strategis, yakni di Jl. Thamrin, Jakarta. Tak jauh dari

pusat perbelanjaan Sarinah. Pada masa Orde Lama, pemerintahan Presiden Soekarno membangun kantor Kementerian Agama di sini. Gedung dibangun mulai 13 Desember 1958 dan selesai 1962. Gedung yang memiliki empat lantai itu diresmikan oleh Menteri Agama Saifuddin Zuhri, 1 Mei 1963.

Oleh karena semakin banyak hal yang diurus dan semakin banyaknya pegawai, gedung itu tidak bisa menampung berbagai aktivitas yang ada sehingga dibangunlah gedung di Lapangan Banteng. Gedung lama di Jl. Thamrin itu hanya difungsikan untuk inspektorat jenderal.

Meski kantor pusat Kementerian Agama

Bentuk belah ketupat tersebut diharapkan bisa menjadi *tetenger* kawasan Thamrin, yang menjadi semakin penting dengan lokasinya yang bersebelahan dengan kantor Bank Indonesia.

Lebih lanjut diceritakan, hal yang sama dijabarkan oleh mantan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat yang mengatakan bahwa bentuk gedung yang dibingkai bentuk belah ketupat tersebut melambangkan kerukunan, kesatuan dan persatuan umat beragama Indonesia. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, lantai 17-20 yang lebih sempit dan lebih tinggi jarak lantai ke plafonnya memiliki penerangan yang jauh

terbangunnya kerukunan umat beragama,” ujarnya. Bahrul Hayat berharap, mudah-mudahan simbol ini terus menjadi spirit yang dipegang oleh aparaturnya.

Gedung ini memiliki simbol yang kedua, secara khusus dijadikan simbol dari *prophetic mission* atau misi kerasulan. Dalam penuturannya, lantai 20 gedung ini adalah lantai khusus. Dan, bila dicermati mendalam dan kaca digeser lebih ke dalam dengan ruangan yang berbeda. Bila malam-malam tertentu, lantai 20 akan lebih terang dari lantai lainnya, ketika di lain di kota ini dipadamkan.

“Kami ini kementerian agama memberi cahaya bagi lingkungan, menjadi penerang bagi bangsa, kami ingin kementerian agama memberi *the light of religiosity* atau cahaya teligus bagi bangsa Indonesia melalui bidang pengabdian dalam pembinaan umat. Rangkaian simbol itu menjadi bagian spirit kita,” tuturnya. “Kami akan mengenang gedung ini dari jauh sebagai dua gedung menjadi kebanggaan kami yang turut serta bersama membangun kementerian ini,” tambahnya.

Saat ini Kementerian Agama sudah memiliki gedung yang mapan. Di awal-awal, kementerian ini berdiri, kantor yang ada berpindah-pindah. Dari sumber yang sama diceritakan, dalam masa revolusi fisik dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, kantor Kementerian Agama ikut pindah ke Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi pada saat itu disebut sebagai “kementerian revolusi”, sebutan ini disematkan sebab ketika awal dibentuk, Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946 berkantor di Yogyakarta.

Rasjidi mengeluarkan Maklumat Kementerian Agama No 1 tanggal 14 Maret 1946 yang menyatakan, alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama di Jalan Bintaran No. 9 Yogyakarta. Dua bulan kemudian, tepatnya Mei 1946, kantor kementerian ini pindah ke Jl. Malioboro No. 10. Kantor ini tersedia berkat jasa baik tokoh Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berada di Lapangan Banteng namun bukan berarti gedung di Jl. Thamrin dimangkrakkan. Pada tahun 2007 gedung itu direnovasi sebab sudah tak memenuhi kelayakan dan dibangunlah gedung baru yang memiliki susunan sebanyak 20 lantai. Pembangunan gedung baru di Jl. Thamrin ini pada masa Menteri Agama Maftuh Basyuni.

Dalam *setiapgedung.we.id*, diceritakan konsep desain gedung baru Kementerian Agama di Jl. Thamrin mengikuti pendahulunya di Lapangan Banteng, yaitu memanfaatkan ciri khas arsitektur Islam, dengan penerapan tropikal. Hal ini bisa dilihat dari pemakaian elemen belah ketupat yang menjadi bagian integral dari seni Islam, yang juga berfungsi mengurangi paparan cahaya matahari.

lebih terang dari gedung di sebelahnya, menyimbolkan cahaya religiusitas.

Dalam *kemenag.go.id*, Bahrul Hayat mengungkapkan, ada dua simbol yang disematkan khusus di gedung Kementerian Agama yang berada di Jl. Thamrin. Bila dari jauh gedung akan terlihat seperti dibingkai. Kami sampaikan ke menteri agama saat itu bahwa kami ingin gedung ini jadi simbol kesatuan dan persatuan umat, dan oleh karena itu pula diusulkan kepada Menag agar gedung ini dihuni oleh seluruh ditjen bimas-bimas keagamaan dan pusat kerukunan umat beragama.

“Kami ingin Kementerian Agama menjadi pembawa spirit terhadap terbangunnya kerukunan bangsa ini dan secara khusus





# Mereka yang Pernah Menjadi Menteri Agama

Sosok menteri agama dalam sejarah perjalanan bangsa sangat beragam, ada yang dari NU, Muhammadiyah, politisi, militer, birokrat, akademisi, dan latar belakang lainnya. Mereka sosok yang luar biasa. Mereka adalah pembimbing umat berbagai agama. Berikut beberapa sosok yang pernah menjadi menteri agama.

## Fathurrahman Kafrawi Seribu Langkah dalam Waktu Singkat

Fathurrahman Kafrawi lahir di Tuban, Jawa Timur, 10 Desember 1901. Ia menjadi menteri agama dalam rentang waktu 2 Oktober 1946 - 26 Juli 1947 atau dalam masa Kabinet Syahrir III. Walau terbilang singkat tetapi banyak hal yang dilakukan oleh Fathurrahman, seperti membenahi struktur organisasi, memperbaiki peraturan yang terkait dengan Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang ditetapkan dalam UU. No. 22 Tahun 1946. Aturan yang baru menertibkan posisi penghulu, modin, dan sebagainya.

Dalam hal pendidikan, meski pada masa itu Kementerian Agama berhasil memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum, tetapi nilai mata pelajaran agama tidak memengaruhi bisa tidaknya anak naik kelas. Pada masa itu nilai agama dianggap tidak penting. Berkat usaha Fathurrahman, pendidikan agama bersama dengan pendidikan budi pekerti wajib diberikan di sekolah umum.

Dalam *Wikipedia* disebut, kontribusi Fathurrahman ketika menjabat sebagai menteri agama, yakni tentang Maklumat Kementerian Agama No. 5 Tahun 1947. Keputusan ini muncul untuk menengahi permasalahan yang muncul setiap tahun, yakni tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan. Fathurrahman menyadari hal tersebut, dan mengeluarkan kebijakan yang sampai sekarang masih rutin diselenggarakan oleh Kementerian Agama. \*

## Teuku Muhammad Hasan Tokoh Muhammadiyah Juga Tokoh Taman Siswa

Teuku Muhammad Hasan lahir 4 April 1906 di Sigli, Aceh. Ia merupakan menteri agama dengan masa jabatan 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949. Setelah selesai kuliah di



Belanda, pada tahun 1933, ia kembali ke Indonesia. Dalam biografi disebutkan, ia bergabung dengan Muhammadiyah sebagai konsul di bawah pimpinan R.O. Armadinata. Berkat usaha dirinya dan tokoh yang lain, Muhammadiyah berkembang di Aceh. Pada masa akhir pemerintahan Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di Aceh ada delapan.

Dia juga aktif di Perguruan Taman Siswa. Ia mendirikan Taman Siswa di Kutaraja, 11 Juli 1937. Di Taman Siswa di Aceh, ia menjadi ketua. Saat itu, dia mengirim utusan untuk menemui Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Hasan berpesan lewat utusannya agar Taman Siswa memperluas jaringannya dengan mendirikan cabang di Aceh. Berkat jalinan kerja sama ini, Taman Siswa di Kutaraja mampu membuka berbagai tingkatan pendidikan, yakni Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara, dan Taman Dewasa.\*

## Abdul Wahid Hasjim Tokoh Disegani di NU

Abdul Wahid Hasjim lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914. Ia merupakan menteri agama dengan masa jabatan, 20 Desember 1949 – 6 September 1950. Dia juga pernah tercatat sebagai Menteri Negara Urusan Agama I dengan masa jabatan, 30 September 1945 – 14 November 1945. Wahid Hasjim merupakan tokoh NU yang disegani. Ayahnya adalah Mohammad Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh pendiri NU. Salah satu anak dari Wahid Hasjim adalah Presiden ke-empat Indonesia Abdurrahman Wahid yang juga pernah menduduki sebagai Ketua Umum PBNU.

Dalam *Wikipedia* disebut, Wahid Hasjim turut mengukir sejarah bangsa di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengawali kiprah kemasyarakatan di usia muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 ia membuat gebrakan baru

dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, dia memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda. Itulah madrasah nidzamiyah. \*

### Saifuddin Zuhri Bapak Diminta Menghadap Presiden

Saifuddin Zuhri, lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 1 Oktober 1919. Ia bisa dikatakan merupakan menteri agama terlama, sebab menjabat dari Kabinet Kerja III, 6 Maret 1962-13 November 1963. Kabinet Kerja IV, 13 November 1963-27 Agustus 1964. Kabinet Dwikora I, 27 Agustus 1964-22 Februari 1966. Kabinet Dwikora II, 24 Februari 1966-27 Maret 1966; dan Kabinet Ampera I, 28 Juli 1966-11 Oktober 1967.

Dalam *Wikipedia* diceritakan, kisah pengangkatannya sebagai menteri agama, pada tanggal 17 Februari 1962, tepat pada hari Jum'at, ia diminta menghadap Presiden Soekarno ke Istana Merdeka. Banyak teka-teki memenuhi benaknya ketika dia memenuhi panggilan Soekarno. Apakah karena urusan DPR atau DPA? Apa urusan NU? Atau surat kabar Duta Masyarakat? Ternyata dalam pertemuan itu Soekarno meminta dirinya menjadi menteri agama menggantikan Wahib



Abdul Malik Fajdar

Wahab yang mengundurkan diri.

Keinginan Soekarno tidak serta merta diiyakan. Saifuddin Zuhri lebih dahulu *sowan* kepada tokoh besar NU, seperti KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid. Dirinya juga *sowan* ke Wahib Wahab dan mencari tahu kenapa Soekarno memilihnya sebagai menteri agama. Tokoh-tokoh NU yang ditemuinya itu mendukung Saifuddin Zuhri sebagai menteri agama.

Pada masa dirinya menjadi menteri agama, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berkembang pesat. IAIN menjadi ada di sembilan provinsi yang di mana di masing-masing provinsi memiliki cabang di kabupaten. \*

### Abdul Malik Fajdar Rektor UMM Penuh Gebrakan

Abdul Malik Fajdar lahir pada 22 Februari 1939 di Yogyakarta. Ia merupakan menteri agama dengan masa jabatan 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999, di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Pria yang lebih akrab disebut Malik Fajdar itu merupakan tokoh Muhammadiyah. Ia pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Dalam *Kompas.com*, 08/09/2020, diceritakan di bawah kepemimpinannya, UMM berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Malang. Banyak gebrakan yang dilakukan sering menjadikan bumerang. Misalnya, saat memproklamasikan UMM menjadi kampus terbuka. Mulai dari cewek bercelana jins sampai yang bercadar, dari mahasiswa muslim maupun bukan muslim, diperbolehkan masuk kampus tersebut.

Gebrakan itu membuat dia dituduh sekuler serta sengaja mencampakkan identitas muslim dan khususnya Muhammadiyah. "Saya menerima kritik itu, tapi jangan saya diseret kepada formalisme kosong. Islam jangan dipersempit dengan sekadar jilbab, gaya kerab-araban," kata Abdul Malik kala itu.

Ia memiliki obsesi besar menjadikan UMM tumbuh menjadi kampus bertaraf internasional, seperti universitas di AS. Misalnya Harvard, Chicago, George Washington, Barrier College, atau Christian University of Colorado. Tahapan ke arah sana dimulai dengan mendirikan Pusat Studi Keislaman dengan harapan orang luar negeri yang mau mempelajari keislaman, khususnya di Asia Tenggara, bisa ke Indonesia.

Dalam keadaan genting, di tahun 1998, Malik Fajdar merupakan salah satu tokoh yang diundang oleh Presiden Soeharto di Istana Negara untuk dimintai pendapat.

Pria lulusan IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, itu dalam hidupnya juga pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada masa Kabinet Gotong Royong. Tokoh Muhammadiyah ini pada 19 Januari 2015 dipilih Presiden Joko Widodo sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). □



Presiden Soekarno menerima Saifuddin Zuhri

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWG/dari berbagai sumber



## Abdul Hafid

Ketua FKDM Jaksel

### Empat Pilar Menjaga Bangsa dari Perpecahan

**S**AYA sebenarnya sangat khawatir dengan perkembangan zaman yang saat ini makin gencar. Khawatir nilai-nilai luhur yang ada dalam diri dan menjadi kebiasaan bangsa Indonesia terkikis. Lihat saja, di media sosial banyak sekali informasi yang berseliweran.

Selain itu, soal suhu politik yang panas sehingga banyak rakyat yang menjadi terserak berkubu-kubu. Sebelah sana memilih ini dan di sebelah situ memilih lainnya. Hal ini jika tidak kita waspadai akan berdampak negatif karena perbedaan.

Bersukurlah MPR gencar melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR yang kembali menyentak kita semua untuk selalu kembali kepada nilai luhur bangsa. Karena, menurut saya, memang permasalahan bangsa yang saya sebutkan tadi akan selsai jika kita semua berpegang teguh dan mengamalkan Empat Pilar. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Iwan Abdulatif

Presiden Ikatan Pengemudi Bentor Gorontalo

### Fokuskan Pancasila ke Sisi Penerapan

**S**ELURUH rakyat Indonesia sudah sangat memahami bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara dan kita semua bangga akan hal itu, termasuk para pengemudi Bentor. Bagi kami Pancasila adalah harga mati. Sebisa mungkin kami akan terapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan Pancasila adalah yang kami harapkan, sebab isi Pancasila sangat bagus tapi terkadang meleset dari yang kita harapkan. Implementasi Pancasila dari elemen masyarakat, terutama pemerintah dan orang-orang besar kepada rakyat kecil seperti kami sangat besar kami harapkan.

Terutama implementasi sila ke-5, yakni bermakna keadilan untuk semua. Keadilan



dalam segala bidang seperti ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha, hukum, politik dan lainnya juga kesehatan. Jangan sampai Pancasila hanya selesai dalam tataran teori dan diskusi di ruang-ruang dingin ber-AC saja.

Jadi, kami mendorong agar Pancasila ini saat ini dan seterusnya harus difokuskan pada sisi penerapan di lapangan agar terasa dampaknya bagi rakyat kecil. Jika memang sudah dilaksanakan secara baik mohon untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan, tapi jika belum maka mulai dari sekarang mulailah untuk berbuat dan bertindak agar Pancasila tidak hanya sekedar pajangan tapi mampu melindungi segenap bangsa Indonesia. □

DER

Normi, Relawan PMI

# Mempersembahkan **Segalanya** Bagi *Kerja-kerja Kemanusiaan*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**O**RANG bijak selalu memberi nasihat, seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan dengan ikhlas. Itulah yang dirasakan oleh Normi (23), relawan Palang Merah Indonesia (PMI) dari Desa Panjaratan RT 02/ RW 01 Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat menjalankan tugas kemanusiaan yang diembannya, Normi berusaha melaksanakan dengan penuh ikhlas, tanpa beban, sehingga yang tampak dari mimik wajah dan gestur tubuhnya adalah kebahagiaan.

Lebih dari tiga tahun terakhir, Normi sudah diterjunkan di puluhan lokasi bencana alam di Tanah Air. Saking banyaknya lokasi bencana di jamahnya sampai-sampai dara kelahiran Panjaratan, 14 April 1998, ini tak dapat mengingatnya. Dan, Normi sendiri tak ingin mengingatnya. Karena, menurut dia, amal baik itu tak perlu diingat-ingat. Yang pasti, sebagian lokasi bencana itu ada sekitar daerahnya, sebagian lagi di luar daerah, bahkan beda provinsi.

Selama itu banyak pengalaman, kesan hingga suka dan duka dialami. Tetapi di setiap periode kepesertaannya dalam aksi kemanusiaan, anak keempat pasangan Sar'iyah dan Ramlani (alm) itu selalu diakhiri dengan rasa bahagia yang penuh haru. Bahagia, lantaran bisa meringankan beban

manusia lain, namun haru karena harus berpisah dengan orang-orang sempat dibantunya. Rasa haru juga harus dirasakan karena berpisah dengan relawan-relawan lain yang memiliki hati mulia.

Dari berbagai lokasi dan jenis bencana alam yang sudah disambungnya, Normi yang biasa disapa Nor atau Mi, akan selalu ingat pada gempa bumi dan tsunami di Pulau Sulawesi pada September 2018. Bencana yang disusul dengan likuifaksi itu bagi Normi adalah peristiwa yang sangat dahsyat.

"Itu pertama kali saya ikut serta dalam aksi kemanusiaan di luar provinsi. Di sana saya juga bisa merasakan langsung getaran

akibat gempa, sesuatu yang sebelumnya hanya saya dengar dari cerita orang lain. Selain itu, saya mendapatkan wajah-wajah masyarakat yang sangat tulus menerima kami, dan mereka pun menurut apa saja yang kami sampaikan," cerita Nor yang alumni Program Belajar Paket C kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Pada peristiwa bencana alam Palu, Normi bertugas di bagian Psikososial Support Program (PSP). Ia banyak membantu anak-anak menghilangkan trauma akibat bencana, serta memulihkan kondisi psikologi pasca gempa, tsunami juga likuifaksi. Pekerjaan tersebut dia lakukan selama satu bulan lamanya.







Setiap hari, Normi mengajak serta anak-anak yang trauma akibat bencana untuk bermain dan belajar. Ia juga mendampingi mereka untuk melupakan kepedihan akibat ditinggal orang-orang tercinta. Serta menunjukkan jalan menatap masa depan.

“Banyak anak-anak yang kehidupannya berubah menjadi sangat mengkhawatirkan. Wajah-wajah mereka diliputi kesedihan dan ketakutan. Tetapi mereka bisa menerima kehadiran kami dengan sangat baik tanpa secuilpun ada kecurigaan, dan itu membuat saya semakin kuat untuk melanjutkan aksi kemanusiaan ini,” ujar Normi.

### Banjir Bandang

Selain gempa bumi dan tsunami di Sulawesi, peristiwa lain yang tidak gampang lepas dari ingatan Normi adalah banjir Kalimantan Selatan, Januari 2021. Pada bencana tersebut, awalnya Normi ditugaskan selama satu minggu untuk membantu menyiapkan kebutuhan pokok korban penyintas banjir melalui program dapur umum.

Malam itu adalah hari terakhir Normi bertugas. Esok hari dia akan pulang karena beban yang ditugaskan kepadanya sudah rampung. Semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan selama satu minggu terakhir sudah dia kemas. Seperti peribahasa mengatakan, manusia hanya bisa berencana tetapi Tuhan yang menentukan.

Malam itu Normi baru saja terlelap, ketika tiba-tiba banyak orang menjerit, berteriak meminta pertolongan. Saat Normi terbangun, suasana di sekelilingnya sudah gelap gulita, karena listrik padam. Tak lama berselang, Normi baru sadar, banjir kembali terjadi bahkan dalam volumenya lebih besar.

“Rumah Pak Camat yang kami jadikan posko tak luput dari terjangkit banjir hingga tinggi selutut orang dewasa. Kami semua bergegas



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di tempat itu. Esoknya, saya dengar kabar bahwa rumah orangtua saya di Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, juga terkena banjir,” kata Normi.

Pikiran dan perhatian Normi sempat terpecah, ia bimbang mana yang harus didahulukan. Pulang untuk membantu memberi pertolongan dan evakuasi keluarga, saudara dan tetangga. Atau tetap memberikan pertolongan kepada para penyintas banjir yang sudah dibantunya dalam waktu seminggu terakhir.

“Akhirnya saya mantap tidak pulang dan meneruskan memberi bantuan kepada para korban banjir yang jumlahnya semakin banyak,” kata Normi lagi.

Normi sendiri bergabung sebagai relawan PMI empat tahun terakhir. Bakat dan kecintaannya terhadap persoalan kemanusiaan dipupuk oleh saudara-saudara yang juga terlibat dalam dunia yang sama. Hanya saja, mereka bernaung di bawah lembaga-lembaga yang

berbeda.

Sebelum mencatatkan diri sebagai relawan PMI, Nor sempat berhubungan dengan beberapa kegiatan di PMI. Sejak itu timbul rasa suka dan cintanya kepada PMI. Apalagi, di lembaga tersebut, Nor merasa lebih dihargai, didengarkan, dan dibutuhkan meski pendidikannya hanya sebatas Paket C.

“Saya menemukan wadah yang sesuai dengan jati diri saya sendiri. Saya merasa dihargai dan dibutuhkan, sehingga mudah bagi saya untuk bergabung dan menjadi relawan di PMI,” kata Normi lagi.

Kini, pilar-pilar kemanusiaan sudah menancap kokoh di lubuk hatinya. Normi, bertekad untuk terus memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Selama jiwa masih di badan, selama itu ia akan terus membantu sesama. Biarpun peluh dan kekhawatiran selalu membayang, namun Nor akan terus menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kerja kemanusiaan. □

MBO

UIN Syarif Hidayatullah

# Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.

“Selain menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Senin (25/10/21).

Turut hadir jajaran rektorat UIN Syarif Hidayatullah, antara lain Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Arief Subhan, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Ikhwan, Sub Bagian Bina Bakat dan Minat Mahasiswa Arief Arianto, dan Ketua Senat Mahasiswa Muhammad Sahrul.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, hasil survei MEDIAN yang dilakukan pada 30 Mei - 3 Juni 2021, memperlihatkan sebanyak 49% responden berpandangan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa indikatornya adalah masih maraknya kasus korupsi (25%), kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan (15,4%), belum tegaknya hukum yang berkeadilan (3,6%), serta diskriminasi dan intoleransi (2,7%).

“Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, dari sekitar 1.298 koruptor yang ditangkap KPK, sebanyak 86% atau sekitar 1.116 koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi. Sangat ironis. Bisa jadi hal ini tidak lepas karena ketiadaan kurikulum Pancasila sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan dari mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. MPR RI bersama BPIP mendesak Kemendikbud untuk memasukkan kembali Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, hasil survei Komunitas Pancasila Muda dengan responden kaum milenial dari 34 provinsi yang dilaksanakan pada Mei 2020, mencatat masih ada 19,5% responden yang merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila relevan dalam kehidupan mereka. Pancasila dianggap sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya.

“Padahal saat ini bangsa Indonesia telah menginjakkan kaki pada periode bonus demografi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% atau 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif yang didominasi kaum muda, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menjelaskan, fenomena lain dari pandemi moral yang dihadapi adalah hadirnya efek samping dari kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Hingga akhir Maret





2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8%, di mana jumlah pengguna internet telah mencapai 212,35 juta user. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 85,62% pemuda Indonesia adalah pengguna aktif internet.

“Tingginya angka penetrasi internet

generasi muda ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai gambaran, menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2018, sekitar 90,61% generasi muda menggunakan internet hanya untuk bermedia sosial. Menjadikan literasi teknologi yang mereka kuasai sebagai sebuah

kemubaziran,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, tingginya angka penetrasi internet juga tidak diimbangi dengan tingkat ‘keadaban’ yang memadai. Hasil riset Digital Civility Index yang dirilis tahun 2021 menyebutkan, etika dan tingkat keadaban warganet di Indonesia semakin rendah. Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Faktor yang memperburuk skor Digital Civility Index Indonesia adalah berita bohong (hoax) dan penipuan di internet (47%), ujaran kebencian (27%), serta diskriminasi (13%).

“Lebih buruk lagi, tingginya tingkat penetrasi internet juga berbanding lurus dengan peningkatan kejahatan siber. Sebagai perbandingan, pada periode Januari hingga Agustus 2019, jumlah serangan siber di Indonesia mencapai 39,3 juta. Sedangkan pada periode Januari hingga Agustus 2021, naik drastis menjadi hampir 190 juta serangan siber. Artinya, pada masa pandemi Covid-19, kejahatan siber naik lebih dari 4 kali lipat,” pungkas Bamsoet. □





ToT Empat Pilar MPR

# Pancasila Pondasi Membangun Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia adalah pondasi untuk membangun bangsa sehingga sangat perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.

Hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, di era modernitas seperti sekarang ini di mana kemajuan teknologi berbasis internet sangat cepat memasuki ruang-ruang pribadi setiap manusia, mengakibatkan informasi apapun sangat mudah diperoleh, termasuk yang negative, antara lain ajaran radikalisme dan ideologi-ideologi baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Kekhawatiran itu, lanjut Fadel Muhammad, membuat seluruh elemen masyarakat, termasuk MPR RI, berupaya keras mencari solusi untuk membentengi rakyat Indonesia, terutama generasi muda dari serbuan pemikiran dan paham negatif tersebut.

“Jawabannya adalah Pancasila. Kita semua harus kembali mengokohkan diri sebagai anak bangsa yang setiap ucapan, pikiran dan perbuatannya harus sesuai dengan Pancasila,” katanya, saat menjadi narasumber utama dalam acara Training of Trainers (ToT) Empat Pilar MPR RI bertema ‘Implementasi dan Penanaman Nilai-Nilai Empat Pilar MPR RI Melalui Wawasan Kebangsaan’ di Ballroom Horison Bogor Icon

Hotel and Convention, Bogor, Jawa Barat, Ahad (21/11/2021).

Hadir sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Garuda Muda Indonesia (GMI) ini adalah anggota MPR dari Kelompok DPD RI, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni dan Arniza Nilawati, SE., MM., serta para mahasiswa yang tergabung dalam GMI sebagai peserta.

Terkait upaya pemahaman Pancasila, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini mengungkapkan bahwa MPR adalah salah

satu lembaga tinggi negara yang sangat cepat merespon dan melakukan tindakan nyata untuk melakukan upaya itu, melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) kepada masyarakat.

“Kami para pimpinan dan anggota MPR melakukan tugas sosialisasi itu dengan berbagai metode, salah satunya ToT, ke berbagai daerah dengan target peserta dari berbagai kalangan, antara lain pelajar, mahasiswa, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, sampai ke masyarakat umum,”







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ungkapnya.

Fadel Muhammad menggaris bawahi bahwa memahami nilai luhur bangsa sampai ke implementasi akan menumbuhkan nasionalisme yang sangat kuat. Jika terus dijaga dan dirawat akan menumbuhkan daya kreatif yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah global.

Hal tersebut sudah dibuktikan Fadel Muhammad saat dirinya lulus kuliah dan merintis usaha bersama teman-temannya. "Kami membuka perusahaan, yaitu PT. Bukaka dengan niat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa anak negeri mampu membuat sesuatu yang dibutuhkan dunia, hadirilah produk kami Garbarata. Maka dari

itulah saya tekankan sekali lagi, kalian anak-anak muda jangan anggap remeh upaya-upaya pemahaman Pancasila ini," ujarnya.

Fadel melihat, generasi muda saat ini semestinya bisa lebih berdaya inovasi dan kreatif yang lebih kuat dibanding masa mudanya dahulu karena faktor kemajuan zaman. "Di dalam dada kalian hanya butuh karakter kebangsaan yang mengakar tajam tak tergoyahkan. Di tambah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya yakin kalian bisa mengangkat nama negara jauh lebih tinggi. Untuk itu, saya mendorong kalian untuk lebih bersemangat mendalami Empat Pilar MPR RI, demi masa depan kita semua," katanya.

Di sesi akhir, Fadel Muhammad berkesempatan menutup secara resmi rangkaian acara ToT. Dalam sambutan penutupnya, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini berharap, agar selesai mengikuti ToT ini para peserta menjadi kepanjangan tangan MPR untuk memberikan pemahaman Empat Pilar kepada lingkungan masing-masing baik di keluarga, lingkungan, pertemanan dan kampus. □



## Sosialisasi Empat Pilar di UMS

# Tokoh Muhammadiyah Berpartisipasi Aktif dalam Perumusan Pancasila



**W**AKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk bagian Pembukaan. Karena di dalam Pembukaan terdapat dasar dan ideologi negara. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat cita-cita berdirinya NKRI. Karena itu usul perubahan UUD NRI Tahun 1945, sesuai Pasal 37 UUD tidak termasuk bagian Pembukaan.

Selain bagian Pembukaan, perubahan juga tidak berlaku bagi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sudah menjadi harga mati. Sesuai perjalanan dan pengalaman sejarah, negara kesatuan merupakan satu-satunya bentuk negara yang paling sesuai dengan keberagaman Indonesia. Bukan serikat, federal, monarki, apalagi sistem kerajaan. Karena itu, NKRI harus dipertahankan sesuai Pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 bahwa bentuk negara NKRI tak bisa diubah-ubah.

“Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tetap terbuka. Tetapi, ada ketentuan dan batas-batasnya. Dan, untuk mengubah UUD diperlukan persyaratan yang rumit dan tidak mudah dipenuhi,” jelas HNW, begitu Hidayat

Nur Wahid biasa disapa.

Pernyataan itu disampaikan HNW saat menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pengurus dan anggota Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah. Acara tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ahad (31/10/2021). Ikut hadir pada acara tersebut anggota MPR Fraksi PKS Drs. Hamid Noor Yasin, MM.; Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah Drs. KH. Tafsir, M.Ag.; Ketua Aisyiyah Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag., dan Rektor UMS, Prof. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.

Bagi warga Muhammadiyah, kata Hidayat, Empat Pilar bukanlah barang baru. Karena di kalangan anggota organisasi yang didirikan KH. Ahmad Dahlan, Empat Pilar sudah menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan roda organisasi.

“Ulama dan tokoh-tokoh Muhammadiyah berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan Pancasila, dimulai dari BPUPKI, Panitia Sembilan, hingga PPKI. Mereka juga mau mengalah, menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta semata mata demi kepentingan yang lebih besar. Yaitu, berdiri tegaknya NKRI,” tutur Hidayat.

Bagi warga Muhammadiyah, Sosialisasi Empat Pilar berfungsi sebagai pengingat agar tidak melupakan dasar dan ideologi negara. Bukan membawa maksud untuk menggurui.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi PKS Drs. Hamid Noor Yasin, MM., mengingatkan, kerelaan umat Islam memenuhi permintaan masyarakat Indonesia Timur untuk menghilangkan tujuh kata dalam piagam Jakarta adalah sikap mau mengalah yang terpuji. Apalagi, dengan cara itu, masyarakat Indonesia Timur tetap bersatu di bawah NKRI.

“Seperti pada peristiwa Piagam Madinah, Piagam Jakarta memiliki makna pengorbanan umat Islam untuk kepentingan yang lebih besar. Yaitu, tetap tegaknya NKRI. Karena di Indonesia Kebhinnekaan adalah satu keniscayaan yang tidak dapat dihilangkan,” kata Hamid Noor Yasin.

Pada kesempatan itu, Hamid mengajak warga Muhammadiyah tampil pada kontestasi kepemimpinan nasional untuk mengurai karut marut persoalan bangsa. Jangan sampai kesempatan untuk memimpin bangsa ini diambil orang lain yang memiliki rekam jejak buruk, dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi serta kelompoknya saja. □

MBO



## Diskusi Publik di Unpam

# Menggugat Permendikbud Ristek No.30/2021

Aturan Mendikbud Ristek dirasa membikin keresahan, untuk itu PKS gelar diskusi publik. Aturan yang ada disebut berpotensi menimbulkan seks bebas.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ERMENDIKBUD Ristek No 30 Tahun 2021 perlu direvisi atau dicabut”, ujar anggota MPR dari Fraksi PKS, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin SP., MM. Berbicara sebagai penanggap dalam Duskusi Publik Fraksi PKS-MPR’ di Universitas Pamulang (Unpam), Kota Tangerang Selatan, Banten (23/11/2021), Andi Akmal menjelaskan bahwa PKS menggugat frasa “tanpa persetujuan korban” pada Pasal 5 Ayat 2 Huruf L dan M dari peraturan itu.

Karena, lanjut Andi Akmal, peraturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi serta banyak menimbulkan sikap kontra. Dia berani mengatakan demikian, sebab peraturan tersebut secara langsung mengampanyekan kebebasan seks dengan dalih suka sama suka.

Bila peraturan itu diberlakukan, menurut Andi Akmal, tidak hanya mengkhawatirkan adanya seks bebas namun juga mendorong tumbuh subur nya keberadaan LGBT. Untuk itu, dengan tegas dia menolak Permendikbud

Ristek tersebut. “Penolakan ini harus disuarakan,” tuturnya. “Aspirasi dari masyarakat tentang masalah ini perlu didengar”, tambahnya.

Penolakan serupa juga disuarakan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS di MPR, Dr. H. Almuzzammil Yusuf, MSi. “PKS menyatakan

perang terhadap kekerasan seksual, namun jangan sampai peraturan tersebut ditumpangi oleh penumpang gelap dengan frasa ‘tanpa persetujuan korban’. Frasa tersebut bisa menimbulkan seks bebas,” ungkap Almuzzamil lebih lanjut, “Masalah ini akan selesai bila menteri terkait mau





Andi Akmal Pasluddin



Almuzzamil Yusuf

melakukan revisi peraturan tersebut.”

Dalam kesempatan tersebut, Almuzzamil menceritakan bagaimana bahayanya aturan-aturan yang mengandung nilai-nilai seks bebas itu. Dia menunjuk contoh di salah satu negara Barat, bagaimana orangtua di sana tidak bisa melarang anaknya melakukan hubungan seks bebas, sebab tidak adanya aturan yang mencegah. “Sangat memprihatinkan”, tuturnya.

Untuk mengkaji secara ilmiah, dalam diskusi bertema: ‘Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Perspektif UUD NRI tahun 1945’ itu menghadirkan narasumber dari para pakar, seperti Dr. Bachtiar SH., MH.;

Dr. Joko Riskiyono, SH., MH.; dan Dr. Neng Djubaedah SH., MH. Dan, hadir Rektor Unpam Dr. E. Nurzaman A.M., MM., MSi.; Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. (HC) Drs. H. Darsono; dan Wakil Rektor IV Unpam, Dr. Dewi Anggraeni SH., MH.

Dalam sambutannya Rektor Unpam, Nurzaman, menuturkan, suatu kehormatan kampusnya kedatangan tim dari MPR. “Secara prinsip kampus Unpam menerima aturan tersebut. Karena, peraturan tersebut sebagai upaya untuk memberi perlindungan bagi masyarakat, namun dari segi narasi tidak mewakili masyarakat sehingga menimbulkan kontra,” kata

Nurzaman. Untuk itulah, dalam diskusi ini perlu digali masalah-masalah yang ada dan bagaimana seharusnya peraturan tersebut dibuat. Dia berharap, diskusi ini bisa bermanfaat.

Sebelumnya, Almuzzamil memuji Unpam mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mampu. Apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang juga memiliki kampus di Serang, Banten, itu adalah sebagai upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. “Yang dilakukan Unpam merealisasikan pembangunan sumber daya manusia”, tutur Almuzzamil. □

AWG



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



# Esensi Kemerdekaan adalah Keadilan Sosial



**K**ETUA Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena, mengatakan bahwa esensi kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Agar harapan tersebut bisa terwujud maka kader Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) harus berjuang memenangkan Partai Golkar dalam pemilu, dan memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Idris Laena saat membuka dan memberikan pengantar pada acara Training of Trainers (ToT) Empat Pilar MPR yang diselenggarakan oleh Gema MKGR bekerjasama dengan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Hotel Santika, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/11/2021).

Dalam uraiannya, Idris Laena mengatakan, betapa pentingnya generasi muda memahami nilai-nilai kebangsaan yang Indonesia miliki, yakni Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, agar generasi muda MKGR dapat menyebarluaskan kepada generasi muda lainnya.

Lebih lanjut Idris Laena menguraikan lebih dalam lagi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya adalah seputar esensi kemerdekaan. Menurut Idris Laena, sesungguhnya esensi kemerdekaan Indonesia itu adalah

untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadilan sosial.

Buktinya, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kata-kata keadilan diulang hingga lima kali, yaitu pada alinea pertama berbunyi: 'Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.

Kemudian pada alinea kedua berbunyi: 'Dan, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur'.

Lalu pada alinea keempat berbunyi:



'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.'

Berikutnya, sambung Idris Laena, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Acara ToT itu berlangsung dengan lancar. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, beberapa tokoh Partai Golkar, antara lain tokoh senior dan juga Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Dr.Ir Akbar Tanjung, Waketum DPP Partai Golkar Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., Sekretaris FPG MPR Ferdiansyah, SE., MM., Ketua Gema MKGR Yudisaputra Betaubun, dan akademisi Dr. Alfian Alfian. □

## Diskusi Empat Pilar MPR

# Para Kontestan Hendaknya Teladani Semangat Juang Pahlawan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa walaupun tahun politik 2024 masih tiga tahun lagi, namun gaungnya sudah terasa sekarang ini. Antara lain, dengan munculnya nama sejumlah kandidat calon karena dukungan dari berbagai pihak untuk maju di Pilpres 2024, serta mulai gencarnya hadir berbagai spanduk dan baliho dari beberapa figur tertentu di berbagai daerah.

“Menurut saya, fenomena tersebut wajar-wajar saja asal tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan mengenai pemilu dan pilpres,” katanya, dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Menebar Nilai Kepahlawanan dalam Kontestasi Politik Nasional’ yang diselenggarakan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR bekerjasama dengan Koordinatariat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Hadir dalam acara itu, anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si., dan pakar politik Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., sebagai narasumber, serta para wartawan baik cetak, elektronik dan online sebagai peserta.

Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD perwakilan daerah Gorontalo ini menekankan, yang terpenting harus diperhatikan para calon adalah tujuan mereka maju adalah mumi untuk kepentingan bangsa dan negara, serta ingin mengantarkan rakyat Indonesia menuju kesejahteraan bersama. “Itu yang harus tertanam dalam



Fadel Muhammad



diri para calon kontestan,” tambahnya.

Untuk mencapai itu, lanjut Fadel Muhamad, kontestan politik mesti meneladani karakter para pahlawan bangsa yang sangat luar biasa. Intinya, para calon harus berupaya memiliki kriteria para pahlawan. Kriteria tersebut di antaranya: Pertama, semangat juang yang tinggi. Semangat itu begitu kuat sehingga tidak akan goyah oleh godaan apapun.

Kedua, pengaruh. Para pahlawan bangsa, memiliki pengaruh yang kuat di daerahnya. Dan, itu hanya digunakan untuk tujuan baik mempercepat tujuan bersama, yakni melawan penjajahan dan menuju kemerdekaan. Selanjutnya, ketiga, konsisten. Para pahlawan bangsa sangat konsisten memegang teguh dan menjalankan visi misinya sampai berhasil.

“Kriteria itu yang kita harapkan ada pada diri para kontestan politik nanti. Saya melihat, memang bukanlah hal yang mudah mencari dan menemukan sosok ideal seperti itu. Apalagi kontestasi nanti diprediksi akan sangat kompleks, kompetisinya sangat ketat. Namun, kita semua akan berusaha dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin bisa,” paparnya.

Fadel melihat, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan memiliki calon-calon pemimpin yang kriterianya seperti para pahlawan bangsa. “Malah sebenarnya banyak sekali tokoh inspiratif bagus, terutama dari daerah-daerah. Yang jadi masalah adalah, kita kurang mempromosikan mereka, kurang memberi ruang ke tingkat nasional sehingga



kurang dikenal rakyat. Padahal, kemampuan para tokoh ini sangat bagus. Untuk itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat jeli memerhatikan tokoh-tokoh yang baik dan pantas untuk kemudian diberi ruang dan kesempatan maju membuktikan kapabilitas dirinya,” ucapnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, anggota MPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa dirinya sangat menyetujui bahwa calon kontestan politik, apalagi di tingkat nasional, harus memiliki kriteria ideal para pahlawan bangsa.

“Karena bagi saya, pahlawan itu terminologinya adalah seseorang yang mampu mencurahkan daya dan pikirannya, bahkan jiwanya untuk negara tanpa hitung-hitungan. Bagi pahlawan, berkontribusi untuk negara itu lebih penting. Saya setuju, menemukan

figur seperti itu di era saat ini sangat sulit,” ujarnya.

Untuk itu, Herman berharap agar dalam lingkup luas, sistem politik Indonesia termasuk untuk pemilu dan pilpres mesti dibuka ruang seluasnya, agar siapapun bisa berpartisipasi aktif dan jangan dibatasi, misalnya dengan Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold yang menghimpit, sehingga mempersempit ruang gerak untuk berkiprah.

“Jika sistem politik kita terbuka, maka akan membuka peluang lebih besar bagi tokoh ideal dengan kriteria pahlawan masuk dalam kontestasi. Pada ujungnya, jika terpilih melalui kompetisi yang jujur dan adil akan membawa bangsa ini menjadi negara maju serta mampu berkompetisi dengan negara lainnya,” pungkasnya. □



Siti Zuhro



Herman Khaeron

## Sosialisasi di Tanah Abang

# Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Antara Agama dan Negara



WAKIL Ketua MPR-RI Dr.HM. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara disepakati oleh Bapak-Bapak Bangsa sebagai ikatan legal konstitusional. Kesepakatan menerima Pancasila juga bermakna mengesahkan kokoh kuatnya hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Sehingga upaya untuk menafikan atau membenturkan keduanya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan kenegarawanan.

Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, Bapak-Bapak Bangsa saat menyepakati Pancasila, dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. "Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dinyatakan oleh Bung Hatta sebagai prinsip spiritual yang terus mengilhami dan menerangi. Sedangkan sila kedua hingga kelima memiliki kandungan nilai sosial-ekonomi-politiknya," ungkap HNW saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada keluarga besar PKS di Tanah Abang, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Jadi, lanjut HNW, konstruksi Pancasila yang dimulai dengan nilai spiritual merupakan kesepakatan final para Bapak Bangsa pada

18 Agustus 1945 yang terhimpun dalam PPKI. Anggota yang terhimpun dalam PPKI adalah tokoh-tokoh nasionalis kebangsaan, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Prof Soepomo. Juga nasionalis keagamaan muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Teuku Muhammad Hasan. Serta nasionalis keagamaan non-muslim, seperti J. Latuharhari, GSJ Sam Ratulangi, dan I Goesti Ketoet Poedja.

Kesepakatan para Bapak Bangsa itu tidak hanya diletakkan di Pancasila, namun juga pada batang tubuh UUD 1945, yakni pada Bab XI Pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukti nyata lainnya terkait diterimanya hubungan agama dan negara adalah penggunaan kata serapan dari bahasa arab, yaitu bahasa yang dipergunakan dalam rujukan Agama Islam. Semua itu ada dalam Pancasila sila kedua (adil, adab), sila keempat (rakyat, hikmat, musyawarat, wakil), dan kelima (adil, rakyat). Begitu pula dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 juga ada ungkapan "berkat, rahmat, Allah, rakyat," itu semua serapan dari bahasa Arab.

"Memang bukan berarti negara Indonesia berdasarkan agama tertentu tetapi pasti Republik Indonesia juga bukan negara

sekuler, apalagi atheis/komunis yang anti agama," tegas HNW. Bahkan, dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 'atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa'. Sebuah ungkapan religius pada dokumen politik yang memosisikan Indonesia Merdeka bukanlah dengan semangat sekularisme, liberalisme, apalagi ateisme, komunisme, dan anti agama.

HNW lalu mengutip pernyataan Ketua BPUPK, Dr. Radjiman Wedjodiningrat, Ketua BPUPK, seperti dalam alinea ketiga Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945, dan itu merupakan kesepakatan yang diterima oleh BPUPK pasca sidang mereka yang kedua pada 14 Juli 1945.

Karena itu, menafikan bahkan melarang atau mengkriminalkan hubungan antara beragama dan bernegara serta memojokkan (banyaknya) bahasa Arab sebagai ciri terorisme maupun radikalisme adalah laku melupakan bahkan memanipulasi sejarah. Sikap tersebut memiliki makna menebarkan sikap saling curiga dan bisa jadi pintu besar meretakkan kesetupaduan bangsa.

Karena perilaku yang demikian itu tidak merawat dan melaksanakan warisan kenegarawanan yang telah disepakati dan



dipraktikkan oleh Bapak-Bapak Bangsa di Panitia Sembilan, BPUPK, dan PPKI. Karena dengan latar afiliasi politik dan beragama yang beragam itu mereka berkompromi menghadirkan NKRI dengan mengakui hubungan yang menyatu antara beragama dan bernegara.

### **Ketuhanan YME**

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyebutkan, sekalipun ada upaya memecah belah hubungan antara beragama dan bernegara, tetapi melalui Pancasila dan UUD 1945 yang keduanya memiliki keterkaitan erat adalah bagian dari fakta historis jatidiri/fitrahnya bangsa dan negara Indonesia. Juga merupakan bagian dari perjalanan kehidupan berkonstitusi di Indonesia.

Begitu mendarahdagingnya hubungan kuat antara beragama dan bernegara maka dalam setiap peristiwa besar terkait dasar negara Republik Indonesia selalu saja soal Ketuhanan Yang Maha Esa dipentingkan dan tidak pernah ditinggalkan. Karena itulah UUD RIS, UUDS 1950 juga menyebut Pancasila dengan Ketuhanan YME sebagai

Dasar Negara.

Bahkan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga menegaskan posisi konstitusional daripada Piagam Jakarta yang menjiwai dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi (UUD 1945). Dan, dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) sila pertama dari Pancasila malah “Ketuhanan dengan Kewajiban Melaksanakan Syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketika para tokoh Nasionalis Keagamaan dari umat Islam menyampaikan argumentasi dalam sidang BPUPKI maupun Panitia 9 terkait dasar negara yang bermuansa keislaman dan keagamaan tidak ada tuduhan radikalisme maupun terorisme disematkan kepada mereka. Juga ketika para tokoh Nasionalis Kebangsaan menyampaikan gagasan dasar negara dengan nuansa kebangsaan, tidak ada tuduhan kafir atau tidak beragama. Justru di antara kedua kelompok ini saling berdiskusi dan berargumentasi dengan baik untuk bersama-sama mencari solusi, merumuskan, dan akhirnya menyepakati dasar negara dengan menghormati aspirasi dari seluruh pihak.

Karena itu, penting bagi generasi muda memahami sejarah, termasuk Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Apalagi bagi partai-partai politik, termasuk partai Islam, agar semua pihak berkontribusi melanjutkan kenegarawanan para Bapak-Bapak Bangsa. Yakni, menghadirkan relasi yang positif beragama dan bernegara untuk menghentikan berbagai manuver. □

MBO









FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Untuk itu, rakyat Indonesia mesti lebih menjiwai ideologi bangsa, yakni Pancasila sebagai filosofische grondslag, dan kalimatun sawa' (common platform) yang menyatukan keragaman etnis, ras, budaya dan agama.

"Untuk mencapai itu semua, bangsa Indonesia perlu memiliki satu ikon sebagai penyemangat dan pemersatu. Saya mengusulkan sebuah lagu luar biasa yang lahir dari buah pikir para ulama kita untuk dijadikan lagu nasional agar dihafal dan dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lagunya berjudul 'Syubbanul Wathon (Yaa Lal Wathon)' dengan liriknya yang terkenal 'Hubbul Wathon Minal Iman'," ujar Gus Jazil.

Gus Jazil punya alasan mengusulkan lagu itu, karena maknanya sangat dalam dan bisa diterima seluruh kalangan, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Menurut Gus Jazil, jika makna judul dan syair lagu tersebut meresap ke dalam hati rakyat Indonesia maka akan tumbuh suburlah dan kokoh rasa cinta kepada tanah air. "Kalau sudah begini, radikalisme dan ekstrimisme tidak akan ada tempat di sanubari anak bangsa," katanya.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi

NasDem Syarief Abdullah Alkadrie mengingatkan bahwa masuknya pemahaman radikalisme yang mengakibatkan seseorang terpapar, sehingga diduga berpotensi akan melakukan aksi terorisme yang merugikan semua, bisa terjadi kepada siapapun di lembaga manapun.

Menurut Syarief Abdullah, yang harus diperhatikan secara serius adalah bagaimana paham itu bisa masuk dan meracuni seseorang hingga merugikan dirinya



sendiri dan orang lain. "Saya rasa sangat mustahil di era kekinian kita bisa membendung segala informasi yang masuk. Yang bisa dilakukan adalah membuat benteng dan tameng untuk melindungi diri dari serbuan pemahaman negatif itu. Benteng dan tameng itu adalah Pancasila," ujarnya.

Untuk mencintai Pancasila, rakyat terutama pemuda pemudi bangsa, harus mengenal Pancasila secara utuh. "Ajarkan kepada generasi muda, begitu beratnya proses lahirnya Pancasila. Di dalam proses itu betapa para pendiri bangsa kita mampu menyingkirkan semua perbedaan dan hanya fokus memikirkan bentuk ideologi bangsa yang mampu menyatukan semua," imbuhnya.

Ketika sejarah luar biasa itu diberikan dengan metode penyampaian yang menarik dan mudah dipahami anak-anak milenial maka akan muncul rasa cinta serta bangga memiliki Pancasila. Mereka kemudian akan tumbuh menjadi generasi dengan karakter kebangsaan yang sangat kuat dan tidak akan mudah dipengaruhi berbagai paham radikal. □

DER

Novel Meraih Mimpi

# Sadarestuwati: Cerita Sarat Inspirasi



Ade E. Sumengkar



Sadarestuwati

**A**NGGOTA MPR RI Hj. Sadarestuwati S.P., M.MA mengapresiasi terbitnya Novel Meraih Mimpi yang diinisiasi Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretaris Jenderal MPR RI. Karena dalam novel tersebut terdapat kisah-kisah menarik, mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda, serta masyarakat Indonesia.

Sebagian kisah dalam Novel Meraih Mimpi, kata Sadarestuwati, menyerupai perjalanan hidup yang pernah dilaluinya. Karena untuk menjadi Anggota Legislatif seperti sekarang, Sadarestuwati harus bekerja keras, tidak gampang putus asa dan selalu ingat serta berpasrah diri kepada Allah SWT.

“Saya adalah anak petani yang tidak meneruskan pendidikan dokter sesuai keinginan orangtua dan memilih pindah ke Fakultas Pertanian. Kepindahan ini membuat Bapak marah dan tidak mau menegur. Dalam kondisi tersebut saya bertekad untuk hidup mandiri,” ungkap Sadarestuwati.

Karena enggan meminta biaya kuliah pada orangtuanya, Sadarestuwati yang akrab disapa Estu pun rela menjadi supir taksi. Ia juga berjualan beras di Surabaya. Tak cukup itu saja, Estu juga tak malu-malu menjalani profesi sebagai sales. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mengejar cita-citanya menyelesaikan pendidikan di bangku perguruan tinggi.

Pernyataan itu disampaikan Hj. Sadarestuwati S.P., M.MA., Anggota MPR RI saat menjadi pembicara pada acara Bedah

Novel Meraih Mimpi. Acara tersebut berlangsung di Selasar Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Bedah Novel Meraih Mimpi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Pekan Kehumasan, 8-11 November 2021. Selain Sadarestuwati acara tersebut juga menghadirkan narasumber pengamat Literasi Ade E. Sumengkar, S. Pd., M.M., AAIIJ. Ikut hadir pada acara tersebut Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian, tutur Sadarestuwati, ia terus melanjutkan usahanya yang semakin besar. Hingga akhirnya dipercaya memimpin sebuah BUMN yang beroperasi di Surabaya.

“Jangan pernah merasa paling rendah dan paling tidak mampu karena tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya, jadikan kesulitan karena tidak memiliki apa-apa itu sebagai energi positif untuk mengejar cita-cita dan meraih kesuksesan,” kata Estu lagi.

Sementara pengamat Literasi Ade E. Sumengkar, S.Pd., M.M., AAIIJ., berpendapat, Novel Meraih Mimpi berisi cerita yang sangat menarik. Mampu mengocok dan mengharubirukan perasaan pembacanya. Novel ini juga mengandung kisah inspiratif yang bagus dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena mengandung teladan dan perjuangan dalam meraih mimpi.

“Kalau dinikmati secara serius kita bisa dibuatnya menangis, haru dan bahagia. Ini benar-benar kisah yang sangat baik karena



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI





di dalamnya terdapat karakter bangsa Indonesia yang dicerminkan dalam Empat Pilar MPR RI,” kata Ade E. Sumengkar.

Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mampu, Ade E. Sumengkar berharap, Novel Meraih Mimpi bisa perbanyak dan dibagikan kepada masyarakat. Dengan harapan bisa menginspirasi dan memberi semangat dalam mencapai cita-cita. Tidak sekedar pasrah, karena alasan kemiskinan.

Novel Meraih Mimpi menceritakan perjuangan serta rintangan yang harus dilalui Sukmo dalam mengejar keberhasilan. Saat ia masih kecil, ayahnya jatuh sakit dan memaksanya pulang untuk beristirahat di kampung. Sukmo dihadapkan pada pilihan sulit, ikut ayahnya pulang ke kampung atau berjuang sendiri di kota besar.

Ternyata, Sukmo memilih berjuang untuk meraih cita-cita. Ia kemudian pergi ke masjid menjadi tukang bersih-bersih, sekaligus

mencari tempat berteduh. Dengan cara ini Sukmo mulai menabung untuk menempuh tekadnya melanjutkan pendidikan.

Nahas, uang yang ditabungnya malah raib. Tetapi Sukmo tidak marah. Ia berusaha makin keras agar bisa mengembalikan uangnya yang hilang. Nasib membawanya bekerja menjadi anak kapal yang membawa barang-barang dagangan. Singkat cerita, berkat kerajinannya Sukmo pun mendapat kepercayaan dari pemilik kapal, dan ia diberi tanggungjawab untuk mengelola kapal tersebut.

Kesuksesan menjadi pengusaha ada di depan matanya, jika ia melanjutkan kepercayaan mengurus kapal. Tetapi Sukmo memilih melanjutkan pendidikan hingga akhirnya selesai dari perguruan tinggi luar negeri, dan sukses membangun usahanya. Tetapi, tidak sedikit aral melintang yang harus dia singkirkan sebelum benar-benar mencapai keberhasilan. □

MBO





## Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ERPUSTAKAAN Biro Humas Setjen MPR RI menggelar acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat dengan tema 'Pembangunan Literasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Pasca Pandemi Di Era Industri 4.0', di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber anggota MPR Fraksi Partai PKS Dr. H. Al Muzammil Yusuf, M.Si., anggota MPR Fraksi Demokrat Dr. Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc., penulis buku Ade E. Sumengkar, S.Pd., MM., Pakar Pendidik Dr. Dirgantara Wicaksono, S.Pd., M.Pd., serta para guru Kelompok Bermain, TK dan PAUD seputar Jakarta, Sukabumi, Garut, Cianjur, Depok, dan Tasikmalaya sebagai peserta.

Dalam paparannya, Muzammil Yusuf mengungkapkan bahwa di era modernisasi saat ini, seluruh rakyat Indonesia, termasuk para

pendidik atau guru juga para siswanya, mau tidak mau harus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman.

"Ini penting saya tekankan, sebab negara kita Indonesia sangat kaya sumber daya alam. Kekayaan itu akan menjadi sia-sia jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya, tidak berkualitas," katanya.

Lebih jauh, Muzammil memberikan contoh, negara seperti Singapura dan Korea Selatan adalah dua negara yang sangat terbatas kekayaan alamnya, namun sangat kaya akan sumber daya manusianya. "Dengan meningkatkan kualitas manusianya di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka bisa tampil sebagai negara kaya," tambahnya.

Indonesia, lanjut Muzammil, harus bisa bahkan melebihi mereka dengan dua hal, yakni peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan kekayaan alam yang tepat untuk kepentingan negara. Maka dari itu,





para guru dan pelajar harus tidak boleh bosan-bosan untuk terus belajar. Bahkan, agama Islam mengajarkan dengan tegas, 'Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi' yaitu, 'tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat'.

"Lihatlah betapa pentingnya menuntut ilmu dalam agama Islam. Jadi, belajar dan terus belajar tidak bisa dianggap main-main. Apalagi, bangsa ini dihadapkan dengan berbagai tantangan di era industri 4.0, di mana teknologi informasi berbasis internet mesti dikuasai kalau tidak mau ketinggalan," ungkapnya.

Pada intinya, Muzzammil mengajak, di momen peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2021 elemen masyarakat di bidang pendidikan harus mulai menyadari akan pentingnya kualitas SDM demi kemajuan negara. "Bangsa ini mesti siap, terutama pasca pandemi Covid-19 yang makin mereda dan diharapkan berakhir," tandasnya.

Anggota MPR Nanang Samodra mengatakan, untuk melahirkan SDM yang bagus, harus diperhatikan metode pembelajaran yang tepat, efisien dan sesuai tumbuhkembangnya anak didik sejak usia dini. "Saya masih melihat anak didik, baik itu di TK atau PAUD dijejali dengan berbagai tugas dan materi yang saya rasa belum sesuai usia, sehingga akan terasa berat buat anak. Mestinya secara psikologis, anak-anak usia TK atau PAUD itu dalam masa senang

bermain. Carilah metode pemberian materi yang disesuaikan psikologis anak," katanya.

Nanang menegaskan, jika metode pembelajaran yang baik sesuai psikologis anak terus dilakukan sampai menginjak bangku kuliah maka akan muncul generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diharapkan akan mampu membawa bangsa ini maju di masa depan.

Ada momen yang unik dalam kegiatan tersebut. Di tengah-tengah pemaparan, Al Muzzammil Yusuf mengajak peserta untuk membuat Gerakan Nasional 31:3. Angka itu diambil Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 'Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang'.

"Ini berandai-andai saja, jika gerakan 31:3 itu ada maka luar biasa sekali dampaknya. Pada dasarnya, kita semua baik pemerintah maupun rakyat Indonesia pasti menginginkan generasi muda bangsa yang bukan hanya cerdas tapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang kuat. Itu penting untuk memunculkan karakter dan jati diri bangsa," pungkas Muzzammil. □

DER

## Pelantikan Pejabat di Lingkungan Setjen MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIS Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., menghadiri dan memimpin upacara pelantikan empat pejabat eselon di lingkungan Setjen MPR, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021) lalu.

Pelantikan pejabat di lingkungan Setjen adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan Setjen MPR, dengan tujuan untuk memaksimalkan

pelayanan kepada Pimpinan MPR dan kerja-kerja untuk masyarakat.

Seperti yang selalu diutarakan Sesjen MPR, pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa menunaikan tugas yang diembannya dan mendukung tercapainya reformasi birokrasi. Pejabat yang baru dilantik mesti menerapkan perilaku kerja yang jujur dengan kapabilitas yang tinggi sehingga bisa menjadi contoh yang lain. □

DER

## HUT ke-50 KORPRI



**S**EKRETARIAT Jenderal MPR RI yang diwakili Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah, menghadiri undangan Setjen DPR RI dalam rangka HUT ke-50 KORPRI di Lapangan Jantung Sehat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Turut hadir, Ketua KORPRI Setjen DPR Djaka Dwi Winarko, Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin, serta pejabat di lingkungan DPR RI. Perayaan HUT tersebut diisi dengan pemotongan tumpeng

serta berbagai acara, serta kegiatan antara lain, pameran lukisan, persembahan tari-tarian dan pembacaan puisi yang merupakan hasil karya tiap bidang anggota KORPRI.

Dalam momen tersebut, HUT KORPRI digelar dengan konsep open speech. Dengan tujuan, dapat semakin membuka ruang bagi seluruh anggota KORPRI untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin ruang terbuka yang ada di Kompleks Parlemen. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Antusiasme Masyarakat di Stand PPID MPR

**P**EKAN Kehumasan yang digelar oleh Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, 8-11 November 2021, di Lobi Gedung Nusantara IV dan V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, disambut antusias oleh masyarakat.

Beberapa stan pameran juga digelar di acara tersebut, antara lain pameran foto dan perpustakaan, setiap hari dikunjungi oleh puluhan orang. Salah satu stan yang juga menarik perhatian

pengunjung adalah stand PPID MPR.

Di stand tersebut, pengunjung diberikan kesempatan dan akses untuk bertanya atau memperoleh informasi tentang MPR RI. Penjaga stan PPID dengan responsif dan santun, selalu sigap melayani setiap permintaan pengunjung. Di stan PPID itu pengunjung juga diberi brosur tentang PPID dan segala hal tentang MPR. □

DER



## Sosialisasi di Kota Mataram

# Relasi Beragama dan Bernegara Tak Bisa Dipisahkan



WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengingatkan, ada agenda terselubung di balik tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) paska ditangkapnya Anggota Komisi Fatwa MUI, karena dugaan terorisme. Buktinya, mereka yang menuntut pembubaran MUI menganggap dugaan terorisme yang menyeret anggota MUI adalah efek dari relasi kehidupan beragama dan bernegara. Karena itu, mereka menuntut relasi antara beragama dan bernegara harus dipisahkan.

“Tuntutan pembubaran MUI serta pemisahan relasi beragama dan bernegara adalah nyinyiran yang tidak bertanggung jawab dan a-historis. Mereka tidak pernah membaca sejarah nasional atau terlalu dangkal pelajaran sejarah nasional yang mereka kuasai,” kata Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu disampaikan HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, secara daring pada sosialisasi Empat Pilar MPR yang berlangsung di Aula DPW PKS Nusa Tenggara Barat (NTB) Kota Mataram, Sabtu (20/11/2021).

Sosialisasi yang diselenggarakan MPR

bekerjasama dengan DPW PKS Provinsi NTB itu dihadiri oleh anggota Fraksi PKS MPR RI H. Ahmad Syaikhul dan H. Suryadi Jaya Purnama; Ketua DPW PKS NTB, TGH. Patompo Adnan, Lc., MH.; Ketua MPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE., MM.; Ketua DPW PKS NTB Yek Agil Al Haddar; serta Pengurus DPD, DPC, DPra PKS se-NTB.

Relasi beragama dan bernegara, menurut HNW, berkontribusi besar dalam berdirinya NKRI. Bahkan keberagaman dalam beragama tidak menghalangi para Bapak Bangsa untuk terus menyiapkan kemerdekaan NKRI. Mulai dari BPUPK, Panitia Sembilan, dan PPKI, semua berisi tokoh-tokoh dari beragam agama dan aliran politik.

“Panitia Sembilan tidak hanya terdiri dari tokoh perwakilan agama Islam, tetapi mereka bisa menyepakati Pembukaan UUD 1945. Padahal di dalamnya terdapat dasar dan ideologi negara. Bahkan, pada alinea tiga Pembukaan jelas tertulis: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....Semua itu menunjukkan kuatnya relasi antara kehidupan beragama dan bernegara,” katanya.

Kalau sekarang muncul tuntutan pembubaran MUI dan melepaskan hubungan beragama dan bernegara, menurut HNW, ide tersebut merupakan bukti kemunduran dan hendak memecah belah rakyat. Apalagi di dalam MUI bergabung tokoh-tokoh agama Islam dari berbagai perwakilan organisasi Islam. Termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat Islam lainnya.

“Perwakilan ormas Islam sangat jelas kontribusinya bagi NKRI. Mereka bisa menjalankan perannya secara bersamaan, sebagai umat dan tokoh beragama, serta warga negara. Jadi, tidak ada alasan untuk memisahkan kehidupan beragama dan bernegara, maupun membubarkan MUI. Apalagi Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin masih menjadi bagian dari MUI,” kata Hidayat lagi.

HNW sependapat, jika kasus dugaan terorisme diperiksa dan dituntaskan. Tetapi, bukan berarti seluruh anggota MUI terlibat terorisme, sehingga MUI patut dibubarkan. □

MBO



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T, Anggota MPR Fraksi PKS

## Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Potensial Berbahaya

**M**ENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Menteri Menteri (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini ditetapkan di Jakarta pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021. Latar belakang lahirnya Permendikbudristek ini agar korban pelecehan dan kekerasan seksual berani berbicara dan memberi kepastian hukum bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

Namun, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mengundang kontroversi dan pro kontra. Pokok pangkalnya adalah adanya frasa “tanpa persetujuan korban” yang terdapat pada pasal 5 Permendikbudristek tersebut. Masalahnya frasa “tanpa persetujuan korban” maka bagaimana “jika dilakukan dengan persetujuan atau suka sama suka” apakah boleh? Karena itu Ormas Islam, seperti Muhammadiyah, menolak keras Permendikbudristek ini

karena melegalkan seks bebas di kampus.

Untuk membahas kontroversi tersebut, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PKS yang juga anggota Komisi X DPR, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T. Petikannya.

**Mendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, Permendikbudristek ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apa yang menjadi kontroversi dan keberatan terhadap Permendikbudristek ini?**

Kita semua sepakat agar pelaku kejahatan atau kekerasan seksual dihukum seberat-beratnya. Kita menolak adanya kekerasan seksual karena tidak sesuai dengan kemanusiaan, biadab, dan tidak beradab. Tapi, kenapa Permendikbudristek ini menjadi kontroversi? Permendikbudristek masih menggunakan terminologi yang bias terkait kekerasan seksual yang didasarkan pada adanya paksaan dan ancaman, seperti disebutkan dalam Pasal 5. Dalam Pasal 5 Permendikbudristek disebutkan tindakan

seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, dan sebagainya, tanpa persetujuan korban maka hal itu dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Pertanyaannya adalah kalau dengan persetujuan berarti boleh dong? Sebab, yang tidak boleh adalah kekerasan seksual dengan ancaman dan tanpa persetujuan itu. Kita harus melihat bahwa ideologi persetujuan dalam urusan seksual atau disebut *sexual consent* ini bisa menyebabkan tindakan-tindakan yang secara norma agama dan Pancasila tidak dibenarkan. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya Permendikbudristek merujuk ke agama.

Jadi, bicara kekerasan seksual yang katanya biadab seharusnya merujuk pada sila pertama Pancasila. Artinya, penyelesaian persoalan-persoalan itu bukan hanya kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga menyangkut sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena “persetujuan bersama” dalam konteks seksual bisa menyebabkan tindakan perselingkuhan, zina, dan itu menjadi legal. Mengerikan sekali. Mengapa? Karena kedua pihak memberikan persetujuan, bukan tanpa persetujuan.



Jadi, kalau dengan paksaan atau ancaman maka tidak boleh. Kalau zina dengan paksaan tidak boleh. Apakah artinya kalau zina dengan persetujuan jadi boleh? Seharusnya juga tidak boleh. LGBT dengan paksaan tidak boleh. Lalu LGBT dengan persetujuan berarti boleh? Seharusnya tidak boleh. Karena terminologi yang dipergunakan dalam Permendikbudristek itu bias, akhirnya menyebabkan pengaturan itu malah membenarkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan secara norma tidak dibenarkan.

Kenapa Permendikbudristek itu larinya ke zina? Itu adalah konsekuensi logis dari regulasi. Banyak yang mengatakan dalam Permendikbudristek itu “tidak diatur soal zina di situ”. Memang tidak diatur. Justru karena tidak diatur menyebabkan akhirnya zina boleh dilakukan. Implikasi pengaturan yang “tanpa persetujuan” menyebabkan aktivitas seksual yang dilakukan “dengan persetujuan” menjadi tidak dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual dan berarti dibenarkan boleh dilakukan di lingkungan kampus.

**Apakah frasa “tanpa persetujuan” bisa diartikan juga “jika dengan persetujuan maka boleh”, yang akhirnya bila zina dilakukan “dengan persetujuan” atau suka sama suka (bukan tanpa paksaan dan ancaman) berarti legal?**

Pada beberapa perbuatan (kategori kekerasan seksual) yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendikbudristek jika perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan, lalu apa namanya? Bukankah ini berarti membenarkan adanya seks bebas (di kampus)? Karenanya, sejumlah Ormas Islam menolak Permendikbudristek ini. Bahkan, sejumlah rektor dan profesor juga sudah menyatakan bahwa Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini potensial berbahaya.

**Mendikbud menyatakan bahwa Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 adalah untuk pencegahan dan melindungi korban, bukan membolehkan tindakan asusila. Tindakan asusila sudah diatur dalam UU yang lain. Apa pendapat ibu?**

Kita juga harus ingat bahwa konteks zina dalam KUHP adalah laki-laki yang sudah terikat dalam pernikahan dengan orang yang tidak terikat dengan pernikahan, atau perempuan yang terikat pernikahan dengan



laki-laki yang tidak terikat dengan pernikahan, atau perempuan terikat dalam pernikahan dan laki-laki yang terikat dengan pernikahan. Semua dikategorikan zina. Ini adalah konsep Barat. Kenapa? Karena jika zina dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam pernikahan, apakah keduanya belum menikah, atau antara janda dengan duda, apakah artinya boleh?

Konsep berpikirmya masih konsep berpikir Barat. Karena itu, AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia), salah satu organisasi di Indonesia mengajukan *judicial review* terhadap pasal 282, 284, 285 dan 292 KUHP tentang Perzinaan. Empat orang hakim konstitusi menyatakan, perzinaan memang harus diperluas maknanya. Basisnya adalah aturan agama di Indonesia dan bersumber pada sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan lima orang hakim konstitusi lainnya menyatakan regulasi itu dikembalikan kepada pembuat undang-undang. Artinya, DPR harus membuat pengaturan khusus terkait dengan perzinaan. Konsep dan paradigmanya tidak menginduk ke Barat, tetapi ke norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.



**Menurut Ibu, apakah Permendikbudristek ini sebaiknya dicabut atau direvisi?**

Sebaiknya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dicabut dan dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

**Apakah saat ini Ibu melihat ada kecenderungan meningkatkan kekerasan seksual dan seks bebas di kampus?**

Kita perlu mendudukkan bahwa seks hanya diperkenankan dilakukan dalam perkawinan yang sah. UU Perkawinan menyebutkan, batas usia perkawinan 19 tahun untuk mencegah perkawinan anak. Tetapi ada kampus yang mengajarkan tentang *sexual consent* (persetujuan untuk melakukan tindakan seksual) pada mahasiswa baru yang rata-rata berusia 18 – 19 tahun dan belum menikah. Orang tua mahasiswa baru yang melaporkan hal ini menganggap frasa dengan persetujuan mengarahkan pemahaman mahasiswa baru boleh melakukan aktivitas seksual asalkan sama-sama suka. Permendikbudristek memandang bahwa kekerasan seksual semata disebabkan oleh relasi kuasa dan tidak memandang variabel lain. Seks bebas maupun kejahatan seksual di kampus tidak boleh ada sama sekali.

**Apakah Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 muncul karena RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tak kunjung selesai? Dan, apakah RUU TPKS ini bisa menjadi solusi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?**

RUU TPKS masih dibahas di Baleg DPR RI. Dalam pembahasan sedang dicari pengaturan yang pas. Jika kita cermati, regulasi tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak saja, yaitu hukuman kebiri dan lainnya dalam UU tentang Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak belum dijalankan. Pasal 59 UU itu telah mengatur cukup detil dan pasal 81 – 82 mengatur tentang hukuman tambahan.

Sepanjang pengaturan dalam RUU TPKS tidak bias dan tidak menimbulkan masalah baru, mungkin UU TPKS itu bisa menjadi solusi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tapi, berkaca pada implementasi UU Perlindungan Anak yang belum melindungi anak Indonesia, maka dibutuhkan komitmen semua pihak untuk membangun kesadaran untuk mencegah kekerasan seksual. □

# Hidupkan Mimpi Jutaan *Anak Indonesia*



*Carina Joe*

**S**UNGGUH membanggakan. Seorang ilmuwan Indonesia menjadi bagian dari tim pengembangan vaksin Oxford-AstraZeneca. Dia adalah **Carina Joe**, puteri terbaik bangsa Indonesia dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak kepada kemanusiaan.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, menyebut Carina Joe sebagai ilmuwan yang berhasil menjadi innovator dalam menciptakan formula manufaktur massal vaksin Oxford-AstraZeneca sehingga menjadi satu-satunya vaksin paling banyak diproduksi, yakni 2 miliar dosis, tersebar di 170 negara.

“Atas nama bangsa Indonesia, saya berterima kasih kepada Carina, karena telah menyelamatkan jutaan manusia di tengah situasi pandemik global Covid-19. Kita bangsa Indonesia bangga sama Carina yang memberikan inspirasi serta menghidupkan mimpi-mimpi jutaan anak Indonesia yang saat ini mungkin memiliki mimpi yang sama, ingin menjadi Ilmuan,” ujar Syarief Hasan. □





## Pahlawan itu *Bisa Siapa Saja* asal Berbuat Baik

**A**RTIS penyanyi dan pemain film, Angelica Martha Pieters atau akrab disapa **Angel Pieters** bicara soal pahlawan. "Pahlawan adalah sosok yang tidak memikirkan diri sendiri," ujar artis kelahiran Agustus 1997 ini.

Jadi, menurut Angel Pieter, pahlawan itu adalah seseorang yang mau berjuang demi kita. Dulu mereka berjuang dengan gagah berani melawan penjajah tanpa merisaukan dirinya sendiri.

Berbicara bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November, finalis ajang pencarian bakat Idola Cilik tahun 2008 ini berpendapat, pahlawan bisa melekat pada siapapun asal dia berbuat baik buat dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Angel Pieters*



*Lyodra Ginting*

## Menyanyikan Indonesia Pusaka di Expo Dubai

**LYODRA** Margareta Ginting membuat kagum presiden serta pejabat tinggi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), 4 November 2021. Di Paviliun Indonesia di arena Expo 2020 Dubai yang dihadiri 192 negara, di Al Wasl Plaza, hari itu digelar acara National Day. Pada momen tersebut, Lyodra membawakan lagu 'Indonesia Pusaka.'

Artis penyanyi jebolan kategori A3 pada kompetisi menyanyi solo internasional, khusus anak-anak Sanremo Junior 2017, di Kota Sanremo, Italia, ini membawakan lagu Indonesia Pusaka dengan sempurna. Dan, banyak warganet Indonesia dan Dubai memuji aksi panggung juara Indonesia Idol ini. □

DER



## Saksi Penjajahan Portugis dan Belanda di Maluku

**B**ANGSA Indonesia memiliki peninggalan sejarah yang sangat banyak. Di berbagai tempat hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat peninggalan sejarah masa lalu. Mulai dari sejarah perkembangan manusia, kerajaan-kerajaan tanah air, penyebaran berbagai agama hingga sejarah perjuangan kemerdekaan NKRI.

Sebagian peninggalan sejarah bangsa Indonesia itu nasibnya kurang beruntung. Tidak terawat dan semakin usang dimakan masa. Tetapi sebagian yang lain terlihat tetap rapi, bahkan menjadi kawasan wisata sejarah yang menyenangkan. Dikunjungi banyak turis sehingga memberi penghasilan kepada masyarakat sekitarnya.

Salah satu cara yang acapkali digunakan untuk mempertahankan serta merawat tempat-tempat sejarah itu adalah memanfaatkannya untuk pertemuan atau sekedar menggelar acara tertentu. Pertemuan yang tidak mengundang tamu terlalu besar dan berlangsung secara tenang. Bukan malah menjauhkan atau malah menutup dari jangkauan masyarakat yang ingin menikmati sejarah dan ke-

indahannya. Karena mengisolasi peninggalan sejarah dari antusiasme masyarakat malah membuatnya tenggelam, dilupakan dan tidak mendapat perawatan.

Belum lama ini, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdijat menggunakan Benteng Amsterdam untuk

Maluku, Jumat (5/11/2021).

Buku karya Dr. Connie Rahakundini Bakrie (Analisis Militer dan Pertahanan) itu berisi ajakan kepada pembaca untuk mengenal Nusantara ini dengan cinta. Buku tersebut juga menyuguhkan fakta bahwa di Nusantara ini banyak pejuang perempuannya, yang ikut aktif



menggelar pertemuan terbatas. Pada awal November silam, Rerie begitu Lestari biasa disapa, hadir dan menjadi pembicara kunci pada acara 'Monolog dan Diskusi Buku: Kepak Cinta Pengawal Langit-Pentingnya Keberanian Bangsa Melawan Sebuah Dusta dan Kebohongan' di Fort Amsterdam, Leihitu,

merebut kemerdekaan.

Karena itu, buku berjudul Kepak Cinta Pengawal Langit-Pentingnya Keberanian Bangsa Melawan Sebuah Dusta dan Kebohongan sangat pas dibahas di Fort Amsterdam, Leihitu, Maluku. Karena keberadaan benteng Amsterdam itu tak luput





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dari sejarah perlawanan bangsa Indonesia, khususnya Kerajaan Hitu bersama Ratu Kalinyamat dari Jepara.

Selain sarat nilai-nilai sejarah, Benteng Amsterdam juga menyimpan keindahan alam nan eksotis. Hamparan pasir bersih membentang disertai deburan ombak tak berkudahan menawarkan ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Belum lagi angin yang kontinyu bertiup menghadirkan suasana yang tak terkirakan. Di sore hari, pada saat suasana cerah, Benteng Amsterdam mempertunjukkan keindahan alam yang sangat dahsyat. Sunset bisa dinikmati dari area Benteng Amsterdam dan akan menjadi satu kenangan yang tak mudah untuk dilupakan.

### Swafoto

Benteng Amsterdam merupakan situs cagar budaya terletak di Kecamatan Hila, tepatnya 42 km dari pusat Kota Ambon. Kirakira butuh waktu sekitar satu jam untuk mencapai tempat ini, dari kota Ambon. Untuk sampai di Benteng Amsterdam bisa menggunakan jasa sewa minibus dari Bandara Pattimura. Atau, bagi yang gemar backpacker bisa menumpang angkutan kota Trayek Laha, lalu disambung dengan minibus AKDP trayek Hila. Lokasi Benteng Amsterdam ini

berada di Kaitetu, Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Bangunan benteng peninggalan Portugis, VOC dan Belanda pada zaman penjajahan ini berada di tepi pantai. Kontstruksi bangunan benteng menjadi daya tarik bagi warga untuk berkunjung atau sekedar berswafoto. Bentuknya seperti sebuah bangunan rumah. Banteng ini memiliki tiga lantai, lantai dua dan lantai tiga merupakan lantai berkayu. Bangunan ini juga memiliki beberapa jendela yang sering dijadikan sebagai tempat berswafoto lantaran pemandangannya indah, berhadapan dengan laut. Pada ujung bangunan benteng juga terdapat sebuah menara pengintai yang digunakan untuk mengintai musuh.

Bangunan utama Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Portugis tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah Belanda menguasai pulau Ambon, tahun 1605 mereka mengambil alih bangunan loji dan mengubahnya menjadi kubu pertahanan.

Pada abad ke -17, Belanda mengubah loji menjadi kubu pertahanan disebabkan oleh pertempuran antara bangsa Belanda dan Kerajaan Hitu yang dipimpin oleh Kapitan Kakiyal, 1633-1654. Gagasan menjadikan loji

sebagai kubu pertahanan dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Belanda Jaan Ottens, 1637. Oleh Gerrad Demmer pada 1642 kubu pertahanan itu dibesarkan. Dan pada 1649 kembali diperbesar oleh Gubernur Jenderal Anthony Caan. Selanjutnya ditegaskan menjadi sebuah benteng dengan nama Benteng Amsterdam oleh Arnold De Vlaming Van Ouds Hoorn, 1649-1656.

Benteng Amsterdam ditinggalkan Bangsa Belanda awal 1900 dalam keadaan rusak dan ditumbuhi sebatang pohon beringin besar sebelum dipugar oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Propinsi Maluku, pada Juli 1991 hingga Maret 1994. Pemugaran kembali benteng ini berdasarkan gambar dalam buku Beschreiving van Amboinan (Uraian Tentang Pulau Ambon) karangan Francois Valantyn tahun 1772.

Benteng Amsterdam merupakan salah satu bangunan tua, berusia ratusan tahun dan merupakan bagian dari sejarah penguasaan VOC di Ambon, Maluku. Benteng ini termasuk benteng yang terpelihara di Maluku yang memiliki museum kecil sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan masa lalu. □

MBO

Hj. Fahira Idris, SE., MH.

## Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Melibatkan *Partisipasi Publik*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**W**ACANA kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) terus bergulir. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Manuara, pemerintah telah menyerahkan surat Presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo ke parlemen. Penyerahan surpres pada Rabu (29 September 2021) menandai bahwa pembahasan menyangkut pemindahan Ibu Kota Negara, sudah masuk ke ranah legislatif.

Menanggapi wacana seputar kepindahan Ibu Kota Negara, pimpinan Kelompok DPD di MPR Fahira Idris, SE., MH., berpendapat, semua kebijakan apalagi implementasi soal IKN harus dilandasi oleh skala prioritas. Jangan sampai program tersebut bertabrakan dengan prioritas pembangunan yang saat ini tengah dijalankan. Apalagi rencana pemindahan IKN ini akan dilaksanakan pada situasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.

Masalahnya, kapan pandemi akan berakhir, belum ada yang berani memastikan. Padahal penanganan masalah Covid-19 ini membutuhkan fokus penuh. Baik menyangkut sumber daya maupun anggaran. Jangan sampai, rencana pemindahan IKN malah merusak fokus pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Apalagi, pemindahan IKN juga butuh fokus yang penuh dari pemerintah agar berjalan efektif. Selain itu, pemindahan IKN juga membutuhkan dana yang sangat besar agar bisa segera terealisasi. Karena itu, di situasi pandemi ini langkah bijaknya jika pemerintah fokus dulu pada penanggulangan dan pengendalian pandemi. Baru kemudian wacana pemindahan IKN dibicarakan kembali.

Selain itu, yang juga penting terkait IKN, kata perempuan yang

dikenal sebagai politisi, pengusaha, dan aktivis itu adalah pelibatan publik. Menurut Fahira, sejak awal penyusunan rencana kebijakan pemindahan IKN, peran pemerintah tampak lebih dominan. Ruang partisipasi publik sangat minim. Padahal pemindahan IKN adalah sebuah program besar yang harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik.

Rakyat Indonesia harus dilibatkan sepenuhnya dalam rencana dan realisasi pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, mekanisme pelibatan yang tepat adalah dengan menggelar uji publik untuk menghimpun gagasan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pendapat para ahli dari berbagai bidang.

“Baiknya uji publik pemindahan ibu kota digelar setelah pandemi bisa kendalikan. Agar rakyat lebih konsentrasi memberi masukan dan gagasan. Selain itu, hasil uji publik ini akan menjadi mandat yang kuat kepada siapapun nanti yang menjadi presiden untuk mengambil langkah-langkah konkret pemindahan ibu kota. Karena saat ini, rakyat masih fokus berjabaku melawan Covid-19,” kata Fahira lagi.

Dengan uji publik, rakyat dan para pemangku kepentingan dapat memahami substansi dan teknis gagasan pemindahan ibu kota sehingga dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Dengan uji publik, semua sisi wacana pemindahan ibu kota akan diuji, sehingga pemerintah menghasilkan rencana kerja yang sempurna.

### Bagian dari PPHN

Menurut Fahira, sangat penting sebelum proses pembangunan IKN ini dimulai, undang-undang tentang Ibu Kota Negara sudah disahkan terlebih dahulu agar payung hukumnya jelas. Tak kalah





urgennya adalah kejelasan menyangkut keberlanjutan pembangunan. Karena pembangunan ibu kota tidak mungkin selesai selama pemerintahan Presiden Jokowi dan harus dilanjutkan oleh pemerintahan setelahnya.

Artinya, pembangunan Ibu kota baru harus menunggu pengesahan RUU IKN dan pandemi reda. Dengan begitu siapapun presidennya, pemindahan IKN tetap berlanjut. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan IKN, idealnya rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur oleh pemerintah dipagari dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Karena berdasar UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), tidak ada sanksi apapun kepada presiden berikutnya apabila tidak melanjutkan sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya. Oleh karena itu, selain termasuk dalam UU, IKN juga perlu dikuatkan melalui PPHN.

“Jangan sampai rencana pemindahan ibu kota dikait-kaitkan dengan kondisi pembangunan di Jakarta. Seolah-olah pemerintah Jakarta gagal sehingga harus dilakukan pemindahan terhadap ibu kota,” kata Fahira kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Pasalnya, pembangunan di Jakarta, menurut Fahira, sudah berada

di jalur yang benar. Salah satu parameternya adalah raihan berbagai penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Baik skala nasional maupun internasional selama dipimpin oleh Anies Baswedan. Capaian berbagai penghargaan itu adalah buah dari konsistensi melaksanakan janji kampanye dan merealisasikan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Konsistensi merealisasikan visi misi dan program pembangunan di Jakarta secara tepat, terukur, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan publik dan dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi. Serta taat kepada aturan perundang-undangan. Dampaknya bukan hanya dirasakan langsung warga, tetapi juga akan diapresiasi banyak pihak. Banyaknya penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta selama dipimpin Pak Anies adalah buah dari konsistensi.

Selama gubernurnya konsisten merealisasikan rencana pembangunan yang berorientasi kepentingan public, kata Fahira, maka apresiasi dari berbagai pihak juga akan mengalir. Harus diakui, selama hampir 4 tahun terakhir, perubahan paradigma pembangunan di Jakarta di mana Pemprov DKI Jakarta sebagai penyedia platform dan warga sebagai co-creator berdampak besar, dan manfaatnya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dirasakan langsung warga. Semua program pembangunan ini semakin dirasakan saat semua kebijakan dilandaskan kepada asas transparan dan akuntabel, sehingga pelayanan publik semakin berkualitas.

Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta meraih apresiasi dan penghargaan juga tidak lepas dari ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, keterbukaan Pemprov DKI Jakarta dalam menerima dan menindaklanjuti setiap masukan, saran, dan kritik baik dari warga, para ahli/akademisi dan dari kementerian/lembaga terkait, juga menjadi faktor penting diraihnya berbagai penghargaan.

“Dari sisi penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta juga berada di jalur yang tepat. Di Indonesia, Jakarta adalah salah satu provinsi terbaik dalam menanggulangi pandemi dan juga cakupan vaksinasi. Sebagai orang yang mengawasi dan turun langsung di lapangan, saya menilai penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta berada di jalur yang benar, termasuk penanggulangan berbagai dampaknya, terutama dalam bidang ekonomi,” kata Fahira lagi.

### Bisnis Parcel

Nama dan ketokohan Fahira Idris sebagai politisi perempuan tak perlu dipertanyakan. Dia adalah satu dari sedikit politisi wanita yang luwes bergaul dengan semua kelompok, termasuk kaum pria. Ini bisa dibuktikan, antara lain dari kiprahnya sebagai Ketua Umum Bang Japar Ormas dan LBH Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Dalam setiap aksinya, ormas ini lebih banyak dihadiri kaum laki-laki. Dan, karena itu jangan heran bila diwaktu tertentu, Fahira tampak mengenakan baju laiknya pendekar.

Di wadah ini Fahira bukan melulu menggelar kegiatan sosial, tapi juga keagamaan bahkan menjurus ke urusan politik. Baginya, kerja-kerja sosial seperti yang dilaksanakan Bang Japar bukan hal baru.

Sejak masih remaja, puteri bungsu pasangan H. Fahmi Idris dan Hj. Kartini Hasan Basri, itu sudah terlibat di berbagai kegiatan

kemasyarakatan.

Fahira pernah menjadi relawan pada tanggap bencana erupsi gunung Galunggung 1982, dan gempa Yogyakarta 2006. Ia juga mengambil bagian sebagai tim relawan pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami Sumatra Barat 2009. Belakangan, bersama teman-teman twitter-nya, Fahira mendirikan Posko Bantu Banjir di Rumah Damai Indonesia pada saat Jakarta terkena banjir bandang pada Januari 2013.

Meski sudah banyak aksi-aksi kemanusiaan yang diikuti, ia tak pernah jumawa. Baginya, apa yang dilakukan masih jauh dari cukup, bahkan banyak kekurangannya. Ia masih perlu belajar, berbenah dan memperbaiki diri, agar bisa lebih baik ke depannya.

“Saya merasa masih banyak hal yang harus diperbaiki dan tingkatkan. baik sebagai pribadi maupun wakil rakyat atau anggota DPD RI. Jika ada yang terinspirasi oleh saya, saya mengucapkan terima kasih. Namun, sekali lagi saya manusia biasa yang masih terus belajar dan juga belajar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain,” kata ibu dua puteri ini.

Selain bidang sosial, sejak muda Fahira juga sudah berkecimpung







di bidang usaha. Sebelum istilah UMKM muncul, perempuan kelahiran Jakarta 20 Maret 1968 ini sudah menjalankan usaha kecil. Karena itu, tak berlebihan jika ia dikenal sebagai pengusaha parsel dan bunga. Perusahaan parsel yang dijalankannya dimulai dari skala kecil sewaktu masih mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bersama teman-temannya.

Sedang istilah aktivis yang melekat di belakang namanya, muncul karena istri Aldwin Rahadian, SH., ini kerap terlibat dalam perjuangan menyangkut isu-isu perempuan, anak, serta gerakan anti miras. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak ia terlibat dan membela berbagai isu menyangkut perempuan, anak, dan minuman keras.

Sukses Fahira menjadikan dirinya sebagai politisi, pengusaha dan aktivis, tak lepas dari kehidupannya sejak kecil. Sejak kecil ia senang belajar dan berwirausaha. Sejak kecil orang tuanya juga mengajarkan agar Fahira selalu berempati kepada orang lain. Agar setiap tindakan yang dikerjakan bermanfaat bagi orang lain.

“Untuk menjalankan esensi hidup, saya lakukan dengan berbagai aktivitas sosial. Bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mandiri. Jadi, aktivitas sosial bukan hanya diartikan memberi bantuan semata, tetapi merumuskan program-program yang berkelanjutan sehingga manfaatnya permanen dan dampaknya bisa lebih luas,” kata Fahira lagi.

Keterlibatan Fahira di panggung politik nasional, seperti kata pepatah: buah jatuh tak jatuh dari pohonnya. Dalam dirinya mengalir darah politik dari ayahnya, Fahmi Idris, konglomerat dan politisi senior Partai Golkar yang berasal dari Minang. Fahmi Idris pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja Indonesia pada pemerintahan Presiden Habibie. Dan, Menteri Perindustrian Indonesia pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Sementara dari ibunya, Hj. Kartini Hasan Basri, Fahira mewarisi ketokohan ulama. Karena kakeknya dari garis ibu, yaitu KH. Hasan Basri, adalah mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu tak berlebihan jika pada 2014, Fahira yang memutuskan terjun ke ranah politik berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota MPR dari kelompok DPD.

Sedangkan ketertarikannya menjadi anggota DPD, karena ingin berdiri dan berada di semua golongan dan lapisan masyarakat. Tidak terbelenggu oleh kepentingan partai, serta visi misi tertentu. Atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu. □

MBO

## Profil

### Fahira Fahmi Idris, SE., MH

Tempat Tgl. lahir : Jakarta, 20 Maret 1968

Suami : Aldwin Rahadian

#### PENDIDIKAN

1974 - SD Argentina, Jakarta

1977 - SD Besuki, Jakarta

1980 - SMP Al-Azhar, Jakarta

1983 - SMA Al-Azhar, Jakarta

1986 - Fakultas Matematika, Universitas Padjadjaran, Bandung

1987 - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta

2008 - Magister Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung

#### JABATAN ORGANISASI

- Ketua Umum Ormas dan LBH Kebangkitan Jawara dan
- Pengacara (Bang JAPAR)
- Ketua Asosiasi Pengusaha Parcel Indonesia (APPI)
- Ketua Harian Perbakin DKI Jakarta
- Ketua Umum DPP Saudagar Muda Minang
- Pendiri dan Ketua Umum GEMA DAMAI
- Ketua Bidang Pembinaan dan Pendidikan DPP IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia)
- Ketua Yayasan Selamatkan Anak Bangsa
- Koordinator Posko Bantu Banjir Jakarta
- Ketua Gerakan Anti Miras untuk anak/remaja di bawah usia 21 tahun

#### PENGHARGAAN

- The Most Favorite Inspiring Woman by Cosmoners tahun 2005
- The Most Inspiring Tweeter by Tony Hastings
- Owner of The Top 10 Blogs tahun 2010
- Twiter Inspiratif Fimela.com Indonesia tahun 2013

# Bahas Buku 'Integritas Penegak Hukum'

Perpustakaan MPR bekerjasama dengan Universitas Kuningan (Uniku) menggelar acara bedah buku karya Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan HAM di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/11/2021).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas di lingkungan Universitas Kuningan (Uniku), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (6/11/2021), mengikuti acara 'Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat' di Aula universitas kebanggaan masyarakat Kuningan itu. Hari itu, Perpustakaan MPR bekerja sama dengan Uniku mengupas buku berjudul 'Integritas Penegak Hukum', karya Amir Syamsuddin, praktisi hukum dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hadir dalam kegiatan itu, anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Dr. Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M.; Kepala Perpustakaan MPR, Yusniar SH.; Wakil Rektor III Uniku, Dr. Haris Budiman SH., MH.; dan Dekan Fakultas Hukum Uniku, Dr. Suwari Akhmadhian SH., MH.

"Selamat datang di Kabupaten Kuningan, khususnya di Uniku," sapa Wakil Rektor III Uniku, Haris Budiman, mengawali sambutannya. Kampus ini, menurut Haris Budiman, merupakan kebanggaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuningan. "Kegiatan hari ini adalah untuk kedua kalinya MPR hadir di Uniku, dan ini merupakan suatu anugerah luar biasa bagi kami", paparnya.

Bicara Buku yang dihadiri langsung oleh wakil rakyat dari dapil Kuningan merupakan

kegiatan yang selaras dengan keinginan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang ingin menjadikan perguruan tinggi sebagai kampus merdeka, di mana kampus bisa menghadirkan berbagai kalangan untuk memaparkan segala permasalahan dengan kajian ilmiah. "Dari sinilah mahasiswa tak hanya mengerti teori, namun juga memahami apa yang terjadi di lapangan", tuturnya.

Haris Budiman mengapresiasi kehadiran Didi Irawadi dan Perpustakaan MPR di Uniku untuk membedah buku 'Integritas Penegak Hukum'. Buku karya ayah Didi Irawadi itu sangat luar biasa. Meski sudah ditulis sepuluh tahun lalu, namun isi dan pesannya masih relevan dengan kondisi hukum saat ini. "Pak Amir Syamsuddin merupakan orang yang paripurna dalam dunia hukum, dari seorang berprofesi pengacara hingga menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," paparnya. Dalam buku itu banyak kasus hukum besar ditulis oleh Amir Syamsuddin.

Saat memberi sambutannya, Kepala Perpustakaan MPR, Yusniar, mengucapkan terima kasih kepada Uniku. Menurut Yusniar, Perpustakaan MPR datang ke kampus terbesar di Kuningan ini sudah kedua kalinya. "Tahun lalu kita mengadakan kegiatan di kampus ini dengan tema Pustaka Akademik,"

ungkapnya. Dia berharap, dari jalinan kerja sama ini dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. "Sejak tahun 2017, Perpustakaan MPR telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia," tambah Yusniar.

Lebih lanjut Yusniar menjelaskan, saat ini perpustakaan MPR terus berusaha untuk melengkapi buku, dokumen, dan koleksi yang terbuka untuk umum, Yusniar mempersilahkan para mahasiswa Uniku untuk berkunjung ke Perpustakaan MPR bila hendak mencari atau membutuhkan referensi studinya. "Silahkan datang langsung ke Jakarta", ujarnya. Bila tidak sempat ke Jakarta atau karena masih dalam situasi pandemi, bisa mengunjungi Perpustakaan MPR melalui web yang dimiliki Perpustakaan MPR.

Dalam kesempatan itu, Didi Irawadi menuturkan, bila situasi tidak dalam keadaan pandemi, acara Bicara Buku ini bisa mengundang lebih banyak peserta. "Bisa mengundang ribuan peserta", ungkapnya. Namun, dalam kondisi yang demikian, sudah cukup dengan jumlah peserta yang ada, tentunya dengan menerapkan prokes," tuturnya seraya menyebutkan acara ini juga merupakan ajang silaturahmi.

'Integritas Penegak Hukum', menurut Didi Irawadi, merupakan wujud kerisauan Amir Syamsuddin melihat banyak persoalan hukum di Indonesia. Meski sudah masuk dalam era reformasi, namun permasalahan hukum masih tetap ada, bahkan hingga hari ini. Menurut Didi Irawadi, masih banyak masalah hukum yang belum selesai dan masih bermasalah. "Penegakan hukum berjalan tidak sesuai harapan. Penegakan hukum masih banyak kekurangan," ungkap Didi Irawadi. Nah, lewat karya buku karyanya, Amir Syamsuddin mengulas kekurangan-kekurangan yang ada.

Didi Irawadi menjelaskan, tulisan-tulisan ayahnya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, seperti supremasi politik masih memengaruhi penegakan hukum. Tak hanya itu, soal KPK yang terus digoyang, menurut Didi Irawadi, sudah diprediksi oleh Amir Syamsuddin sejak dulu. "Selalu digoyang oleh kekuasaan kalau KPK kuat," ungkapnya. "Prediksi Pak Amir ternyata benar", tuturnya. □

AWG



## Dari Senayan **Mengupas** Relasi Islam dan Negara

Buku kedua Arsul Sani sangat komplit dalam mendiskripsikan teori ketatanegaraan oleh para cendekiawan Muslim. Ditopang dengan pengalaman Nabi dan negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim dalam bertatagera, lahirlah buku Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia.

**K**ALAU kita bedah perpustakaan terlengkap di Indonesia, Belanda, atau Australia, di sana akan ditemukan ratusan buku yang bersubjek tentang relasi Islam dan negara di Indonesia. Buku itu ditulis oleh *Indonesianis* (peneliti atau akademisi asing), akademisi, cendekiawan, mahasiswa, bahkan dari para politisi.

Pada Oktober 2021, koleksi buku yang bersubjek demikian bertambah satu. Satu tambahan buku itu ditulis oleh politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. Judul buku yang ditulis oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu langsung pada intinya, yakni *Relasi Islam dan Negara Perjalanan Indonesia*. Jadi pembaca sudah tahu tujuan dan isinya dari melihat judul, sehingga bila ingin melakukan studi masalah itu tak perlu lagi membongkar-bongkar koleksi perpustakaan sebab apa yang dicari sudah ditemukan.

Mengapa pria yang pernah menjadi wartawan Majalah *Panji Masyarakat* itu menulis buku dengan subjek yang sudah banyak ditulis orang dan dicetak dalam buku? Alasan yang dikemukakan terungkap dalam *Pendahuluan*, halaman 1. Diterangkan, dalam berbagai kesempatan pertemuan dan silaturahmi dengan elemen masyarakat, khususnya kalangan organisasi dan umat Islam, dia sering mendapat sejumlah pernyataan, pendapat ataupun pertanyaan terkait hubungan Islam atau agama dengan negara di Indonesia.

Pernyataan, pendapat, dan pertanyaan yang demikian, menurut pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu tak hanya dari kalangan umat Islam namun juga dari kalangan umat beragama yang lain, khususnya umat Kristiani.

Untuk menjelaskan kepada mereka, dirasa oleh Arsul tidak cukup dengan lewat orasi. Agar penjelasan mengenai relasi Islam dan negara di Indonesia lebih lengkap, komplit, dan masif, maka dirinya menerbitkan buku yang di-prolog-i oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, di-epolog-i Prof. Dr. Moh Mahfud, MD., dan sekapur siri oleh Dr (HC). Ir. Suharso Monoarfa.

Buku karya Arsul yang kedua ini bisa dikatakan tebal, di atas 400 halaman. Tebalnya halaman bisa terjadi sebab di *Bagian Satu*, di sana dibahas dan dikupas pandangan Islam dan negara dari pemikir-pemikir besar ketatanegaraan, seperti Al Farabi, Al Mawardi, Al

Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Mohammad Roem, dan Nurcholish Madjid.

Aktivis HMI UI itu tak hanya bersandar pada teori, namun juga belajar pada pengalaman masa lalu di mana pengalaman yang ada pada saat itu, saat ini ada yang mengatakan sebagai model Negara Islam. Pada *Bagian Dua*, ada bahasan yang menceritakan mengenai Nabi dan Negara Kota Madinah, Konstitusi Madinah, Tradisi Musyawarah, Praktik Bernegara pada Masa Umayyah dan Abbasiyah, serta cerita mengenai Turki Utsmani. *Bagian Dua*

diperlengkap pada *Bagian Tiga*, di mana pada bagian ini diceritakan praktik ketatanegaraan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Di bagian ini ada pola hubungan antara Islam dan negara di Malaysia, Brunei, Iran, Arab Saudi, Turki, Maroko, Tunisia, dan Mesir.

*Nah* di *Bagian Empat* inilah inti dari buku yang merupakan catatan Arsul Sani selama berada di Senayan (anggota DPR/MPR). Di bab ini dikupas berbagai hal mengenai dinamika relasi Islam dan negara di Indonesia.

Azyumardi Azra dalam buku (halaman xxvii) mengatakan, buku ini memiliki cakupan yang luas, khususnya menyangkut Islam dan politik, khususnya dalam relasi dengan NKRI. Buku karya Arsul Sani disebut oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu memiliki kontribusi penting dalam subjek

relasi Islam dan negara. Karya yang ada dikatakan menduduki signifikansi tersendiri, karena selain merupakan renungan pemikiran juga pengalaman dan pengamatan.

Mahfud MD dalam buku ber-cover warna hijau itu (halaman 440) berkesimpulan, kita tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan sendirinya adalah juga rahmat bagi Indonesia. Dari konstruksi fikih, kita juga bisa meyakinkan diri kita bahwa Negara Pancasila bukan hanya tidak bertentangan dengan syariat Islam karena ia dilahirkan dari hasil perjuangan dan ijtihad para ulama Islam yang ingin mendirikan negara di tengah bangsa Indonesia yang majemuk. □

AWG





Oleh:  
**Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA.**  
Wakil Ketua MPR RI

## Menguatkan Kerukunan Internal dan Antarumat Beragama

UMAT beragama di Indonesia perlu menelani dan mempraktikkan kerukunan beragama yang dilakukan oleh para Bapak Bangsa. Baik perilaku para Bapak Bangsa yang menjadi anggota BPUPK, Panitia Sembilan, ataupun PPKI. Kerukunan yang dijalin para Bapak Bangsa telah menghasilkan kesepakatan Piagam Jakarta (Pembukaan UUD 1945), Pancasila, dan NKRI tetap dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Kenegarawanan para Bapak Bangsa meski tampak berbeda agama, tetapi tak ada satupun yang antiagama atau pengikut PKI. Keteladanan mereka harus dijadikan rujukan dan penyejuk, terutama saat membicarakan kembali soal kerukunan beragama dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Untuk itu, penting dihadirkan lagi semangat gotong royong menguatkan paham dan praktik kerukunan beragama, baik internal maupun antarumat beragama. Sehingga dapat mengulangi peran bersejarah pahlawan bangsa untuk menjadi pilar menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Seperti pembelahan warga karena pilpres, kemunduran nilai religius dengan maraknya korupsi, kemerosotan moral, dan kerusakan lingkungan, dampak pandemi Covid-19, serta mengkritisi kebijakan yang mengabaikan norma agama sehingga tidak sesuai dengan Sila I Pancasila dan UUD NRI 1945.

Upaya untuk melindungi dan mempraktikkan nilai-nilai agama yang baik dan benar perlu dilakukan agar peristiwa yang menghancurkan negara dan agama, seperti pemberontakan PKI tidak berulang. Pahalanya, pemberontakan itu merupakan puncak kejahatan terhadap bangsa dan negara yang berawal dari olok-olok kalangan komunis yang berpaham atheis terhadap nilai-nilai agama. Kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa pemberontakan dilakukan PKI. Karena itu umat beragama penting waspada dan menyatukan sikap, apabila ada pihak-pihak yang mulai menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Karena begitulah awalnya dilakukan oleh para atheis komunis sebelum terjadinya pemberontakan PKI. Olok-olok itu digunakan untuk mendesakralisasi agama dan melemahkan spirit umat beragama dari meyakini kebenaran ajaran agamanya.

Mengingatkan sangat pentingnya bagaimana memupuk dan menguatkan kerukunan antar dan internal umat beragama, ada banyak instrumen yang bisa kita gunakan. Paling utama tentu pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sesuai kesepakatan para *founding fathers* serta MPR lembaga tertinggi negara, yang waktu itu di dalamnya masih ada Fraksi TNI/Polri, Utusan Daerah dan Golongan, termasuk dari PDKB dan anggota-anggota MPR dari kalangan nonmuslim. MPR waktu itu masih sebagai lembaga tertinggi negara mengamandemen UUD Tahun 1945 tetapi tetap

menempatkan agama dalam posisi yang sangat dipentingkan, baik dalam Pancasila maupun dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28 E, I, J, Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 31 Ayat 3 dan Ayat 5).

Untuk menguatkan kerukunan umat beragama, juga penting dimulai dengan mengokohkan kerukunan internal umat beragama, dengan tidak lagi mengungkit dan menyebarkan paham yang sudah selesai ditolak atau disepakati di internal agama, seperti soal kewajiban sholat serta makna Tauhid dalam Islam. Karena itu meresahkan internal umat dan tidak menyatukan bahkan memecahbelah internal umat beragama (Islam). Padahal, sulit dibayangkan bisa dihadirkan kerukunan antar umat bila di internal umat dibuat tidak rukun, dan tidak bertoleransi.

Menguatkan kerukunan antarumat beragama juga bisa dikreasikan, selain kerja sama menghadang ideologi yang membahayakan agama dan NKRI, umat beragama juga dapat bersatu bekerja sama dan ikut menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Termasuk mengkritisi beberapa kebijakan yang mengabaikan peran agama sebagaimana kesepakatan pendiri bangsa.

Misalnya, bagaimana umat beragama bersama-sama mengoreksi Peta Jalan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional 2020-2035 dari yang sama sekali tidak menyebut frasa agama. Itu salah satu contoh bagaimana umat beragama, melalui ormas agama, membantu menyelesaikan masalah bangsa dan mengoreksi hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kondisi pandemi Covid-19 juga bisa menjadi sarana untuk memperkokoh umat beragama. Ini juga telah dilakukan oleh sejumlah ormas Islam dan partai politik Islam yang hadir membantu umat beragama dalam melawan pandemi Covid-19. Tanpa mempertimbangkan latar belakang keagamaan, melakukan disinfeksi untuk sejumlah rumah ibadah dari berbagai agama seperti masjid, mushola, gereja, dan vihara. Dan, dengan tidak membedakan latar agama, membantu vaksinasi gratis kepada warga dengan latar agama yang berbeda-beda. Alhamdulillah mereka menerima kehadiran dan pelayanan kami. Hal seperti ini, tentunya juga dilakukan oleh ormas agama lain, tidak hanya Islam.

Ada banyak cara untuk menguatkan spirit dan praktik kerukunan internal dan antarumat beragama. Dan, dengan semangat kerukunan umat beragama baik internal maupun antarumat beragama maka kesepakatan kita sebagai warga bangsa bahwa kita menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang telah diwariskan oleh para pemuda dan pahlawan bangsa dari latar agama yang beragam, selalu dapat kita teladani, praktikkan, dan wariskan kepada generasi milenial, generasi z, dan generasi yang sekarang mengisi kampus-kampus, yang nanti akan mewarisi Indonesia emas, saat peringatan 1 abad Indonesia Merdeka. □





**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHIKNEKA TUNGGAL IKA

MEDEIA PIMPORAN DAN KEMUNDUKAN KEMUNDUKAN  
**MAJELIS**

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**

**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MEWAH, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI  
**MAJELIS**

**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT